



LAPORAN AKHIR

STUDI BASELINE SOSIAL EKONOMI DI LOKASI FOREST PROGRAMME V (KABUPATEN MADIUN JAWA TIMUR)



Tim Penyusun (Yayasan Kehutanan Masyarakat Indonesia)

Dr. (C) Mangarah Silalahi, S.Sos., MSC., MT

Rivani Noor, SE, M.Ling

Ir. Muayat Ali Muhshi

Ahmad Salman Alfarizy, B.BA

Samdhana Achmal Saidi, S.Tr.E.

Yayasan Kehutanan Masyarakat Indonesia (YKMI)/

Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM)

Didanai oleh:

Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat

Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan Republik Indonesia

Jakarta, 12 Desember 2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

Studi *baseline* sosial ekonomi secara khusus *baseline* pendapatan rumah tangga Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) ini dilakukan di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Tujuan dari studi ini adalah, (1) Menjelaskan sistem mata pencaharian masyarakat PS penerima manfaat Forest Programme V (FPV) dan melakukan analisis keterkaitan pendapatan masyarakat dengan kegiatan FPV, (2) Membangun data dasar (*baseline*) ekonomi sosial di tingkat masyarakat penerima manfaat PS dan mengintegrasikannya dengan sistem Monitoring & Evaluasi (M & E) FPV.

Studi lapangan dilaksanakan selama 5 minggu dari minggu kedua bulan November sampai dengan awal bulan Desember 2025. Data yang digunakan meliputi data dari sumber sekunder dan primer. Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai laporan dan informasi yang didapat dari berbagai instansi dan juga dari internet. Sumber data primer didapatkan dari hasil Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion/FGD*) sebanyak 5 kali, wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan 5 informan kunci, dan observasi partisipatif (*participation observation*), serta penyebaran dan pengisian kuesioner ke 102 responden dari 17 KPS dengan menggunakan Google Forms oleh enumerator yang merupakan penyuluh PS di Kabupaten Madiun. Analisis data primer dan sekunder dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan kuantitatif sederhana.

Hasil survei menghasilkan pendapatan rumah tangga anggota KPS di Madiun yang berasal dari areal PS (komoditas yang dikonsumsi sendiri dan di jual). Komoditas PS yang dikonsumsi sendiri antara lain tanaman padi, buah-buahan, umbi-umbian, jagung, dan kacang tanah. Sedangkan komoditi yang dijual, terdiri dari tanaman pangan (padi, jagung, singkong, ubi), buah-buahan (pisang, pepaya, kacang tanah), dan tanaman tahunan seperti kopi, alpukat, dan porang. Adapun ringkasan pendapatan anggota KPS di Madiun yang berasal dari areal PS dan Non PS sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan sumber pendapatan rumah tangga KPS di Kabupaten Madiun

No.	Jenis Pendapatan	Kabupaten Madiun		
		Total (Rp)	Rata-rata/tahun/KK (Rp)	Rata-rata/bulan/ KK (Rp)
1	Pendapatan areal PS	1.371.478.000	13.445.863	1.120.489
2	Pendapatan non PS	1.080.240.000	10.590.588	882.549
Pendapatan anggota KPS		2.451.718.000	24.036.451	2.003.038
Pendapatan/ kapita			6.009.113	500.759

Dari Tabel 1 di atas, maka data dasar penghasilan anggota KPS dari areal PS **di Madiun** adalah **Rp1.120.489 x 15 % (Rp168.073)**, dan di akhir program menjadi **Rp1.288.299/KK/bulan**. Sedangkan pendapatan total anggota KPS (baik yang berasal dari PS dan non PS) di Kabupaten Madiun adalah **Rp24.036.451/KK/tahun** atau **Rp2.003.038/KK/bulan, secara per kapita Rp500.759/bulan**. Karena hasil survei menunjukkan bahwa rerata satu keluarga pada KPS di Madiun adalah 4 orang.

Dari data pendapatan di atas, disimpulkan bahwa pendapatan rumah tangga KPS di Kabupaten Madiun adalah 55,94%. Di Kabupaten Madiun, rata-rata penguasaan lahan per keluarga seluas 0.59 ha. Proporsi pendapatan dari areal PS yang lebih dominan di Kabupaten Madiun dapat dicapai karena pengelolaan areal PS dioptimalkan untuk penanaman *cash crops* dan *long term crops*. Perekonomian anggota KPS mengandalkan lahan, dan memiliki komoditas unggulan seperti porang yang menjadi terbaik di Indonesia, penjualan kopi hingga ke luar negeri dan terintegrasi dengan rencana

pembangunan daerah. Selain itu, terbatasnya lahan kelola di luar PS dan rendahnya anggota KPS yang memiliki pendapatan di luar PS.

Hasil survei di Madiun menunjukkan rata-rata pendapatan rumah tangga sebesar **Rp2.003.038/bulan atau Rp500.759 per kapita/bulan**. Pendapatan rata-rata anggota KPS di Madiun berdasarkan hasil survei berada sedikit di atas garis kemiskinan yaitu **Rp1.120.489/KK/tahun atau 476.506 per kapita/bulan**. Oleh karena itu, pendapatan anggota KPS di lokasi FP V di Madiun **tidak masuk kategori miskin**. Dapat disimpulkan bahwa dengan pemberian Persetujuan PS, maka anggota KPS di Madiun memberikan dampak positif terhadap pendapatan dan mengurangi kemiskinan ekstrem bahkan keluar dari kategori miskin. Sebelum adanya PS, petani-petani ini harus bagi hasil atau bayar sewa ke Perhutani. Data dasar ini didukung oleh data excel *by name by address*, karakteristik responden, pendapatan responden dari areal PS dan juga sumber pendapatan lain yang dari luar PS sebagai acuan dalam penilaian di akhir proyek.

Selain pendapatan di atas, anggota KPS di kedua Kabupaten Madiun masih mendapatkan berbagai manfaat lainnya yang belum dihitung secara rupiah seperti sumber mata air dan pemanfaatan kayu bakar. Ditambah dengan PS sebagai penyeimbang iklim mikro, penyedia sumber protein, dan tempat melanjutkan budaya bagi masyarakat adat.

PS juga memberikan nilai transaksi ekonomi yang tinggi. Nilai transaksi ekonomi KPS di Kabupaten Madiun sebesar **Rp839.903.700/KPS/tahun**. Nilai ini diperoleh dari hasil FGD yang diikuti oleh perwakilan dari 10 KPS di Madiun.

Untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga anggota KPS di Madiun diperlukan peningkatan kapasitas anggota KPS untuk pengolahan hasil hutan (kopi dan porang) pasca panen, membutuhkan dukungan perbaikan infrastruktur jalan untuk pengangkutan hasil produksi, alat pengolahan produksi, serta dukungan bibit berkualitas dan subsidi pupuk. Secara khusus pada kluster Utara (2) dan Tengah (3) membutuhkan bantuan pengairan seperti membuat sumur bor untuk penyiraman tanaman.

Para anggota KPS di kedua Kabupaten Madiun yang menjadi target FPV, merasa sangat senang dengan diberikan izin/persetujuan PS oleh pemerintah dan sangat bermanfaat bagi peningkatan pendapatan. Hal ini dikarenakan: adanya kepastian dalam pengelolaan hutan dan lahan, pengelolaan hutan dan lahan secara independen, menurunnya konflik pengelolaan hutan dan lahan dengan Perhutani, tidak adanya pungutan/bagi hasil, mendapatkan sumber-sumber pangan dan ekonomi rumah tangga, sumber pangan dan papan, serta mendapatkan asistensi dari pendamping mandatori dan mandiri.

EXECUTIVE SUMMARY

This study aims to develop a socio-economic baseline—particularly the baseline of household income—of Social Forestry Groups (Kelompok Perhutanan Sosial/KPS) in Madiun Regency, East Java Province. The objectives of this assessment are twofold. First, it seeks to describe the livelihood systems of Social Forestry (SF) beneficiary communities under Forest Programme V (FPV) and to analyze how household income is connected to FPV activities. Second, it aims to establish a socio-economic baseline at the community level that can be integrated into the Monitoring and Evaluation (M&E) framework of FPV.

The study/survey was conducted over a period of five weeks, starting from the second week of November until early December 2025. The study employed both secondary and primary data sources. Secondary data were gathered from institutional reports and publicly accessible information. Meanwhile, primary data were collected through five Focus Group Discussions (FGDs), in-depth interviews with 5 key informants, participatory observation, and the distribution of questionnaires to 102 respondents from 17 SF Groups using Google Forms, administered by SF facilitators acting as enumerators. The analysis of primary and secondary data was carried out using descriptive qualitative techniques complemented by simple quantitative analysis.

The findings of the survey present the structure of household income among KPS members in Madiun, distinguishing between income generated from SF areas and from non-SF sources. Income from SF comes from consumed commodities and marketed SF products. In general, commodities consumed directly by households include staple food crops, fruits, corn, and peanuts. Commodities sold to markets comprise food crops—such as rice, corn, cassava, and tubers—as well as fruits including banana, papaya, and peanuts, alongside perennial crops such as coffee and avocado. Other marketed products identified during the survey include rice, cassava, corn, spices, and porang. A consolidated summary of KPS members' incomes originating from SF and non-SF areas is presented below.

Table 1. Summary of the Household Income of SF Groups in Madiun Regency

No	Types of Income	Madiun Regency		
		Total (IDR)	HH Income/Year (IDR)	HH Income/Month (IDR)
1	Income from SF area	1,371,478,000	13,445,863	1.120.489
2	Income from non SF	1,080,240,000	10,590,588	882.549
Total SF income		2.451.718.000	24,036,451	2,003,038
Income per capita			6,009,113	500,759

*Based on the Table 1 (findings), the baseline of household income from SF area in Madiun is **1,120,489 /HH/month**. So that the increase in house hold income (15 %) in Madiun Regency from the SF area in the end of FPV program becomes **IDR.1.288.299/HH/month**. This baseline is supported by detailed data—including by-name, by-address records, respondent characteristics, income from PS areas, and additional income from non-PS sources—which will be used for mid-project assessment and for final project evaluation.*

*The average income of KPS members from combined income from SF and non SF sources—for KPS households is IDR 24,036,451/family / year, or **IDR 2,003,038/family/month** or **IDR 500,759/capita/month**.*

From these income figures, it can be concluded that household income derived from SF areas constitutes 55.94% of total income with the average landholding per household is 0.59 hectares. Based on this data, the majority of household income came from SF area. This is the results of the land management that has been optimized for cultivating both cash crops and long-term crops. The livelihoods of KPS members rely heavily on their land, and they have strong commodity advantages such as porang—which is among the best in Indonesia—and coffee, which is sold internationally. These economic activities are also integrated with the district's development plans. Besides, the ownership of land outside SF is limited and work of KPS member from outside SF areas is lower.

*The per capita income of KPS members in Madiun Regency is **IDR 500,759 per month, or IDR 2,003,038 per household per month**. This income is slightly above the poverty line, which is **IDR 1,906.024 per household per month or IDR 476,506 per capita per month**. In conclusion, SF licenses support community to exit from extreme poverty as the all income from SF are owned by community, they do not need to share their income to Perhutani.*

Apart from these income sources, KPS members in Madiun also gain various additional benefits that were not included in the income calculations, such as access to springs and the use of firewood. SF areas also provide water, a microclimate atmosphere, protein sources, and spaces for sustaining cultural practices, particularly among indigenous communities.

SF has given a big economic transaction value. The average economic transaction value of KPS activities in Madiun is IDR 8.399.037,000 per year per KPS. These economic transaction values were calculated using a sample of 10 KPS in Madiun.

In Madiun, efforts to increase the income of KPS members include capacity building for post-harvest processing of forest products (such as coffee and porang), improving road infrastructure for transporting produce, providing production-processing equipment, and ensuring access to quality seedlings and fertilizer subsidies. Specifically, the Northern SF area (Cluster 2) and Central SF area (Cluster 3) require support for water access, such as constructing bore wells for irrigation purposes.

KPS members in Madiun Regency targeted under FPV expressed strong appreciation for the granting of Social Forestry permits/approvals by the government. The reasons include: greater certainty in forest and land management, reduced conflicts with Perhutani, the absence of levies and profit-sharing obligations, access to food and household economic resources from PS areas, food source board sources, and ongoing facilitation support from mandatory and voluntary facilitators.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kuasa dan kehendak-Nya maka Laporan Penyusunan Data Dasar Sosial Ekonomi di Lokasi *Forest Programme V* di Kabupaten Madiun dapat diselesaikan dengan baik.

Survei/Penelitian ini dibuat dalam kerangka menjelaskan sistem mata pencaharian masyarakat PS penerima manfaat dari *Forest Programme V* di Kabupaten Madiun, serta menganalisis keterkaitan pendapatan masyarakat dengan kegiatan FPV. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi data dasar (*baseline*) sosial ekonomi di tingkat masyarakat penerima manfaat PS di lokasi Program V khususnya di Kabupaten Madiun, serta mengintegrasikannya dengan sistem monitoring evaluasi FPV

Selaku Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan RI sekaligus *Project Executing Agency Forest Programme V* kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung kegiatan ini. Secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada Tim Konsultan YKMI-FKKM yang telah dengan serius dan berkomitmen melakukan dan menyelesaikan pekerjaan ini.

Kami menyadari laporan ini belum sempurna dan belum dapat memenuhi harapan semua pihak yang terlibat, tetapi kami berharap laporan ini dapat bermanfaat dalam membangun database ekonomi sosial dalam sistem monitoring dan evaluasi *Forest Programme V*.

Jakarta, 11 Desember 2025.

Project Executing Agency
Forest Programme V

Julmansyah S.Hut., M.AP

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
<i>EXECUTIVE SUMMARY</i>	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Pengantar	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Keluaran.....	2
II. METODOLOGI	3
2.1. Metode Pengumpulan Data.....	3
2.1.1. Pengumpulan Data Sekunder.....	3
2.1.2. Pengumpulan Data Primer	3
2.2. Pembekalan Enumerator	6
2.3. Pelaksanaan Survei dan <i>entry</i> data.....	7
2.4. Metode Analisa Data:	7
III. HASIL PENELITIAN	8
3.1. Kondisi Umum Kabupaten Madiun	8
3.1.1. Gambaran Singkat Perkembangan Perhutanan Sosial	11
3.1.2. Hasil Survei Studi <i>Baseline</i> Sosio-Ekonomi Pendapatan Rumah Tangga Anggota KPS di Kabupaten Madiun.....	17
IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	45
4.1. Kesimpulan.....	45
4.2. Rekomendasi	46
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN	50
Lampiran 1 Panduan Wawancara (<i>interview</i> Guide).....	50
Lampiran 2 Daftar informan <i>in-depth interview</i> di Kabupaten Madiun	51
Lampiran 3 Absensi dan Daftar Peserta FGD Madiun	52
Lampiran 4 Panduan FGD	61
Lampiran 5 Instrumen Survei.....	63
Lampiran 6 Daftar responden di Kabupaten Madiun	72
Lampiran 7. Daftar enumerator Kabupaten Madiun.....	76
Lampiran 8 Dokumentasi Kegiatan.....	77
Lampiran 9. Data Survei Kabupaten Madiun	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ringkasan sumber pendapatan rumah tangga KPS di Kabupaten Madiun	i
Tabel 2. Jumlah sampling survei responden di Madiun	5
Tabel 3. Jumlah dan kepadatan penduduk per kecamatan di Kabupaten Madiun tahun 2022	9
Tabel 4. Data kemiskinan Kabupaten Madiun tahun 2020 - 2025.....	9
Tabel 5. PDRB ADHK 2010 Kabupaten Madiun menurut lapangan usaha tahun 2018 - 2022	10
Tabel 6. Pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha di Kabupaten Madiun tahun 2017 – 2022..	11
Tabel 7. Pertumbuhan dan rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun tahun 2018 - 2021	11
Tabel 8. Daftar KPS di Kabupaten Madiun.....	12
Tabel 9. Daftar KPS dampingan FPV di Kabupaten Madiun	14
Tabel 10. Pembagian tugas pengelolaan perhutanan sosial berdasarkan posisi dalam keluarga di Madiun.....	18
Tabel 11. Penguasaan lahan dalam areal Perhutanan Sosial oleh KPS di Madiun	19
Tabel 12. Persepsi tentang pendidikan anak di Madiun	20
Tabel 13. Ringkasan <i>baseline</i> data pendapatan rumah tangga KPS di Kabupaten Madiun	26
Tabel 14. Jenis dan jumlah konsumsi komoditas hasil PS di Kabupaten Madiun	27
Tabel 15. Pendapatan anggota KPS yang berasal dari komoditas PS yang dijual di Madiun	27
Tabel 16. Sumber pendapatan dan penghasilan anggota rumah tangga dari non-PS di Madiun.....	28
Tabel 17. Paska panen dan pemasaran produk PS di Kabupaten Madiun	29
Tabel 18. Hasil perhitungan nilai transaksi ekonomi KPS di Kabupaten Madiun	31
Tabel 19. Status IDM desa dengan produk unggulan KPS di Madiun	33
Tabel 20. KPS <i>role model</i> dan faktor-faktor yang mempengaruhi di Madiun.....	34
Tabel 21. Analisis SWOT KPS di Madiun.....	34
Tabel 22. Persepsi masyarakat terhadap Perhutanan Sosial berdasarkan tematik di Madiun	39
Tabel 23. Dukungan dan bantuan untuk Perhutanan Sosial di Kabupaten Madiun	41
Tabel 24. Masukan anggota KPS untuk peningkatan tata kelola dan manfaat PS berdasarkan tematik/isu di Madiun	42
Tabel 25. Ringkasan <i>baseline</i> data pendapatan rumah tangga petani KPS berdasarkan Kabupaten	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. FGD di Kecamatan Wonoasri 18 November 2025 dan FGD di Kecamatan Dagangan, 21 November 2025	5
Gambar 2. Peta sebaran areal PS dampingan FPV di Kabupaten Madiun.....	15
Gambar 3. Peta <i>integrated area development</i> Perhutanan Sosial Kabupaten Madiun	16
Gambar 4. Tanaman porang di Desa Sumberbendo, Kecamatan Saradan	16
Gambar 5. Komposisi responden berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Madiun	17
Gambar 6. Responden berdasarkan usia di Kabupaten Madiun	17
Gambar 7. Posisi responden dalam keluarga di Madiun	18
Gambar 8. Pengambil keputusan pengelolaan keuangan keluarga di Madiun	19
Gambar 9. Tingkat pendidikan responden di Madiun	20
Gambar 10. Jumlah dan penyebab anak-anak putus sekolah di keluarga responden Madiun.....	21
Gambar 11. Kondisi rumah responden di Madiun	21
Gambar 12. Kondisi rumah penduduk di Desa Sumberbendo, Kecamatan Saradan	22
Gambar 13. Status kepemilikan rumah responden di Madiun	22
Gambar 14. Sumber air bersih responden Madiun	22
Gambar 15. Rumah tangga responden yang memiliki sarana MCK di Madiun	23
Gambar 16. Sumber bahan bakar untuk memasak dan sumber bahan bakar di Madiun.....	23
Gambar 17. Kepemilikan televisi dan kulkas di Madiun.....	24
Gambar 18. Jumlah aset produktif responden di Madiun.....	24
Gambar 19. Kepemilikan keluarga responden atas aset produktif di Madiun	25
Gambar 20. Profesi dan sumber pendapatan anggota keluarga responden dari luar areal PS di Madiun	28
Gambar 21. Produk kopi olahan Ibu Purwati, anggota KUPS Selo Gedong (KUPS kopi di LD Wilis Sejahtera) yang telah diekspor ke Filipina dan Belanda.....	30
Gambar 22. Wawancara dengan Pak Rian Ketua LD Ngadirejo Sejahtera, 18 November 2025	38
Gambar 23. Bibit untuk rehabilitasi lahan bantuan dari BPDAS Berantas Sampean untuk KPS	39
Gambar 24. Penanaman padi gogo di Desa Sumberbendo, Kecamatan Saradan.....	39
Gambar 25. Plang informasi program FAPE di areal LD Sumberbendo Sumber Wono Mulyo	42
Gambar 26. Waduk di Wonoasri, dipergunakan masyarakat untuk mengairi sawah dan perkebunan, pada musim kering, masyarakat menanam padi di pinggir waduk	43
Gambar 27. Kondisi jalan untuk angkutan hasil pertanian di Kecamatan Pilangkenceng	44

I. PENDAHULUAN

1.1. Pengantar

Berdasarkan kebijakan nasional di sektor kehutanan yang menekankan penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan, PS menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam mendorong pemerataan akses, peningkatan kesejahteraan, serta penguatan ketahanan pangan, energi dan ekologi di Indonesia. PS sebagaimana diatur dalam Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam kawasan hutan negara, hutan hak, maupun hutan adat. Melalui lima skema PS Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan (KK). Pemerintah memberikan akses PS dan pengakuan legal kepada masyarakat untuk Hutan Adat, sehingga masyarakat mengelola sumber daya hutan secara inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial (Ditjen PS) terus memperkuat implementasi PS dengan dua fokus utama: percepatan pemberian akses dan peningkatan kualitas KPS pasca persetujuan/izin. Penguatan KPS dan pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) menjadi strategi kunci untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya melalui pengembangan komoditas unggulan seperti kopi, madu, damar, agroforestri, serta jasa lingkungan. Kualitas KUPS yang diklasifikasikan menjadi Biru, Perak, Emas, dan Platinum menjadi indikator kemajuan usaha, peningkatan kapasitas organisasi, serta kemampuan masyarakat dalam mengelola kawasan dan potensi hutan dalam meningkatkan pendapatan RT.

Sebagai upaya memperkuat capaian tersebut, Pemerintah Republik Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Federal Republik Jerman didukung oleh BMZ–KfW melaksanakan program peningkatan ekonomi masyarakat dan peningkatan tutupan hutan melalui FPV. Program ini bertujuan mengharmonisasikan pembangunan ekonomi dengan perlindungan iklim dan sumber daya alam melalui peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan yang berbasis sosial, ekologis, dan ekonomi. Dukungan FPV meliputi intervensi pada penanaman, perlindungan hutan, pengembangan agroforestri, serta penguatan kelembagaan dan usaha masyarakat melalui peningkatan nilai tambah komoditas dan penguatan rantai nilai.

Dalam kerangka Monitoring dan Evaluasi (M&E) FPV, penyusunan *Baseline* Sosial Ekonomi (*Baseline* Sosek) menjadi tahap penting untuk memahami kondisi awal kesejahteraan rumah tangga anggota KPS/KTH sebelum intervensi program dilaksanakan. *Baseline* ini digunakan sebagai dasar pembandingan untuk menilai efektivitas program, khususnya terkait perubahan pendapatan, struktur produksi, kapasitas kelembagaan, pemasaran, dan kontribusi ekonomi usaha PS melalui perhitungan Nilai Transaksi Ekonomi (NTE).

Berdasarkan data GoKUPS pada tanggal 30 Oktober 2025, pukul 14.05 WIB, Kabupaten Madiun memiliki 34 izin KPS yang terdiri dari 17 HD (50%) dan 17 KK (50%), dengan total 56 KUPS. Komposisinya menunjukkan 32 KUPS Biru (57%), 13 Perak (23%), dan 11 Emas (20%), namun belum terdapat KUPS kategori Platinum. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar usaha PS Madiun berada dalam tahapan pengembangan awal hingga menengah, sehingga masih membutuhkan pendampingan intensif baik pada aspek kelembagaan, pengembangan ekonomi (pengembangan produksi, akses pembiayaan, maupun pemasaran) dan aspek tata kelola kawasan. Dari 34 persetujuan PS di Madiun, 17 KPS dijadikan sampel sebagai data dasar pada studi ini karena merupakan dampingan langsung dari FPV.

Baseline ini diperlukan untuk mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi, kapasitas kelembagaan, peluang ekonomi, serta kendala KPS/KTH secara lebih mendalam meliputi aspek produksi, pemasaran, akses modal, serta potensi peningkatan NTE sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, kegiatan studi *baseline* sosial-ekonomi dilaksanakan, dengan responden sebanyak 102 orang yang tersebar di 17 KPS di Kabupaten Madiun (6 responden per KPS).

Hasil *baseline* ini diharapkan dapat memberikan gambaran faktual, terukur, dan komprehensif sebagai dasar perencanaan intervensi yang lebih tepat sasaran. Selain itu, *baseline* akan menjadi tolok ukur untuk analisis dampak program FPV pada tingkat rumah tangga dan kelembagaan PS, serta menjadi acuan dalam penguatan strategi peningkatan kondisi sosial-ekonomi masyarakat berbasis pengelolaan hutan lestari.

1.2. Tujuan

Pengumpulan data pendapatan rumah tangga anggota KPS diperlukan sebagai data dasar proyek dan menjadi bagian dari sistem M&E. Adapun tujuan dari kajian data pendapatan rumah tangga ini adalah:

- Menjelaskan sistem mata pencaharian pada masyarakat penerima manfaat FPV dan menganalisis keterkaitan pendapatan masyarakat dengan kegiatan FPV.
- Membangun data dasar (*baseline*) ekonomi sosial di tingkat masyarakat penerima manfaat dan mengintegrasikannya dengan sistem M&E FPV.

Hasil analisa kondisi sosial ekonomi dan mata pencaharian akan mendorong terbangunnya data dasar dan indikator di tingkat proyek yang dapat digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi kegiatan di tingkat masyarakat. Indikator sosial ekonomi mencakup populasi, karakteristik, sumber pendapatan, tingkat pendapatan, sistem mata pencaharian dalam rumah tangga, tingkat kemiskinan dan pendidikan, keterampilan dan akses kepada pelayanan dasar dan akses ke infrastruktur jalan dll.

1.3. Keluaran

Keluaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah:

- Data pendapatan rumah tangga dari anggota KPS sebagai dasar untuk monitoring dan evaluasi proyek
- Informasi tentang produk kayu dan non-kayu serta kegiatan usaha lain yang berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat
- Informasi tentang pelatihan yang dibutuhkan untuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial dan Kelompok Perhutanan Sosial

II. METODOLOGI

Hipotesis yang dibangun dalam program FPV adalah “Anggota KPS akan meningkat pendapatannya dari areal PS sebagai dampak intervensi dari proyek FPV” sebesar 15% pada akhir program. Untuk mengukur peningkatan tersebut diperlukan *baseline* pendapatan Anggota KPS saat ini, terutama yang berasal dari hasil hutan bukan kayu di areal PS. Anggota KPS diharapkan memperoleh pemasukan ekonomi dari kegiatan manajemen hutan yang tangguh terhadap cuaca (*climate resilient*). Proses penyusunan data dasar sosial ekonomi dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu: (1) Pengumpulan data dan informasi baik itu sekunder dan primer; (2) Analisis data dan informasi secara kualitatif dan kuantitatif sederhana; serta (3) Pembuatan laporan dan rekomendasi. Metode analisis kualitatif dilakukan untuk mengkategorisasi data-data yang bersumber dari wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus/*focus group discussion* (FGD), dan observasi. Sementara metode kuantitatif sederhana digunakan untuk menganalisis data-data hasil kuesioner.

2.1. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan adalah berupa data sekunder dan data primer. Data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan semua data dari laporan, publikasi, buku, dan sumber lainnya yang didapatkan dari pengumpulan data ke kantor dan instansi terkait dan dari internet. Sedangkan data primer didapatkan dengan melakukan *interview* mendalam, FGD, observasi lapangan partisipatif dan penyebaran kuesioner.

2.1.1. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder meliputi data sosial, ekonomi, dan demografi desa, peta lokasi KPS, serta dokumen terkait PS dari Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun, Balai PS Yogyakarta, serta instansi terkait. Selain itu, data dan profil KPS, profil desa yang ada KPS nya, laporan perkembangan desa dan penggunaan dana desa, informasi dan berita terkait perhutanan sosial, laporan FPV, peta dan rencana kerja KPS yang ada di Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur.

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelusuran di internet dan meminta langsung dokumen, laporan, publikasi dan peta yang relevan kepada para pihak mulai dari: Kelompok Perhutanan Sosial, Kepala Desa, Pemerintah Daerah, FPV, Balai Perhutanan Sosial Yogyakarta, Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun, serta lembaga/institusi lain yang relevan. Pengumpulan data sekunder dilakukan pada awal November hingga Awal Desember 2025.

2.1.2. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan melalui 4 cara: wawancara mendalam, FGD, observasi dan penyebaran kuesioner.

A. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara (lampiran 1). Wawancara mendalam dilakukan pada 5 informan kunci (4 laki-laki dan 1 perempuan) yang merupakan perwakilan KPS dan KUPS (daftar informan dapat dilihat pada lampiran 2). Wawancara dilakukan bersamaan dengan kegiatan FGD. Informan ini terdiri dari dua orang ketua KPS, satu orang Sekretaris KPS, satu orang sekretaris KUPS yang juga perwakilan perempuan, dan satu orang anggota KPS yang juga perwakilan pemuda.

Wawancara mendalam pertama dilakukan dengan dengan Rian yang merupakan Ketua LD Ngadirejo Sejahtera. Wawancara ini dilaksanakan pada tanggal 18 November 2025. Wawancara kedua dilakukan dengan informan bernama Sutrisno yang merupakan Sekretaris LD Wono Mulyo, dilaksanakan pada tanggal 19 November 2025. Wawancara ketiga dilakukan pada tanggal 20 November 2025 dengan informan atas nama Salam, Ketua LD Sumberbendo Sumber Wono Mulyo. Wawancara keempat dilakukan pada tanggal 21 November 2025 dengan anggota pemuda dari LD Nglengko

Makmur Sejahtera bernama Parminto. Wawancara terakhir dilakukan pada 23 November 2025 dengan Purwati, Sekretaris KUPS kopi di LD Wilis Sejahtera.

B. Focus Group Discussion (FGD)

Focus Group Discussion adalah metode pengumpulan data secara kualitatif dengan mengumpulkan 7-15 informan dari anggota KPS dan dengan tema tertentu untuk menggali informasi yang dibutuhkan. FGD ini dilakukan Tim Konsultan YKMI-FKKM bersama penyuluh PS dengan beberapa anggota KPS. FGD dilakukan sebanyak 5 kali dengan jumlah peserta sebanyak 67 orang, terdiri dari 58 laki-laki dan 9 perempuan. Lokasi pelaksanaan FGD ini berada di Kecamatan Wonoasri, Pilangkenceng, Saradan, Dagangan, dan Kare. Peserta FGD yang hadir di Kabupaten Madiun merupakan representasi anggota, pengurus, dan perempuan serta pemuda dari KPS di masing-masing kecamatan lokasi FGD. Hanya FGD di Kecamatan Saradan yang pesertanya berasal dari satu KPS, yaitu LD Sumberbendo Sumber Wono Mulyo.

Rincian pelaksanaan FGD di Kabupaten Madiun sebagai berikut:

1. FGD di Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, dilakukan di sekitar garapan masyarakat di Desa Sidomulyo. Peserta FGD sebanyak 17 orang, yang terdiri dari perwakilan LD Ngadirejo Sejahtera, LD Jati Mulyo, dan LD Wonorejo Asri. Jumlah peserta laki-laki sebanyak 15 orang dan perempuan sebanyak 2 orang. FGD juga dihadiri satu orang penyuluh PS dari Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah Madiun. FGD dilakukan pada Selasa, 18 November 2025.
2. FGD di Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, dilakukan di rumah salah satu warga di Desa Luworo. Peserta FGD sebanyak 13 orang, terdiri dari perwakilan LD Wono Lestari dan LD Wono Mulyo. Jumlah peserta laki-laki sebanyak 11 orang dan perempuan sebanyak 2 orang. FGD juga dihadiri satu orang penyuluh PS dari CDK Wilayah Madiun. FGD dilakukan pada Rabu, 19 November 2025.
3. FGD di Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, dilakukan di areal PS garapan masyarakat Desa Sumberbendo. Peserta FGD sebanyak 6 orang yang seluruhnya merupakan perwakilan LD Sumberbendo Sumber Wono Mulyo. Jumlah peserta laki-laki sebanyak 5 orang dan perempuan sebanyak 1 orang. Satu orang penyuluh PS dari CDK Wilayah Madiun juga hadir di kegiatan FGD. FGD dilakukan pada Kamis, 20 November 2025.
4. FGD di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, dilakukan di rumah salah satu warga di Desa Padas. Peserta FGD sebanyak 19 orang, terdiri dari perwakilan LD Sumber Wilis, LD Wonorejo, LD Wono Panguripan, dan LD Nglengko Makmur Sejahtera. Jumlah peserta laki-laki sebanyak 17 orang dan perempuan sebanyak 2 orang. FGD ini dihadiri oleh dua orang penyuluh PS dari CDK Wilayah madiun. FGD dilakukan pada Jumat, 21 November 2025.
5. FGD di Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, dilakukan di sekretariat LD Wilis Sejahtera Desa Bodag. Peserta FGD sebanyak 12 orang, terdiri dari perwakilan LD Wilis Sejahtera, LD Tani Subur, dan LD Kare Makmur. Jumlah peserta laki-laki sebanyak 10 orang dan perempuan sebanyak 2 orang. Turut hadir juga satu orang penyuluh dari CDK Wilayah Madiun. FGD dilakukan pada Minggu, 23 November 2025.



Gambar 1. FGD di Kecamatan Wonoasri 18 November 2025 dan FGD di Kecamatan Dagangan, 21 November 2025

C. Observasi Lapangan

Observasi lapangan dilakukan saat kunjungan ke lokasi setelah melakukan FGD dan wawancara. Aspek yang diamati dalam observasi lapangan meliputi tata kelola kelembagaan PS, tata kelola hutan dan manajemen areal PS, tata kelola usaha dan KUPS, komoditas unggulan dan peluang peningkatan pendapatan, serta keterampilan dan kondisi masyarakatnya. Observasi dilakukan di beberapa lokasi meliputi LD Ngadirejo Sejahtera di Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri, LD Wono Mulyo di Desa Luworo Kecamatan Pilangkenceng, LD Sumberbendo Sumber Wono Mulyo di Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan. LD Nglengko Makmur Sejahtera Kecamatan Dagangan, dan LD Wilis Sejahtera Kecamatan Kare.

D. Penyebaran Kuesioner

Penyebaran kuesioner dilakukan kepada 102 responden/rumah tangga dengan kriteria: (1) anggota KPS yang aktif mengelola garapannya, (2) Anggota KPS dan KUPS yang telah memiliki produk dan hasil dari usaha PS. Selain itu, (3) pertimbangan keseimbangan komposisi responden di antara pengurus dan anggota, serta perempuan. 102 responden ini tersebar dari 17 KPS yang berada di Kabupaten Madiun (6 responden per KPS). Kuesioner survei yang digunakan dalam survei rumah tangga ini dapat dilihat pada Lampiran 5 dan daftar responden survei dapat dilihat pada Lampiran 6.

E. Metode Sampling

Metode sampling adalah *purposive* (memiliki tujuan tertentu). Tujuan yang dimaksud adalah ditujukan untuk anggota KPS yang aktif, telah berproduksi dan komposisi responden. Tabel 2 di bawah menunjukkan ringkasan jumlah sampel di Kabupaten Madiun.

Tabel 2. Jumlah sampling survei responden di Madiun

Kabupaten	Jumlah KPS (unit)	Jumlah Pendamping	Jumlah sampling (responden)	Keterangan
Madiun	17	7	102	1 KPS dipilih 6 Anggota KPS sebagai responden

Catatan : Responden terpilih mewakili anggota KPS yang ada di Madiun

F. Parameter Utama yang Diukur di dalam Survei

- Keluarga:
 - Identitas responden
 - Jumlah anggota keluarga
 - Jenis mata pencaharian
- Pendidikan
 - Mengalami pendidikan sekolah
 - Alasan untuk tidak memasuki atau putus sekolah

- Struktur dasar rumah tangga
 - Tipe rumah
 - Aset produktif
 - Akses ke listrik
 - Akses ke air
 - Akses ke sanitasi
 - Akses ke gas untuk memasak
- Pemasaran komoditas pertanian
 - Komoditas utama
 - Penanganan paska panen
 - Potensi pasar
 - Tantangan dalam pemasaran
 - Pendapatan rumah tangga
 - Pendapatan rumah tangga akan diukur dari bentuk barang dan uang tunai. Ruang lingkup Hasil Hutan Bukan Kayu akan mengikuti Peraturan Menteri KLHK No. 35/2007, yang mencakup semua hasil hutan yang bersifat hayati, non-hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan
- Bentuk Natura (in kind)
 - Multi Purpose Tree Species
 - *Non-timber forest product*
 - Sumber pendapatan lain.
- Bentuk materi (cash)
 - Multi Purpose Tree Species
 - *Non-timber forest product*
 - Sumber pendapatan lain
- Keterampilan dan pengetahuan
 - Pengetahuan dan Keterampilan yang dimiliki
 - Jenis pelatihan yang pernah diikuti
 - Usulan kebutuhan pelatihan yang diinginkan

2.2. Pembekalan Enumerator

Enumerator adalah individu dalam hal ini penyuluh PS CDK Kabupaten Madiun, Jawa Timur yang dilatih khusus untuk mengumpulkan data melalui survei melalui penyebaran kuesioner. Pembekalan enumerator dilakukan sebanyak satu kali di Kabupaten Madiun dengan melibatkan 7 orang penyuluh PS, juga melibatkan Kepala CDK dan perwakilan FPV. Pembekalan enumerator di Kabupaten. Pembekalan enumerator dilakukan di ruang rapat CDK Wilayah Madiun pada 17 November 2025 (absensi enumerator dapat dilihat pada Lampiran 7).

Pembekalan enumerator dilakukan dengan memberikan penjelasan tentang kuesioner yang akan dipergunakan dalam pengambilan data serta pengisian Google Forms. Selain itu, enumerator juga melakukan praktik pengisian kuesioner dengan menghadirkan 18 perwakilan anggota KPS di Kecamatan Wonoasri. Dalam pembekalan enumerator penggunaan bahasa lokal sangat penting dilakukan. Tahapan uji coba ini penting bagi enumerator untuk menentukan strategi pengumpulan data yang cepat untuk dilakukan di wilayah dilingkungannya masing-masing serta mengidentifikasi pertanyaan yang perlu ditambahkan ataupun yang tidak relevan untuk ditanyakan di dalam kuesioner. (daftar nama enumerator dapat dilihat pada Lampiran 4).

2.3. Pelaksanaan Survei dan *entry* data

Pelaksanaan survei dilakukan dari tanggal 17 November hingga tanggal 2 Desember 2025. Data Kuesioner kemudian di-*entry* ke dalam format excel oleh Tenaga Ahli YKMI dan selesai pada pekan pertama bulan Desember.

2.4. Metode Analisa Data:

Analisa data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif sederhana. Data sekunder dianalisis melalui *desk review*. Sementara data hasil FGD, *interview* dan observasi dilakukan secara kualitatif deskriptif dan analisis konten. Selain itu dilakukan juga triangulasi data untuk melihat konsistensi data.

Data-data yang diambil dengan menggunakan kuesioner dimasukkan dalam Google Forms, kemudian ditabulasi serta dianalisis secara kuantitatif. Hasil kuesioner dianalisis secara kuantitatif sederhana. Data tabulasi tersebut menyangkut profil keluarga, struktur dan kepemilikan rumah tangga, pemilahan pendapatan rumah tangga dari areal perhutanan sosial dan yang bukan dari areal PS, biaya memproduksi komoditas yang dijual, jenis keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki dan yang sebaiknya dimiliki. Kesimpulan data kuantifikasi tersebut dilaporkan secara grafik maupun tabel dengan kategori per komoditas ataupun per KPS.

Analisa gender dilakukan pada khususnya untuk perempuan dan anggota rumah tangga dalam sistem pertanian agroforestri. Data dan informasi terkait persepsi, jenis pelatihan yang dibutuhkan dan aspek *gender* dianalisis secara kualitatif untuk memberikan rekomendasi ke FPV dan mengetahui apakah dengan adanya KPS, pekerjaan perempuan semakin ringan dan juga keterlibatan perempuan semakin tinggi atau sebaliknya.

Hasil analisis deskriptif kemudian diintegrasikan dengan hasil kuantitatif sehingga memperkuat kesimpulan terhadap *baseline* data ekonomi rumah tangga KPS di Kabupaten Madiun. Hasil kedua analisis tersebut disintesiskan dan disimpulkan menjadi data *baseline* pendapatan anggota KPS rerata tersebut untuk kemudian dijadikan dasar dalam proses monitoring dan evaluasi ke depan.

Adapun cara mendapatkan angka Pendapatan Rumah Tangga KPS yang berasal dari area PS adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan dari komoditas yang dikonsumsi sendiri yaitu menghitung jenis komoditas yang dikonsumsi oleh responden per tahun dikali dengan harga rata-rata komoditas tersebut di dusun atau desa. Atau dengan kata lain menghitung total jumlah komoditas yang dikonsumsi sendiri per tahun dikali harga rata-rata komoditas di lokasi.
2. Pendapatan dari komoditas yang dijual yaitu dengan cara menghitung penerimaan (jumlah kuantitas panen setahun oleh responden dari masing-masing jenis komoditas yang dijual di kali dengan harga masing-masing komoditas yang dijual dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan. Singkatnya Pendapatan adalah penerimaan hasil penjualan dikurangi (-) dengan biaya produksi. Biaya yang dimaksud adalah biaya pembelian bibit, perawatan dan biaya transportasi penjualan komoditas/produk PS. Namun untuk biaya tenaga kerja petani KPS belum dihitung.

Dengan demikian pendapatan dari komoditas yang dijual adalah pendapatan bersih yang sudah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan petani untuk menghasilkan produk tersebut di luar biaya tenaga kerja anggota KPS.

III. HASIL PENELITIAN

3.1. Kondisi Umum Kabupaten Madiun

Secara geografis Kabupaten Madiun terletak 1110 25' 34" - 1110 51' Bujur Timur dan 70 12' - 70 48'30" Lintang Selatan dengan total luas sekitar 1.113,63 Km², dengan batas-batas administratif sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Bojonegoro

Sebelah Timur : Kabupaten Nganjuk

Sebelah Selatan : Kabupaten Ponorogo

Sebelah Barat : Kabupaten Magetan dan Ngawi

Kabupaten Madiun terdiri dari 206 desa/kelurahan (198 desa dan 8 kelurahan) yang tersebar di 15 kecamatan. Secara topografi, kelerengan Kabupaten Madiun beragam, mulai dari kelerengan 0,8% hingga lebih dari 45%. Sebagian besar kecamatan di Kabupaten Madiun berada di kelerengan 0 - 8%, terkecuali beberapa kecamatan yang berada pada ketinggian 1.000 - 2.000 meter di atas permukaan laut, berada di bagian selatan berdekatan dengan Pegunungan Wilis dengan kelerengan di atas 25%, yaitu Kecamatan Dolopo, Dagangan, Kare, Wungu, Gemarang, Mejayan, dan Wonoasri.

Terdapat 41 sungai dengan debit aliran sungai dan manfaat irigasi dari masing-masing sungai tersebut, pola aliran sungai bersifat radial yang merupakan ciri khas sungai yang mengalir di daerah gunung berapi. Sebagian besar merupakan sungai musiman yaitu meresapkan air hujan ke dalam tanah (sungai *influen*).

Di Kabupaten Madiun kawasan budidaya terdiri dari hutan produksi, hutan rakyat, dan kawasan pertanian. Kawasan hutan produksi merupakan kawasan yang dibudidayakan untuk tujuan diambil hasilnya, baik hasil hutan kayu maupun non-kayu. Luas kawasan hutan produksi di Kabupaten Madiun mencapai 40% dari luas total wilayah, atau sekitar 40.631 hektare, yang tersebar di Kecamatan Dolopo, Dagangan, Wungu, Kare, Gemarang, Saradan, Pilangkenceng, Mejayan, Wonoasri, dan Madiun.

Untuk hutan rakyat luasnya mencapai 5.821 hektare atau 5% dari luas total luas Kabupaten Madiun, tersebar di Kecamatan Dolopo, Dagangan, Wungu, Kare, Gemarang, Saradan, Pilangkenceng, Mejayan, dan Wonoasri.

Pemerintah Kabupaten Madiun menetapkan sekitar 21.587,4 hektare sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tersebar di 15 kecamatan. Kawasan pertanian terdiri dari persawahan dan pertanian lahan kering. Untuk persawahan dapat ditanami padi sepanjang tahun karena kecukupan air, baik dari irigasi teknis maupun irigasi sederhana, sedangkan pertanian lahan kering lebih beragam, yaitu saat musim hujan ditanami padi dan saat kemarau ditanami jagung, tembakau, dan palawija, seperti kacang hijau, kedelai, kacang tanah, dan ubi kayu.

Kabupaten Madiun juga menetapkan kawasan lindung seluas 4.938,7 hektare yang terdapat di bagian selatan dan bagian utara. Kawasan lindung ini mempunyai nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, yang terdiri dari kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya, kawasan Rawan Bencana, Kawasan Lindung Geologi, serta Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Madiun juga membangun tata kawasan sebagai penyedia jasa ekosistem, yaitu kawasan untuk jasa ekosistem penyedia pangan, penyedia jasa ekosistem air bersih, dan penyedia jasa ekosistem pengaturan iklim. Jasa ekosistem ini sangat penting, dan sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan hidup, berfungsi untuk menjaga ekosistem tetap lestari.

Penduduk Kabupaten Madiun pada tahun 2022 berjumlah 755.733 jiwa dengan komposisi laki-laki 374.752 jiwa dan perempuan 380.981 jiwa. Kepadatan penduduk 748 jiwa/km², dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 3. Jumlah dan kepadatan penduduk per kecamatan di Kabupaten Madiun tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK			LUAS WILAYAH	KEPADATAN PENDUDUK (Km2)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		
1	Kebonsari	29.688	30.949	60.637	47,45	1.278
2	Dolopo	30.558	31.317	61.875	48,85	1.267
3	Geger	32.853	33.669	66.522	36,61	1.817
4	Dagangan	27.057	27.088	54.145	72,36	748
5	Kare	17.328	17.404	34.732	190,85	182
6	Gemarang	18.158	17.846	36.004	101,97	353
7	Wungu	29.401	30.103	59.504	45,54	1.307
8	Madiun	19.136	20.044	39.180	35,93	1.090
9	Jiwan	28.942	29.703	58.645	33,76	1.737
10	Balerejo	22.359	22.983	45.342	51,98	872
11	Mejayan	23.815	23.898	47.713	55,22	864
12	Saradan	36.643	36.492	73.135	152,92	478
13	Pilangkenceng	27.942	28.223	56.165	81,34	690
14	Sawahan	12.756	13.123	25.879	22,15	1.168
15	Wonoasri	18.116	18.139	36.255	33,93	1.068
	JUMLAH	374.752	380.981	755.733	1.010,86	748

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Madiun, sejak tahun 2020 memiliki tren penurunan yang konsisten. Pada tahun 2020 terdapat setidaknya 78,3 ribu penduduk miskin di Kabupaten Madiun dan jumlahnya menurun setiap tahunnya sampai pada tahun 2025 terdapat 71,59 ribu penduduk miskin di Kabupaten Madiun. Tren penurunan yang sama juga terlihat pada data persentase penduduk miskin yang menurun dari 11,46% di tahun 2020 menjadi 10,4% di tahun 2025. Garis kemiskinan di Kabupaten Madiun juga setiap tahunnya dinaikkan menyesuaikan dengan inflasi harga barang-barang kebutuhan dasar. Pada tahun 2020 garis kemiskinan Kabupaten Madiun adalah penduduk dengan pendapatan sebesar Rp 364.638 per bulan, kemudian naik pada tahun 2025 dengan pendapatan sebesar Rp 476.506.

Tabel 4. Data kemiskinan Kabupaten Madiun tahun 2020 - 2025

Indikator Kemiskinan Kabupaten Madiun	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase penduduk miskin (%)	11,46	11,91	10,79	11,04	10,63	10,4
Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)	78,3	81,61	74,07	75,87	-	71,59
Garis kemiskinan (Rp/bulan)	364.638	380.287	405.127	437.296	-	476.506

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Madiun (2025)¹

Data garis kemiskinan di atas akan dibandingkan dengan pendapatan bersih dari Perhutanan Sosial di Kabupaten Madiun. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah pendapatan dari areal PS bisa berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan di Kabupaten Madiun atau tidak.

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Madiun terbesar disumbang oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, di mana pada tahun 2022 menyumbang Rp3.441.314,600. Berikutnya disumbang oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor sebesar

¹ Data dapat diakses melalui menu tabel dinamis di situs web BPS Kabupaten Madiun di tautan <https://madiunkab.bps.go.id/id/query-builder>

Rp2.426.476,800, setelah itu Industri Pengolahan sebesar Rp1.977.630,300. Berikut tabel PDRB Kabupaten Madiun dari tahun 2018 sampai 2022:

Tabel 5. PDRB ADHK 2010 Kabupaten Madiun menurut lapangan usaha tahun 2018 - 2022

KATAGORI	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	3.413.896,410	3.489.565,930	3.529.158,620	3.586.512,700	3.441.314,600
B	Pertambangan & Penggalan	124.515,210	125.121,780	117.176,830	117.136,20	119.308,200
C	Industri Pengolahan	1.351.346,640	1.448.367,990	1.427.885,130	1.534.977,400	1.977.630,300
D	Pengadaan Listrik & Gas	12.583,600	13.433,870	13.233,190	13.851,000	14.757,900
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	21.431,830	23.003,200	23.810,510	25.666,400	27.520,300
F	Konstruksi	1.535.716,030	1.626.630,42	1.526.666,400	1.538.194,100	1.655.748,600
G	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	2.129.366,300	2.304.013,040	2.171.576,890	2.294.309,50	2.426.476,800
H	Transportasi & Pergudangan	211.184,470	230.613,880	218.561,230	239.164,100	279.576,100
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	313.605,270	336.092,190	309.100,680	327.316,800	360.098,300
J	Informasi & Komunikasi	1.040.985,960	1.115.302,780	1.196.824,220	1.261.805,900	1.321.222,900
K	Jasa Keuangan & Asuransi	370.963,050	384.197,380	380.010,980	383.465,400	401.247,900
L	Real Estate	232.646,680	246.753,620	255.848,000	262.860,200	277.339,000
M-N	Jasa Perusahaan	43.638,200	46.526,910	43.092,760	43.674,700	45.300,500
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, & Jasa Sosial Wajib	682.624,460	708.587,050	692.971,990	705.029,700	704.236.100
P	Jasa Pendidikan	560.188,960	594.679,300	603.620,360	606.662,600	628.972,100
Q	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	112.549,190	120.729,960	131.928,770	124.321,900	128.705,400
R-S-T-U	Jasa Lainnya	327.765,430	348.220,940	298.117,320	307.381,400	360.167,700
PRODUK DOMESTIK REGIONNAL BRUTO		12.485.007,710	13.161.840,220	12.939.583,860	13.372.329,800	14.169.622,600

Secara umum, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun mengalami fluktuatif, sebagai contoh pada tahun 2019 ekonomi mengalami pertumbuhan sebesar 5,42, sementara pada tahun 2018 hanya sebesar 5,1. Kontraksi pertumbuhan ekonomi terjadi pada tahun 2019 sebagai dampak covid-19, namun kembali tumbuh tahun 2021 menjadi 3,34 dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 4,58. Uraianya dalam Tabel 6 berikut:

Tabel 6. Pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha di Kabupaten Madiun tahun 2017 – 2022

KATAGORI	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	1,13	-2,26	2,22	1,13	1,63	-4.05
B	Pertambangan & Penggalian	5,35	2,49	0,49	-6,35	-0,03	1.85
C	Industri Pengolahan	8,13	9,76	7,18	-1,41	7,5	13.3
D	Pengadaan Listrik & Gas	4,1	9,46	6,76	-1,49	4,67	6.55
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	5,86	5,66	7,33	3,51	7,79	7.22
F	Konstruksi	10,19	9,96	5,92	-6,15	0,76	7.64
G	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	7,29	8,48	8,2	-5,75	5,65	5.76
H	Transportasi & Pergudangan	7,64	8,63	9,2	-5,23	9,43	16.90
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	8,76	8,52	7,17	-8,03	5,89	10.02
J	Informasi & Komunikasi	7,31	8,01	7,14	7,31	5,43	4.71
K	Jasa Keuangan & Asuransi	7	8,43	3,57	-1,09	0,91	4.64
L	Real Estate	7,21	7,59	6,06	3,69	2,74	5.51
M-N	Jasa Perusahaan	5,76	7,76	6,62	-7,38	1,35	3.72
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, & Jasa Sosial Wajib	2,23	2,04	3,8	-2,2	1,74	-0.11
P	Jasa Pendidikan	6,04	6,54	6,16	1,5	0,5	3.68
Q	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	5,33	7,81	7,27	9,28	-5,77	3.53
R-S-T-U	Jasa Lainnya	6,05	10,16	6,24	-14,39	3,11	17.17
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,42	5,1	5,42	-1,69	3,34	4.32

Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Madiun pada tahun 2017 sebesar Rp241,94 miliar, kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan -9,47% menjadi Rp219,04 miliar. Pada tahun 2019 nilainya mengalami peningkatan sebesar 4,64% menjadi Rp229,20 miliar. Setelah itu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, yaitu tahun 2020 menjadi Rp258,21 miliar dan tahun 2021 menjadi Rp333.15 miliar. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa PAD Kabupaten Madiun memiliki tren positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,21%. Tabel 7 berikut menunjukkan pertumbuhan dan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Madiun:

Tabel 7. Pertumbuhan dan rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun tahun 2018 - 2021

NO	URAIAN	PERTUMBUHAN				RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2018	2019	2020	2021	
1	PENDAPATAN	4,07%	6,42%	-5,37%	7,38%	3,13%
1.1	Pendapatan Asli Daerah	-9,47%	4,64%	12,65%	29,02%	9,21%
1.2	Pendapatan Transfer	2,80%	6,69%	-8,48%	5,88%	1,72%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	3,40%	5,30%	-7,53%	4,04%	1,30%
1.2.2	Transfer Antar Daerah	-3,93%	23,63%	-18,37%	27,60%	7,23%
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	.487,06%	5,89%	12,06%	-42,69%	365,58%

3.1.1. Gambaran Singkat Perkembangan Perhutanan Sosial

Total luas Kabupaten Madiun adalah 101.086 hektare, sekitar 44.932 hektare atau 44,44%, yang terdiri dari Kawasan Hutan Lindung 5.314 hektare (11,62%) tersebar di Kecamatan Kare, Gemarang,

Dagangan, dan Saradan. Kemudian sekitar 88,38% merupakan Hutan Produksi meliputi Kecamatan Pilangkenceng, Gemarang, Wungu, Mejayan, Dolopo, dan Wonoasri. Selain Hutan Lindung dan Hutan Produksi, di Kabupaten Madiun terdapat juga area Hutan Rakyat (di APL) seluas 13.753 hektare yang berada di Kecamatan Kare, Gemarang, dan Saradan. Di sisi lain, Kabupaten Madiun mempunyai lahan sangat kritis dan kritis seluas sekitar 6,130 hektare yang meliputi Kecamatan Wonoasri, Pilangkenceng, Dagangan, Kare, Gemarang, dan Saradan.

Dari sisi sejarah kebijakan dan pengelolaan, seluruh kawasan hutan di Kabupaten Madiun dikelola oleh Perhutani, sampai pada tahun 2023 sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan diluncurkan Permen LHK Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus atau dikenal dengan KHDPK. Kebijakan ini mengalihkan sekitar 1,1 juta hektare kawasan hutan di Jawa yang sebelumnya dikelola oleh Perhutani untuk dikelola oleh masyarakat. Khusus untuk Kabupaten Madiun luas KHDPK adalah 15.680 hektare.

Di Kabupaten Madiun terdapat 33 Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) yang tersebar di 24 desa dan 8 kecamatan. Dari 33 KPS tersebut terdiri dari 16 skema Kemitraan Kehutanan dengan legalitas Kulin KK (Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan) dan 17 skema Hutan Desa. Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan areal PS sebesar 7.029 kepala keluarga (KK) dengan luas lahan kelola sekitar 11.014,95 hektare. Tabel 8 berisi daftar KPS di Kabupaten Madiun:

Tabel 8. Daftar KPS di Kabupaten Madiun

No.	Nama KPS	Alamat	Skema	Luas (ha)	JLH KK
1	LMPSDH Ngudi Waluyo	Desa Wungu, Kec. Wungu	KulinKK	1.364,7	344
2	LMPSDH Wonosero	Desa Nglanduk, Kec. Wungu	KulinKK	264,7	185
3	LMPSDH Rizqi Abadi	Desa, Kradinan, Kec. Dolopo	KulinKK	520,5	56
4	LMDH Wono Karyo	Desa Gemarang, Kec. Gemarang	KulinKK	505,5	250
5	Lembaga Kelestarian Hutan Baru	Desa Tawangerjo, Kec. Gemarang	KulinKK	540,3	270
6	LMDH Padang Wilis	Desa Durenan, Kec. Gemarang	KulinKK	149	240
7	LMDH Kedung Mulyo	Desa Sebayi, Kec. Gemarang	KulinKK	591,9	325
8	LMDH Jati Kuning	Desa Nampu, Kec. Gemarang	KulinKK	532,7	266
9	LMDH Jati Makmur	Desa Winong, Kec. Gemarang	KulinKK	598,2	263
10	LMDH Rimba Sejahtera	Desa Kenongorejo, Kec. Pilangkenceng	KulinKK	1.097,65	802
11	KTH Sae Manunggal	Desa Gandul, Kec. Pilangkenceng	KulinKK	332,6	617
12	LMDH Wono Lestari	Desa Bulu, Kec. Pilangkenceng	KulinKK	740,4	369
13	LMDH Wono Sidodadi	Desa Luworo, Kec. Pilangkenceng	KulinKK	787	625

No.	Nama KPS	Alamat	Skema	Luas (ha)	JLH KK
14	LMDH Wono Bangun	Desa Dawuhan, Kec. Pilangkenceng	KulinKK	131,5	195
15	LMDH Rimba Karya	Desa Duren, Kec. Pilangkenceng	KulinKK	305,5	151
16	KMTH Jati Makmur	Desa Ngengor, Kec. Pilangkenceng	KulinkK	126	300
17	LD Wono Lestari	Desa Bulu, Kec. Pilangkenceng	HD	89	61
18	LD Wono Mulyo	Desa Luworo Kec. Pilangkenceng	HD	97	106
19	Lembaga Desa (LD) Jati Mulyo	Desa Sidomulyo Kec, Wonoasri	HD	240	65
20	LD Wonorejo Asri	Desa Plumung Rejo Kec. Wonoasri	HD	157	174
21	LD Ngadirejo Sejahtera	Desa Ngadirejo Kec. Wonoasri	HD	55	72
22	LD Sumberbendo Sumber Wono Mulyo	Desa Sumber Bendo Kec. Saradan	HD	209	186
23	LD Bandungan Wono Jati Mulyo	Desa Bandungan Kec. Saradan	HD	97	108
24	LD Tulung Wono Makmur	Desa Tulung Kec. Saradan	HD	92	97
25	LPHD Jati Mulyo Pinunjul	Desa Klumutan Kec. Saradan	HD	71	190
26	LD Tani Mulyo	Desa Kebon Agung Kec. Mejayan	HD	82	65
27	LD Tani Subur	Desa Kepel Kec. Kare	HD	417	105
28	LD Wilis Sejahtera	Desa Bodag Kec. Kare	HD	144	100
29	LD Kare Makmur	Desa Kare Kec. Kare	HD	6	32
30	LD Wonorejo II	Desa Segulung Kec. Dagangan	HD	269	139
31	LD Wonopanguripan	Desa Mendak Kec. Dagangan	HD	200	102
32	LD Nglengko Makmur Sejahtera	Desa Ngranget Kec. Dagangan	HD	146	71
33	LD Sumber Wilis	Desa Padas Kec. Dagangan	HD	120	98
Total				11.014,95	7,029

Sumber: Master Plan Pengembangan Kawasan Terpadu (Integrated Area Development) Berbasis Perhutanan Sosial Kabupaten Madiun – Provinsi Jawa Timur, 2025

Untuk KPS di Kabupaten Madiun yang didukung oleh FPV adalah 17 Hutan Desa, yang dibagi menjadi 3 (tiga) klaster, dikelompokkan berdasarkan geografi dan komoditi di areal Hutan Desa dan

KPS. Klaster 1 berada di wilayah selatan, terdiri dari tujuh KPS yang berada di Kecamatan Dagangan (4 KPS) dan Kecamatan Kare (3 KPS). Klaster 2 berada di wilayah utara Kabupaten Madiun, terdiri dari 2 KPS di Kecamatan Pilangkenceng dan 4 KPS di Kecamatan Saradan. Terakhir, klaster 3 berada di wilayah tengah Kabupaten Madiun, terdiri dari 1 KPS di Kecamatan Mejayan dan 3 KPS di Kecamatan Wonoasri. Informasi lebih rinci tentang KPS di Kabupaten Madiun dapat dilihat pada Tabel 9 di bawah.

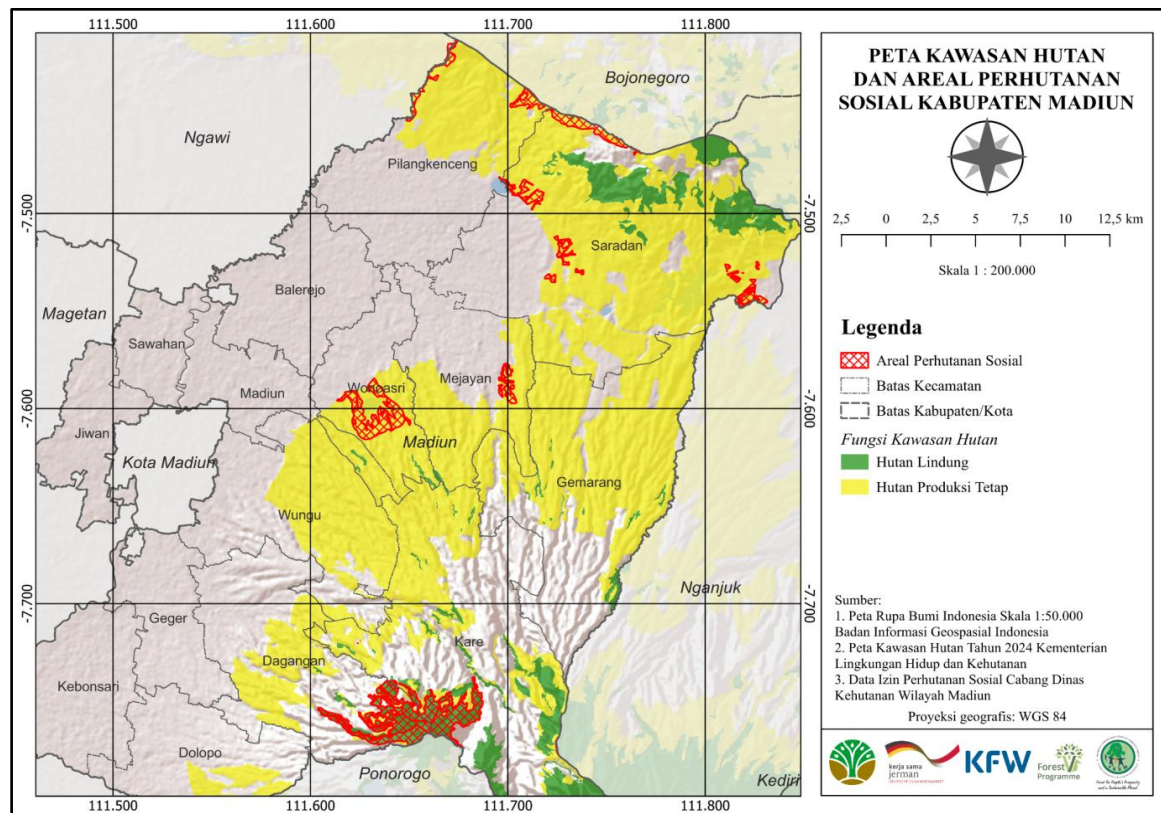
Tabel 9. Daftar KPS dampingan FPV di Kabupaten Madiun

Klaster	Kecamatan	Desa	Nama Lembaga	Luas (ha)	Jumlah KK
1 (Selatan)	Dagangan	Ngranget	LD Nglengko Makmur Sejahtera	146	71
	Dagangan	Mendak	LD Wonopanguripan	209	102
	Dagangan	Padas	LD Sumber Wilis	120	88
	Dagangan	Segulung	LD Wonorejo Ii	269	136
	Kare	Kepel	LPHD Tani Subur	417	105
	Kare	Bodag	LD Wilis Sejahtera	144	100
	Kare	Kare	LPHD Kare Makmur	4	32
2 (Utara)	Pilangkenceng	Luworo	LD Wono Mulyo	97	106
	Pilangkenceng	Bulu	LD Wono Lestari	89	61
	Saradan	Sumberbendo	LD Sumberbendo Sumber Wono Mulyo	209	186
	Saradan	Bandungan	LD Bandungan Wono Jati Waluyo	97	108
	Saradan	Tulung	LD Tulung Wono Makmur	92	97
	Saradan	Klumutan	LPHD Jati Mulyo Pinunjul	71	190
3 (Tengah)	Mejayan	Kebonagung	LPHD Tani Mulyo	82	65
	Wonoasri	Ngadirejo	LD Ngadirejo Sejahtera	55	72
	Wonoasri	Plumpungrejo	LD Wonorejo Asri	157	174
	Wonoasri	Sidomulyo	LD Jati Mulyo	240	65
Jumlah				2.498	1.758

Sumber: Data persetujuan PS Kabupaten Madiun, Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah Madiun

Peta sebaran lokasi areal PS di Kabupaten Madiun yang didukung FPV dapat dilihat pada Gambar 2. Jika dilihat dari peta di bawah, maka terlihat sebaran areal Perhutanan Sosial berdasarkan kondisi geografis, dan ini berpengaruh pada pilihan-pilihan jenis tanaman yang dikembangkan, seperti klaster 1 berada di wilayah tinggi maka jenis tanaman yang dikembangkan adalah kopi. Klaster 2 berada di wilayah sedang, jenis tanaman dikembangkan adalah kayu jenis balsa dan palawija, sedangkan di klaster 3 berada di wilayah lebih rendah, jenis tanaman yang dikembangkan adalah padi, buah-buahan, dan

palawija. Pada gambar tersebut juga terlihat bahwa KPS di klaster 2 (utara) dan 3 (tengah) beririsan dengan kawasan Hutan Produksi Tetap, sedangkan KPS di klaster 1 (selatan) berada di kawasan Hutan Lindung. Status fungsi kawasan ini juga menjadi pertimbangan untuk menentukan jenis tanaman yang bisa dikembangkan pada masing-masing kawasan. Karena alasan ini juga, KPS di klaster 1 tidak mengembangkan tanaman palawija sebagai komoditas utama seperti yang dilakukan oleh KPS di klaster 2 dan 3.



Gambar 2. Peta sebaran areal PS dampingan FPV di Kabupaten Madiun

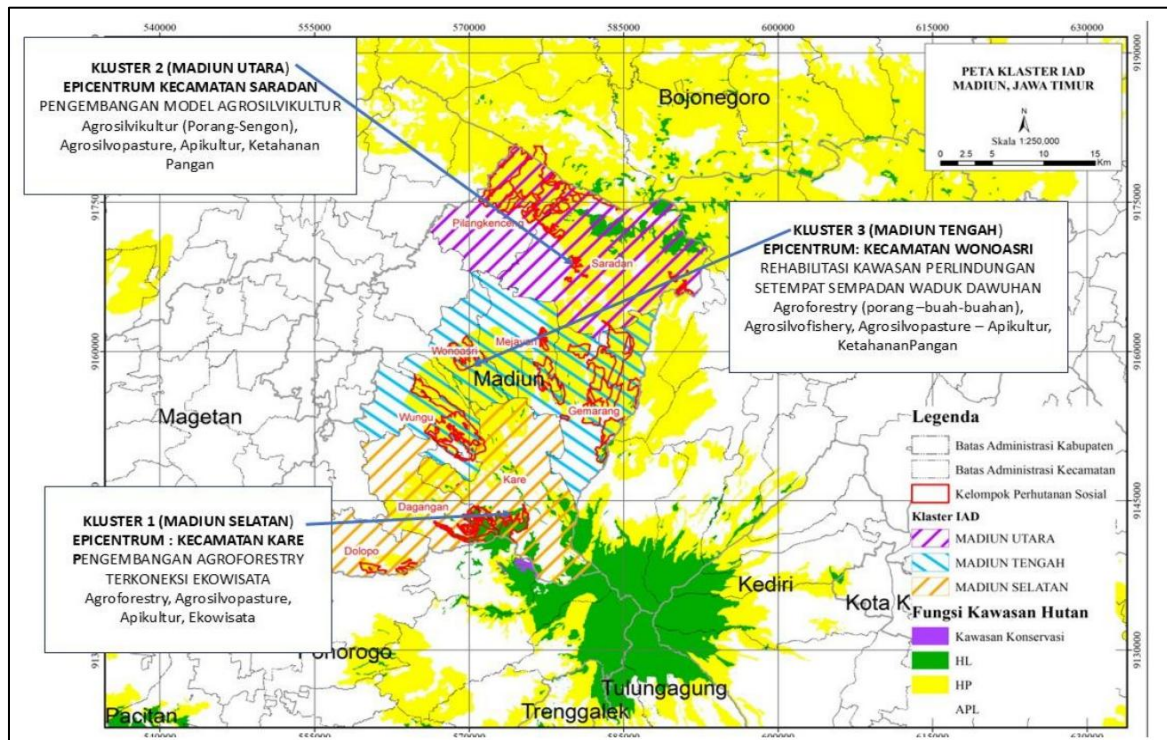
Sumber: Data Izin PS Kabupaten Madiun, CDK Wilayah Madiun

Masyarakat anggota Lembaga Desa (LD), organisasi KPS pengelola areal Perhutanan Sosial di KHDPK, rata-rata mempunyai ikatan dan ketergantungan dengan lahan, mereka mengelola secara intensif meskipun perlu melakukan adaptasi dengan pelaksanaan kebijakan KHDPK.

Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Madiun 2024 - 2026 dikembangkan beberapa kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, dan lain-lain dengan pedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan karakteristik wilayah. Sektor kehutanan bersama dengan sektor pertanian dan perikanan sebagai penyumbang terbesar PAD Kabupaten Madiun, dilibatkan dalam pembangunan daerah Kabupaten Madiun melalui IAD (*Integrated Area Development*). Kawasan Perhutanan Sosial yang dibagi dalam 3 klaster terintegrasi dengan IAD dan RPD. Berikut peta kawasan Perhutanan Sosial dan IAD dan menjadi bagian dalam RPD:

Klaster 3 (Madiun Tengah) adalah kawasan penyangga Waduk Dawuhan potensial dikembangkan untuk agroforestri (tanaman porang dan lainnya), *silvopastura*, dan *silvo-fishery*, maupun juga *cross-cutting* dengan ekowisata serta komoditas lainnya. Klaster 1 (Madiun Selatan) dikembangkan sebagai kawasan perdesaan, berpusat di Kecamatan Kare dengan melibatkan 8 desa. Berbagai macam tanaman agroforestri yang terkoneksi dengan ekowisata dapat dikembangkan di sini, seperti porang, alpukat, kakao, bambu, lebah madu, Durian Kawuk, Kopi Robusta, dan Arabika, serta

tembakau. Kluster 3 ini juga sejalan dengan Peta Jalan Pengembangan Industri Ekonomi Kreatif Kabupaten Madiun 2025 - 2030.



Gambar 3. Peta *integrated area development* Perhutanan Sosial Kabupaten Madiun

Untuk kluster 2 (Madiun Utara) mencakup areal PS di Kecamatan Saradan dan Pilangkenceng. Di Saradan terkenal dengan kualitas porang terbaik di Indonesia, dan porang dapat diintegrasikan dengan tanaman kayu (*sengon*), tanaman sela (padi, jagung, kedelai).

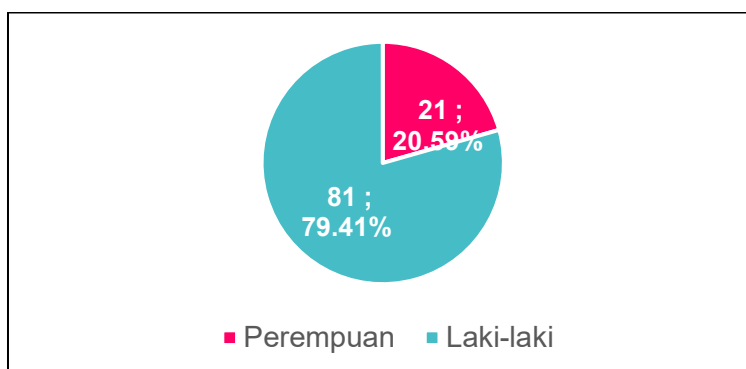


Gambar 4. Tanaman porang di Desa Sumberbendo, Kecamatan Saradan

3.1.2. Hasil Survei Studi *Baseline* Sosio-Ekonomi Pendapatan Rumah Tangga Anggota KPS di Kabupaten Madiun

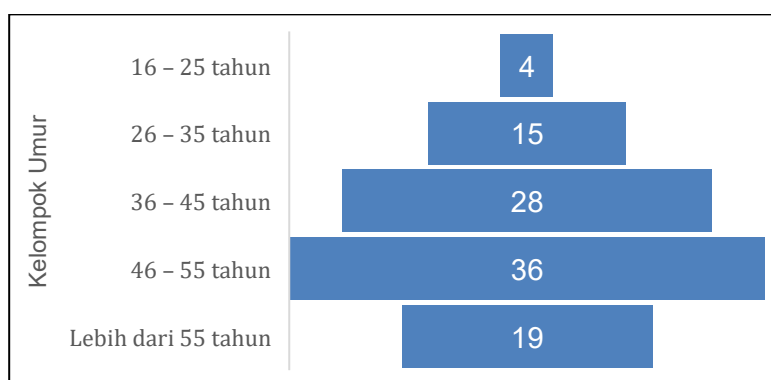
A. Identitas dan Rumah Tangga Responden

Jumlah sampel yang disurvei di Kabupaten Madiun sebanyak 102 responden (5,8%) dari 1.758 orang total anggota KPS. Mayoritas responden adalah berjenis kelamin laki-laki (81 orang (79,4%) dan 21 orang perempuan (20,6%), lihat Gambar 5 di bawah. Dari 102 responden tersebut, jumlah anggota keluarga seluruh responden adalah sebanyak 405 orang, sehingga rata-rata ukuran rumah tangga responden adalah 4 orang per responden.



Gambar 5. Komposisi responden berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Madiun

Jika dilihat dari usia responden, maka rata-rata responden berada di usia sangat produktif untuk bekerja, yaitu sebesar 81,37% dengan rentang usia 16 - 55 tahun, sedangkan usia produktif (masih bisa bekerja untuk menggarap lahan) dengan 55 tahun ke atas sebesar 18,6% (detail dapat dilihat pada Gambar 6). Berdasarkan data ini bisa dilihat bahwa KPS digerakkan pengelolaannya oleh usia sangat produktif untuk bekerja, sekaligus juga menjadi sumber penyediaan tenaga kerja yang baik untuk membangun ekosistem ekonomi berbasis lahan dan jasa lingkungan. Pada rentang usia tersebut, anggota KPS juga dapat bekerja intensif dan relatif lebih terbuka atas inovasi usaha, sehingga mereka dapat mempunyai sumber pendapatan lebih beragam.

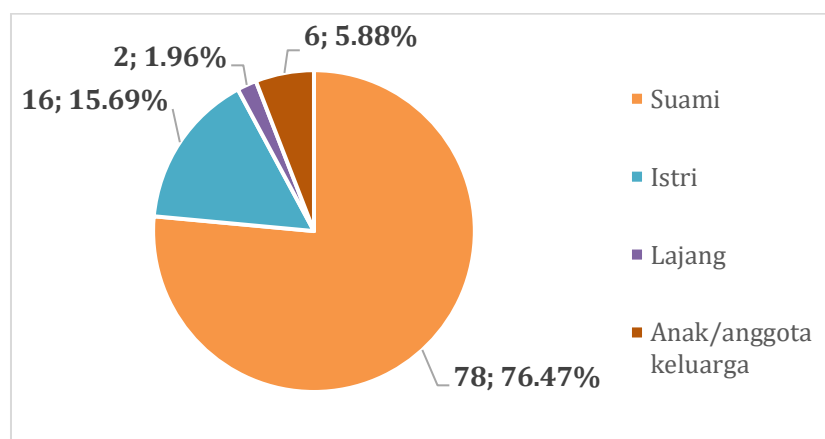


Gambar 6. Responden berdasarkan usia di Kabupaten Madiun

Seluruh responden di Kabupaten Madiun merupakan penduduk asli bersuku Jawa. Tidak ada suku yang lain atau pendatang dari luar suku Jawa. Hal ini terlihat dari dinamika interaksi di antara mereka, seperti bahasa, dan gaya komunikasi, mereka mempergunakan bahasa Jawa dengan dialek khas Madiun, yang relatif halus dan santun. Selain itu, mereka juga masih saling mengenal antar warga.

Terdapat berbagai posisi responden dalam keluarga. Dari 102 responden, sebanyak 78 orang (76,47%) posisinya sebagai suami, sebanyak 16 orang (15,69%) posisinya sebagai istri, sebanyak 2

orang (1,96%) posisinya masih lajang, dan sebanyak 6 orang (5,88%) posisinya sebagai anak atau sebagai anggota keluarga, detail posisi responden dapat dilihat dalam Gambar 7.



Gambar 7. Posisi responden dalam keluarga di Madiun

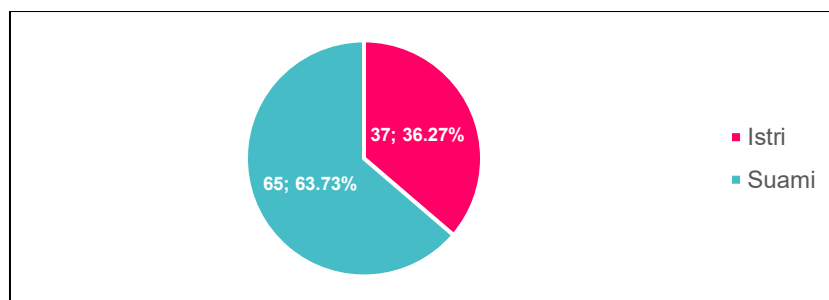
Posisi ini berpengaruh pada model pengelolaan lahan termasuk dalam pengelolaan Perhutanan Sosial. Dari hasil wawancara dengan informan, terdapat pembagian kerja di antara anggota KPS untuk pengelolaan lahan dan tugas domestik rumah tangga. Mayoritas suami dan anak lajang bekerja untuk pembebasan dan pembersihan lahan, pengolahan tanah, pemupukan dan pemanenan, sementara ibu-ibu dan perempuan lebih bekerja untuk penanaman, pemanenan, dan pengelolaan pasca panen. Sementara anggota keluarga lainnya mengikuti tugas dari orang tua untuk membantu dalam bekerja.

Tabel 10. Pembagian tugas pengelolaan Perhutanan Sosial berdasarkan posisi dalam keluarga di Madiun

Suami	Istri	Lajang	Anak/ Anggota Keluarga
Penebasan atau pembersihan lahan; Pengolahan tanah; Pemupukan tanaman; Panen; Penjualan	Penanaman; Panen; Pengelolaan pasca panen.	Penebasan; Pembersihan lahan; Pengolahan tanah; Pemupukan tanaman; Panen; Pengelolaan pasca panen; Penjualan	Mengikuti tugas dari orang tua, hampir semua tugas dilaksanakan untuk membantu orang tua

Sumber: Hasil wawancara mendalam dan observasi lapangan, 2025

Untuk pengambilan keputusan keuangan anggota Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) masih didominasi oleh suami sebesar 64% dan sebesar 36% diputuskan oleh istri (lihat Gambar 8). Data ini terkait dengan posisi dan pembagian tugas, di mana suami masih mempunyai peran kuat dan dominan dalam Perhutanan Sosial, salah satu faktornya adalah sebagai kepala keluarga.



Gambar 8. Pengambil keputusan pengelolaan keuangan keluarga di Madiun

Dari 102 responden total penguasaan lahan dalam areal KPS adalah 59,71 ha, sehingga rata-rata penguasaan lahan setiap responden/anggota KPS dalam areal Perhutanan Sosial adalah sebanyak 0,59 hektare (lihat Tabel 11). Dari tabel bisa dilihat 3 rata-rata penguasaan lahan tertinggi adalah LD Tulung Wono Makmur seluas 1.08 hektare, kedua adalah LD Kare Makmur seluas 1,01 hektare, dan ketiga adalah LD Tani Subur sebesar 0.92 hektare. Dengan melihat penguasaan lahan 0,59 ha, maka petani lebih produktif mengelola lahan pertaniannya. Namun penguasaan lahan ini sangat membantu petani dikarenakan mereka dapat menguasai lahan secara penuh tanpa ada bagi hasil dengan pihak lain seperti dengan Perhutani sebelumnya.

Tabel 11. Penguasaan lahan dalam areal Perhutanan Sosial oleh KPS di Madiun

No.	Nama KPS	Responden	Total penguasaan lahan responden dlm areal PS (ha)	Rata-rata luas penguasaan lahan responden dalam areal PS (ha)
1	LD Bandungan Wono Jati Waluyo	6	4.15	0.69
2	LD Jati Mulyo	6	4	0.67
3	LD Kare Makmur	6	6.05	1.01
4	LD Ngadirejo Sejahtera	6	0.75	0.13
5	LD Nglengko Makmur Sejahtera	6	4.7	0.78
6	LD Sumber Wilis	6	1.3	0.22
7	LD Sumberbendo Sumber Wono Mulyo	6	4.95	0.83
8	LD Tani Mulyo	6	3	0.5
9	LD Tani Subur	6	5.5	0.92
10	LD Tulung Wono Makmur	6	6.5	1.08
11	LD Wilis Sejahtera	6	1	0.17
12	LD Wono Lestari	6	2.25	0.38
13	LD Wono Mulyo	6	2.75	0.46
14	LD Wonopanguripan	6	3.2	0.53
15	LD Wonorejo Asri	6	2.12	0.35
16	LD Wonorejo II	6	4.09	0.68
17	LPHD Jati Mulyo Pinunjul	6	3.4	0.57
18	Grand Total	102	59.71	0.59

Perlu diberikan catatan, tidak semua areal Perhutanan Sosial dapat dikelola oleh anggota KPS, karena berbagai faktor, yaitu masih terdapat aset Perhutani, terdapat beberapa anggota KPS belum mendapatkan lahan garapan, lahan dalam kondisi kritis atau kering, serta keterbatasan modal dan

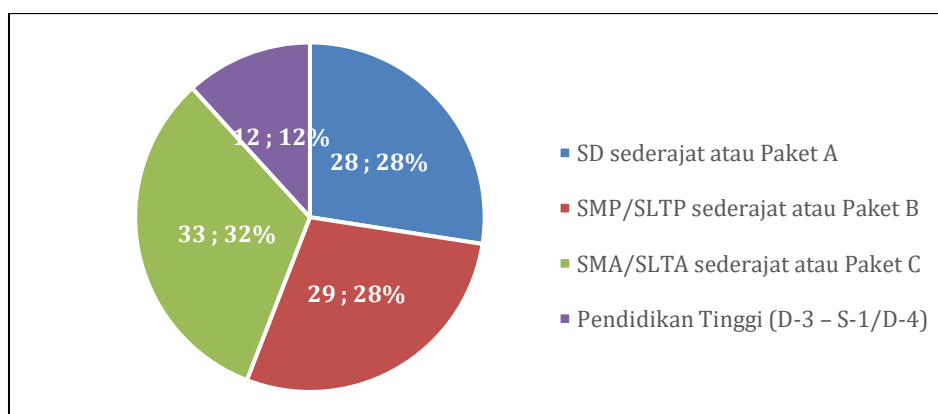
kurangnya keterampilan dari anggota KPS sebagai penggarap. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan penanganan, baik dari sisi kebijakan, dukungan keterampilan tata kelola lahan, dan bantuan peralatan pertanian.

Berdasarkan wawancara dengan Pendamping dari CDK Madiun pada tanggal 18 November 2025 (*kemudian dikonfirmasi kembali pada tanggal 12 Desember 2025, sesuai hasil catatan dari rapat presentasi hasil Studi Baseline tanggal 11 Desember 2025*), lahan Perhutanan Sosial belum bisa dikelola secara produktif karena masih terdapat aset Perhutani di beberapa desa, seperti Plumpung sekitar 40% lahan Hutan Desa, Sidomulyo sekitar 50%, dan Ngadirejo sekitar 30%.

Sedangkan untuk anggota KPS yang belum mendapatkan lahan garapan, seperti di Wonoasri, Sidomulyo, Jatirejo, dan Plumpung Rejo, pihak CDK sebagai pendamping telah memfasilitasi untuk mencari solusi atas masalah ini, salah satunya adalah melalui kesepakatan pembagian hasil panen, yang akan dituangkan dalam AD/ART KPS.

B. Pendidikan

Untuk tingkat pendidikan, dari 102 responden tingkat pendidikan terbesar adalah SMA/SLTA sederajat atau Paket C sebanyak 33 orang (32,35%), kemudian SMP/SLTP sederajat atau Paket B sebanyak 29 orang (28,43%), selanjutnya SD sederajat atau Paket A sebanyak 28 orang (27,45%), dan yang terakhir Pendidikan Tinggi (D-3, S-1/D-4) sebanyak 12 orang (11,76%), bisa dilihat pada Gambar 9. Artinya tidak ada responden yang buta huruf dan semuanya dapat membaca dan menulis. Hal ini sangat penting diketahui untuk program peningkatan kapasitas anggota KPS.



Gambar 9. Tingkat pendidikan responden di Madiun

Bagi responden, pendidikan anak merupakan hal yang penting. Bagi anggota KPS, pendidikan anak akan membantu meningkatkan status sosial dan status ekonomi keluarga. Hal ini dapat dilihat dari 102 responden terdapat 85 orang (83,33%) yang mempunyai persepsi pendidikan anak sangat penting, kemudian 10 orang (9,80%) mempunyai persepsi pendidikan anak penting, sebanyak 4 orang (3,92%) mempunyai persepsi anak sangat tidak penting, dan sebanyak 3 orang (2,94%) mempunyai persepsi netral atau bisa diterjemahkan anak sekolah atau tidak sekolah sama saja (detailnya bisa dilihat pada Tabel 12).

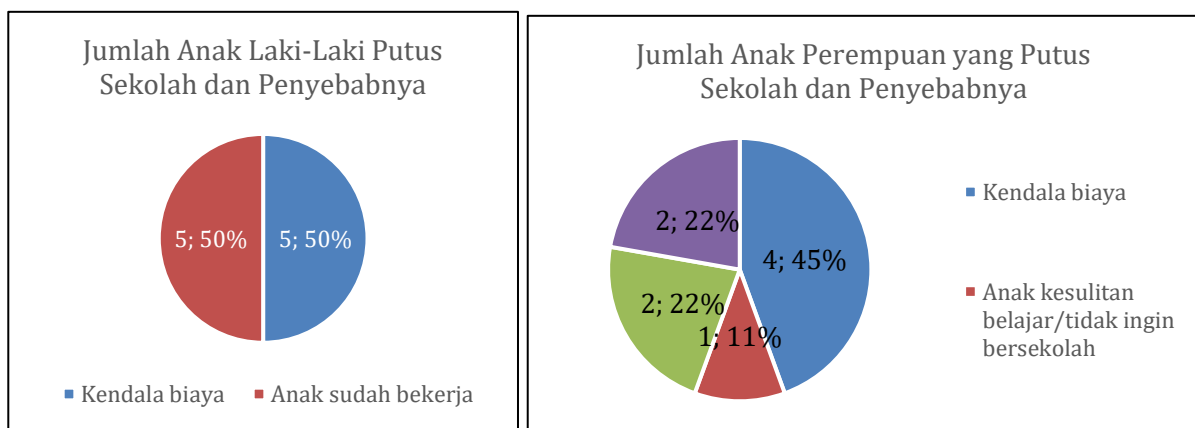
Tabel 12. Persepsi tentang pendidikan anak di Madiun

Persepsi tentang Pendidikan Anak	Responden	Persentase
Sangat tidak penting	4	3.92%
Tidak penting	0	0.00%

Netral	3	2.94%
Penting	10	9.80%
Sangat penting	85	83.33%

Dari 102 responden ditemukan data jumlah anak laki-laki dan anak perempuan yang putus sekolah beserta faktor penyebabnya. Terdapat 14 anak-anak putus sekolah yaitu laki-laki 5 orang dan 2 orang anak perempuan diakibatkan kendala biaya, dan 5 anak laki-laki serta 2 orang anak perempuan putus sekolah karena mereka bekerja dan menikah.

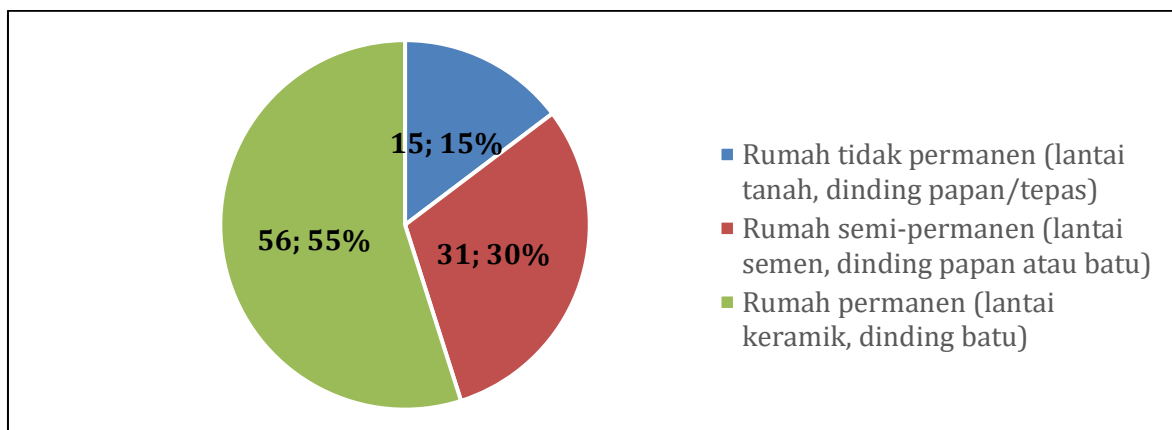
Sedangkan untuk anak perempuan terdapat 4 orang anak yang putus sekolah karena kendala biaya, 2 orang anak putus sekolah karena kesulitan belajar atau tidak ingin bersekolah, 2 orang anak putus sekolah karena sudah bekerja, dan 1 orang anak putus sekolah karena sudah menikah.



Gambar 10. Jumlah dan penyebab anak-anak putus sekolah di keluarga responden Madiun

C. Infrastruktur Dasar Responden

Untuk kondisi rumah responden mayoritas adalah rumah permanen (lantai keramik, dinding batu) sebanyak 56 orang (54,90%), diikuti sebanyak 31 orang (30,39%) rumah semi-permanen (lantai semen, dinding papan atau batu), dan selanjutnya sebanyak 15 orang (14,71%) rumah tidak permanen (lantai tanah, dinding papan/tepas). Jika dilihat dari data kondisi rumah, maka mayoritas anggota KPS di Kabupaten Madiun status kondisi ekonominya cukup baik, karena secara umum, kondisi rumah mereka layak untuk dihuni, dan mereka mempunyai kemampuan untuk membangunnya.

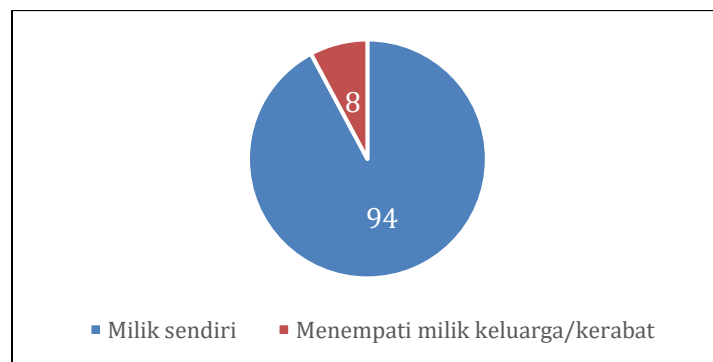


Gambar 11. Kondisi rumah responden di Madiun



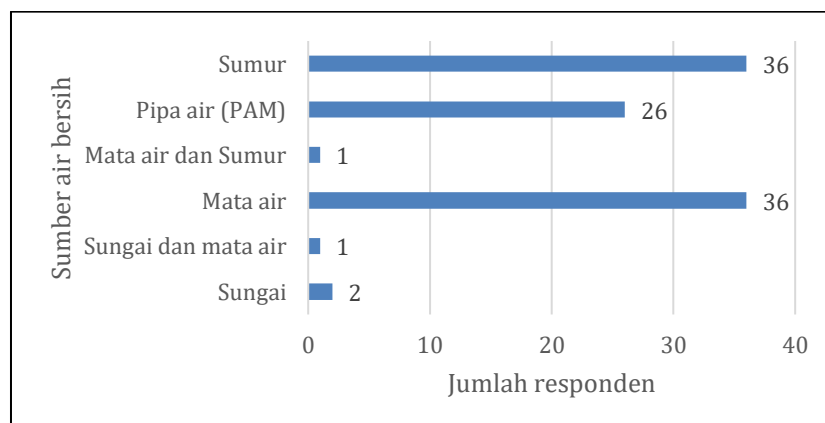
Gambar 12. Kondisi rumah penduduk di Desa Sumberbendo, Kecamatan Saradan

Demikian juga untuk status kepemilikan rumah responden, dari 102 responden sebanyak 94 orang (92,16%) menempati rumah sendiri, hanya sebanyak 8 orang (7,84%) menempati rumah keluarga dan tidak ada yang menyewa (lihat Gambar 13).



Gambar 13. Status kepemilikan rumah responden di Madiun

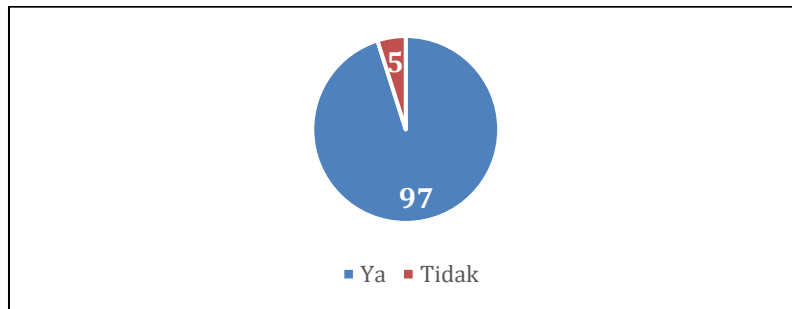
Pada umumnya, anggota KPS mendapatkan air bersih dari berbagai sumber seperti air sumur, air PAM dan mata air. Dari 102 responden sebanyak 36 orang (35,29%) sumber air bersih dari sumur, sebanyak 36 orang (35,29%) sumber air bersih dari mata air, sebanyak 26 orang (25,49%) sumber air bersih dari pipa air (PAM), dan hanya sebanyak 2 orang (1,96%) sumber air bersih dari sungai, dan masing-masing 1 orang (0,98%) berasal dari mata air dan sumur, serta 1 orang (0,98%) dari sungai dan mata air (lihat Gambar 14 di bawah).



Gambar 14. Sumber air bersih responden Madiun

Sebagian besar responden memiliki sarana MCK (Mandi Cuci Kakus). Dari 102 responden terdapat 97 orang (95,10%) yang memiliki akses ke MCK, dan sebanyak 5 orang (4,90%) yang tidak

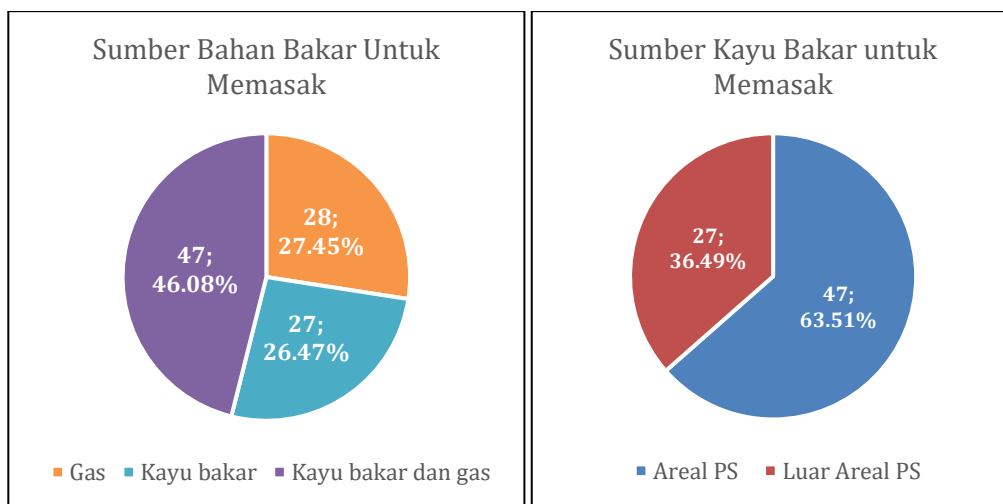
memiliki sarana MCK. Bagi responden yang tidak memiliki sarana MCK, mereka mandi dan membersihkan pakaian di sungai.



Gambar 15. Rumah tangga responden yang memiliki sarana MCK di Madiun

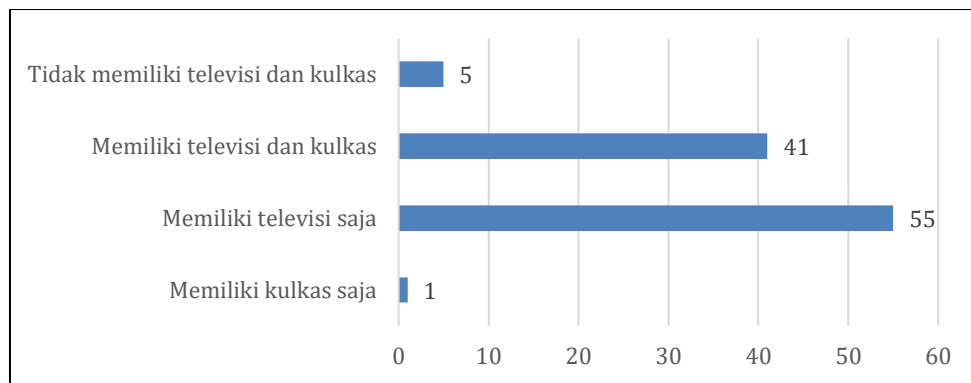
Untuk sumber bahan bakar untuk memasak, sebagian besar responden mempergunakan kombinasi kayu bakar dan gas yaitu sebanyak 47 orang (46,08%), diikuti responden yang mempergunakan gas untuk memasak sebanyak 28 orang (27,45%), dan responden yang mempergunakan kayu bakar untuk memasak sebanyak 27 orang (26,47%). Responden yang rumah tangganya menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar memasak sebagian besar (63,51%) memperoleh kayu bakarnya dari areal PS.

Dari data sumber bahan bakar memasak petani dapat dilihat dari sebagian besar responden melakukan tindakan ekonomis yaitu tidak tergantung pada satu sumber bahan bakar dengan menggunakan kayu bakar dan gas. Hal ini juga menunjukkan bahwa anggota KPS umumnya memanfaatkan sumber bahan bakar yang tersedia di alam (areal PS) dan sumber bahan bakar yang didapatkan dengan membeli.



Gambar 16. Sumber bahan bakar untuk memasak dan sumber bahan bakar di Madiun

Pada umumnya responden memiliki alat informasi untuk mengikuti perkembangan di luar desanya. Alat informasi tersebut berupa TV, dan juga mereka mempunyai kulkas untuk mendinginkan berbagai makanan. Untuk kepemilikan televisi dan kulkas, dari 102 responden, sebanyak 55 orang (53,92%) memiliki televisi, sebanyak 41 orang (40,20%) memiliki televisi dan kulkas, sebanyak 5 orang (4,90%) tidak memiliki televisi dan kulkas, dan sebanyak 1 orang (0,98%) tidak memiliki kulkas.

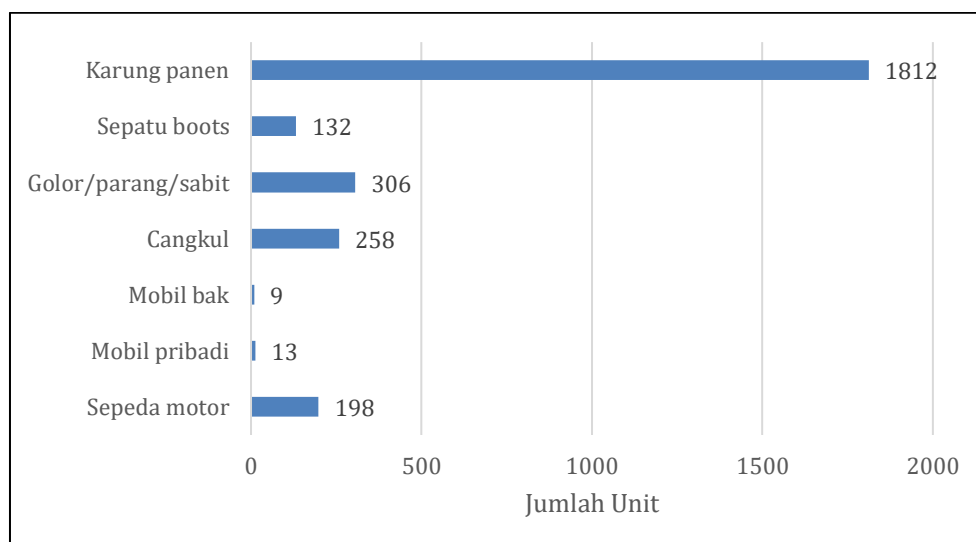


Gambar 17. Kepemilikan televisi dan kulkas di Madiun

Semua anggota KPS memiliki akses listrik yang berasal dari PLN. Akses listrik berpengaruh terhadap kepemilikan barang elektronik, seperti televisi dan kulkas.

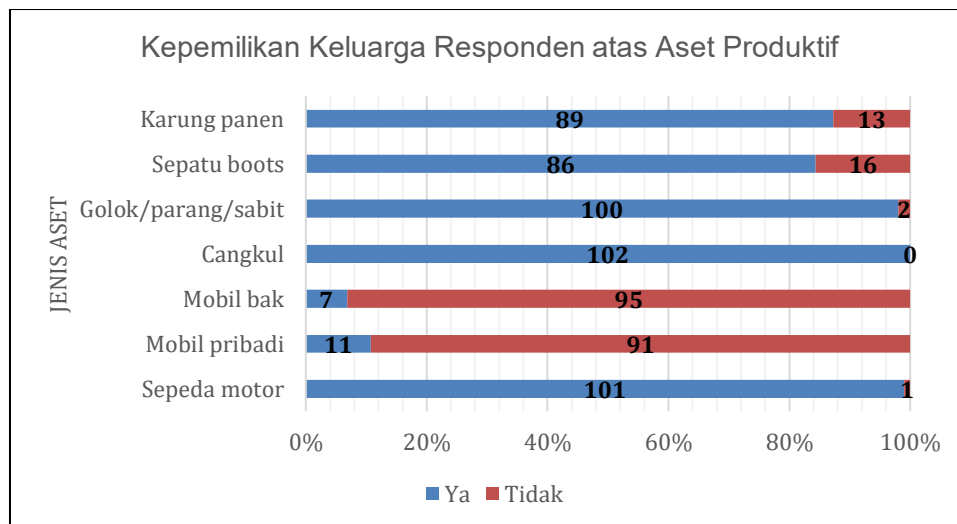
Untuk pengelolaan areal Perhutanan Sosial, maupun pertanian di luar areal PS, anggota KPS memiliki aset yang dipergunakan untuk menunjang pekerjaan mereka dalam pengelolaan lahan dan pertanian. Alat transportasi seperti sepeda motor dan mobil bak menunjang transportasi hasil-hasil pertanian.

Dari 102 responden jumlah aset yang paling banyak dimiliki adalah karung panen sebanyak 1.812 buah (66,42%), golok/parang/sabit sebanyak 306 buah (11,22%), cangkul sebanyak 258 buah (9,46%), sepeda motor sebanyak 198 buah (7,26%), sepatu *boots* sebanyak 132 buah (4,84%), mobil pribadi sebanyak 13 buah (0,48%), dan mobil bak sebanyak 9 buah (0,33%).



Gambar 18. Jumlah aset produktif responden di Madiun

Gambar 18 di atas hanya menampilkan akumulasi aset produktif yang dimiliki semua rumah tangga responden, namun tidak menunjukkan responden yang memiliki ataupun tidak memiliki masing-masing jenis aset. Gambar 19 di bawah menampilkan jumlah responden yang memiliki masing-masing jenis aset produktif. Berdasarkan gambar ini, terlihat bahwa cangkul merupakan aset produktif yang dimiliki oleh semua responden. Aset produktif lain seperti sepeda motor, golok/parang/arit, sepatu *boots*, dan karung panen dimiliki oleh sebagian besar responden. Dari 102 responden, hanya ada satu responden yang keluarganya tidak memiliki sepeda motor, dua responden yang keluarganya tidak memiliki golok/parang/arit, tiga belas responden yang tidak memiliki karung panen, dan enam belas responden yang tidak memiliki sepatu *boots*. Kemudian untuk aset berupa mobil pribadi dan mobil bak tidak dimiliki oleh mayoritas responden..



Gambar 19. Kepemilikan keluarga responden atas aset produktif di Madiun

D. Profil Pendapatan Rumah Tangga dari Areal PS

Meskipun kebijakan KHDPK masih dilaksanakan sekitar 1 tahun dan masih terdapat beberapa permasalahan, seperti batas areal PS dengan desa tetangga dan aset Perhutani, namun secara umum masyarakat senang telah diberikan akses untuk mengelola kawasan hutan melalui skema Hutan Desa dan HKm. Jika sebelumnya mereka memanfaatkan kawasan hutan dengan sembunyi dan rasa khawatir, sehingga tidak dapat dipastikan manfaat ekonomi yang didapatkan, sekarang mereka sudah bisa melakukan perencanaan pengelolaan, melakukan penanaman, dan memanen hasilnya.

Bagi petani, areal PS sangat penting dalam mendukung sumber-sumber penghidupan, berikut rekaman umum pernyataan mereka: (1) PS menjadi sumber ekonomi rumah tangga, mereka bisa menjual komoditi hasil PS, (2) PS sebagai sumber pangan, mereka bisa mengambil hasil tanaman di PS untuk dikonsumsi, seperti padi, ubi, dan palawija, dan ini akan mengurangi pengeluaran rumah tangga, (3) Masyarakat dapat mempunyai “simpanan alam” berupa jenis pepohonan, seperti balsa, yang akan dipanen sebagai sumber pendapatan tambahan.

E. Sumber Pendapatan Rumah Tangga Anggota KPS

Sumber-sumber pendapatan rumah tangga KPS di Kabupaten Madiun terdiri dari 2 kategori, yaitu:

1. Sumber pendapatan dari areal Perhutanan Sosial, terdiri dari:
 - a. Komoditas atau hasil tanaman yang dikonsumsi sendiri, yang dapat dihitung berdasarkan banyaknya jumlah panen dikalikan harga;
 - b. Komoditas atau hasil tanaman yang dijual baik di tingkat tapak, desa kecamatan, kabupaten, antar provinsi, serta ekspor ke luar negeri.

Untuk menentukan pendapatan rumah tangga KPS, maka dihitung berapa komoditas hasil tanaman yang dikonsumsi ditambah dengan hasil tanaman yang dijual dikurangi dengan biaya produksi dari hasil komoditas tersebut. Adapun *baseline* total pendapatan rumah tangga anggota Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) di Kabupaten Madiun berdasarkan sumber dari areal Perhutanan Sosial adalah **Rp1.334.718.600** atau rata-rata pendapatan per keluarga sebesar **Rp13.085.477/tahun** atau **Rp1.087.456 per bulan**. Detail pendapatan dari areal Perhutanan Sosial di Kabupaten Madiun dapat dilihat pada Tabel 13.

2. Sumber pendapatan dari luar areal Perhutanan Sosial

Total pendapatan anggota Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) yang berasal dari luar areal Perhutanan Sosial adalah sebesar **Rp1.080.240.000/tahun** atau rata-rata pendapatan per keluarga **Rp10.590.588/tahun** atau **Rp882.549/bulan**.

3. Total pendapatan anggota Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) per tahun dari areal Perhutanan Sosial dan pendapatan lain sebesar **Rp2.414.958.600** atau rata-rata pendapatan per keluarga per tahun **Rp23.676.065** atau per bulan **Rp1.970.005/bulan** (lihat Tabel 13).

Ringkasan *baseline* pendapatan rumah tangga KPS yang sumbernya dari areal PS dan di luar areal PS dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Ringkasan *baseline* data pendapatan rumah tangga KPS di Kabupaten Madiun

No	Jenis Pendapatan	Kabupaten Madiun			
		Total Pendapatan / tahun (Rp)	Rata-rata pendapatan /KK/Tahun (Rp)	Rata-rata pendapatan /KK/ Bulan (Rp)	%
1	Pendapatan dari konsumsi sendiri	704,067,000	6,902,618	575,218	
2	Pendapatan dari komoditas dijual	688,067,000	6,745,755	562,146	
Pendapatan kotor dari PS		1,392,134,000	13,648,373	1,137,364	
Biaya		20,656,000	202,510	16,876	
Pendapatan bersih		1,371,478,000	13,445,863	1,120,489	55,94%
3	Pendapatan Lain	1,080,240,000	10,590,588	882,549	44,06%
Grand Total		2,451,718,000	24,036,451	2,003,038	100%

Dari uraian di atas, pendapatan keseluruhan dari areal PS adalah sebesar Rp1.371.478.000 per tahun atau rata-rata sebesar Rp1.137.364 per bulan per KK. Pendapatan ini berkontribusi sebesar 55,94% dari keseluruhan pendapatan responden, sedangkan pendapatan dari luar areal PS adalah sebesar 882,549 per bulan per KK atau 44,06% dari keseluruhan total pendapatan responden. Berdasarkan penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa areal PS merupakan sumber pendapatan penting bagi anggota KPS karena sebagian besar pendapatan rumah tangga responden berasal dari hasil mengelola PS. Komoditas yang ditanam pada lahan PS tidak monokultur, dapat ditanami berbagai jenis tanaman seperti kopi, padi, jagung, palawija, kayu sehingga memberikan penghasilan yang beragam, baik yang bersifat uang segar (*fresh money*), maupun sebagai tabungan. Dengan kata lain, areal PS juga menjadi sumber ketahanan pangan keluarga.

a. Komoditas yang dikonsumsi sendiri dari areal PS

Komoditas PS yang dikonsumsi oleh rumah tangga responden terdiri dari delapan komoditas adalah sebesar Rp704.067.000 per tahun atau Rp58.672.250 per bulan. Adapun jenis komoditas PS yang dikonsumsi adalah sebagai berikut

- Karbohidrat : padi dan jagung
- Sayuran: kacang tanah
- Protein: daging sapi (pemanfaatan kawasan untuk pakan ternak)
- Buah-buahan: alpukat, durian, pepaya, dan pisang
- Rempah-rempah: kapulaga dan cengkeh
- Umbi-umbian: singkong
- Tanaman tahunan: kopi

Jumlah keseluruhan komoditas yang dikonsumsi rumah tangga responden adalah sebanyak 21,658 kg dalam setahun, atau setara dengan pengeluaran sebesar Rp1,202,941 setahun per keluarga. Padi menjadi komoditas yang paling banyak dikonsumsi rumah tangga responden per tahun, dengan jumlah total konsumsi sebanyak Rp15.720 kg per tahun dari seluruh responden, atau nilainya setara dengan Rp102.180.000 per tahun. Uraian lebih lengkap tentang komoditas Perhutanan Sosial yang dikonsumsi oleh responden dapat dilihat pada Tabel 14 di bawah.

Tabel 14. Jenis dan jumlah konsumsi komoditas hasil PS di Kabupaten Madiun

Komoditas	Total komoditas yang dikonsumsi per bulan (kg)	Total komoditas yang dikonsumsi per tahun (kg)
Sayuran (kacang tanah)	55	660
Protein (daging)	8	96
Padi	1,310	15,720
Umbi-umbian	242	2,904
Rempah-rempah	50	600
Buah-buahan	43.8	525.6
Tanaman kopi	20	240
Lainnya (Jagung)	76	912
Total	1,805	21,658

b. Pendapatan yang berasal dari komoditi PS yang dijual

Pendapatan anggota KPS dari komoditas yang dijual berupa: kopi, buah-buahan, porang, rempah-rempah, HHBK lainnya, padi, singkong ternak dan palawija. Total penjualan produk dari 102 responden adalah Rp688.067.000/tahun dan Rp57.338.916/bulan. Pendapatan anggota KPS dari areal PS yang tertinggi berasal dari Porang sebesar Rp310.850.000/tahun diikuti oleh padi sebesar Rp 211.200.000 dan buah-buahan. Sedangkan Pendapatan terkecil berasal dari palawija (Tabel 15).

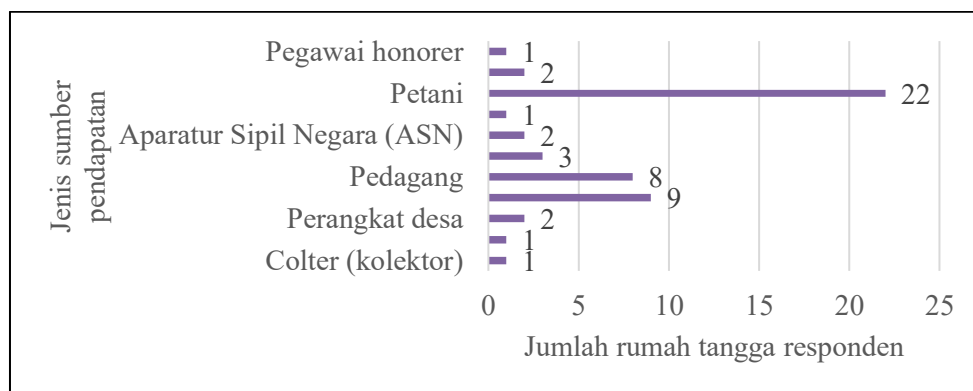
Tabel 15. Pendapatan anggota KPS yang berasal dari komoditas PS yang dijual di Madiun

Komoditas	Hasil Jual per Tahun (Rp)
Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	
Kopi	16,700,000
Buah-buahan	73,825,000
Porang	310,850,000
Rempah-rempah	1,000,000
Pemanfaatan Kawasan	
Makanan pokok (padi)	211,200,000
Umbi-umbian (singkong)	32,200,000

Sayuran (jagung)	10,000,000
Ternak	9,000,000
Pemanfaatan kawasan lainnya (palawija)	42,000
Total pendapatan dari penjualan komoditas PS	688,067,000

c. Pendapatan Lain dari luar Agroforestri

Dilihat dari sumber pendapatan, selain dari areal PS, anggota keluarga KPS juga mempunyai sumber pendapatan dari luar areal PS (Gambar 20). Dari data terlihat bahwa jenis sumber pendapatan lain dari areal Perhutanan Sosial, yaitu sebagai petani, baik yang bekerja di APL maupun memanfaatkan pekarangan rumah. Selain itu, data ini juga menunjukkan bahwa responden dan anggota keluarga merupakan keluarga petani yang menggantungkan kehidupan pada pertanian.



Gambar 20. Profesi dan sumber pendapatan anggota keluarga responden dari luar areal PS di Madiun

Jika dilihat dari jenis pekerjaan lain yang dapat menyumbang pendapatan seperti ada yang berstatus ASN, karena yang wawancara adalah basis per keluarga dengan status suami, istri dan anak-anak, maka status ASN belum tentu sebagai kepala keluarga laki-laki. Bisa saja yang berstatus ASN ini adalah istri atau anak dari anggota keluarga. Merujuk pada Tabel 16 di bawah ini disimpulkan bahwa hanya sekitar 50% anggota KPS yang memiliki pendapatan di luar PS.

Tabel 16. Sumber pendapatan dan penghasilan anggota rumah tangga dari non-PS di Madiun

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah RT	Jumlah Pendapatan Bulanan (Rp/bulan)	Jumlah Pendapatan Tahunan (Rp/tahun)
1	Colter / Kolektor	1	1,750,000	21,000,000
2	Penjahit	1	1,500,000	18,000,000
3	Perangkat desa	2	4,000,000	48,000,000
4	Pegawai swasta	9	24,470,000	293,640,000
5	Pedagang	8	12,000,000	144,000,000
6	Pekerja bangunan	3	2,100,000	25,200,000
7	ASN	2	10,000,000	120,000,000
8	Beternak	1	2,000,000	24,000,000

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah RT	Jumlah Pendapatan Bulanan (Rp/bulan)	Jumlah Pendapatan Tahunan (Rp/tahun)
9	Petani	22	27,100,000	325,200,000
10	Guru	2	2,100,000	25,200,000
11	Pegawai honorer	1	3,000,000	36,000,000
Jumlah		52	90,020,000	1,080,240,000
Rata-rata per KK		102	882.549	10.590.588

F. Paska Panen dan Pemasaran

Pada umumnya komoditi PS yang dihasilkan oleh KPS masih dijual dalam bentuk bahan mentah, seperti beras lokal, ubi, kacang tanah, jagung, dan buah-buahan. Sedangkan yang sudah diolah setengah jadi adalah porang dalam bentuk *cip* (porang yang sudah diiris kemudian dijemur), dan kopi (baik itu biji kering dan serbuk kopi).

Untuk pemasaran produk PS terdapat 3 pola penjualan, yaitu: (1) Dijual ke *pengepul*, pola ini paling banyak dilakukan dan cenderung disukai oleh petani, karena memudahkan mereka tidak membutuhkan transportasi, hemat waktu, dan risiko dalam perjalanan, serta pembayaran langsung (*fresh money*). Pengepul datang langsung ke ladang maupun rumah petani, untuk mengangkut hasil petani. (2) Petani menjual ke pasar, baik pasar di desa, kecamatan, dan kabupaten. Hal ini biasanya dilakukan karena adanya jumlah panen berlebih dari yang dibeli oleh *pengepul*, serta didorong karena kebutuhan untuk mendapatkan uang. (3) Pola ini ditemukan khusus untuk komoditi kopi di daerah Kare, yaitu, (a) untuk kopi bubuk di jual ke warung-warung dan kafe di sekitar desa maupun kecamatan, selain itu juga dikirim ke kota dan kabupaten Semarang sebulan sekali, (b) untuk kopi dalam bentuk biji (*green bean*) dijual di pasar kabupaten, (3) kopi yang sudah di *roasting* di ekspor ke Filipina dan Belanda sebanyak 40 pack ukuran 150 gram, 2 kali pengiriman dalam 1 bulan.

Tabel 17. Paska panen dan pemasaran produk PS di Kabupaten Madiun

No.	Jenis Komoditas	Pengolahan			Dijual ke			Lokasi Pemasaran			
		Bahan Mentah	Setengah Jadi	Bahan Jadi	Dusun/desa	Pasar	Pengepul	Desa	Kecamatan/Kabupaten	Luar Kabupaten	Luar Negeri
1	Padi Lokal	✓				✓	✓	✓	✓		
2	Porang		✓				✓	✓			
3	Kopi	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
4	Ubi	✓				✓		✓			
5	Jagung	✓				✓	✓	✓	✓		
6	Palawija	✓				✓	✓	✓	✓		
7	Buah-buahan	✓				✓	✓	✓	✓		



Gambar 21. Produk kopi olahan Ibu Purwati, anggota KUPS Selo Gedong (KUPS kopi di LD Wilis Sejahtera) yang telah diekspor ke Filipina dan Belanda

G. Analisis Mata Pencapaian

Berdasarkan pembahasan pada sub bab E yang memaparkan tentang profil pendapatan responden, terlihat bahwa sumber pendapatan utama anggota KPS di Kabupaten Madiun berasal dari areal PS. Kontribusi pendapatan dari PS ini, baik yang berupa pendapatan dari hasil penjualan maupun nilai dari komoditas yang dikonsumsi, menyumbang 55,96 %, dari keseluruhan pendapatan masyarakat. Sumbangsih nilai pendapatan yang berasal dari komoditas yang dikonsumsi sendiri dan dijual hampir sama yaitu perbandingan 28,72% dengan 27,22%. Jenis tanaman yang paling banyak dikonsumsi sekaligus yang nilainya paling besar adalah tanaman padi, dengan total hasil yang dikonsumsi oleh seluruh responden saja sebanyak 15.720 kg per tahun (perkiraan nilai rupiah sebesar Rp102.180.000).

Perlu diperhatikan bahwa jenis komoditas yang berada di areal PS Kabupaten Madiun sangat ditentukan oleh klaster dan fungsi kawasan hutan lokasi dari KPS yang bersangkutan. Meskipun total konsumsi hasil PS berupa beras di Madiun tinggi, ini hanya berasal dari KPS di klaster 2 (utara) dan klaster 3 (tengah) yang merupakan kawasan hutan produksi dan memang memiliki tanaman padi. Padi tidak dikembangkan di klaster 1 (selatan) yang merupakan kawasan lindung.\

Selain mengonsumsi hasil dari PS, masyarakat juga memiliki pendapatan yang berasal dari penjualan hasil PS. Komoditas hasil PS yang dijual meliputi hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan hasil pemanfaatan kawasan untuk menanam tanaman pangan, sayur, dan beternak. Komoditas HHBK di Kabupaten Madiun meliputi kopi, buah-buahan, porang, dan rempah-rempah. Jumlah total pendapatan responden dari HHBK per tahunnya adalah sebesar Rp402.375.000. Komoditas HHBK dengan hasil penjualan kotor tertinggi jika berdasarkan hasil survei adalah porang. Jumlah pendapatan kotor per tahunnya adalah Rp310.850.000 dan perkiraan pendapatan bersihnya adalah sebesar Rp97.725.000..

Selain pendapatan dari penjualan dan konsumsi, masyarakat juga menerima manfaat lain dari PS yang tidak terhitung sebagai pendapatan. Manfaat-manfaat tersebut antara lain:

1. Anggota KPS masih menggunakan sumber kayu bakar sekitar 63,51%
2. Masyarakat di Kecamatan Dagangan memanfaatkan areal PS untuk pakan ternak.
3. Areal PS juga memberikan manfaat dalam menyediakan dan menjaga sumber air bersih untuk masyarakat. Sebanyak 73 dari 102, atau sekitar 71,57% responden survei di Madiun menyebutkan mata air ataupun sumur sebagai sumber air bersih mereka. Dengan demikian Hutan memiliki fungsi penting dalam menjaga kualitas dan suplai air bersih di sekitar hutan.

Jika dilihat pada Tabel 17 sebagian besar komoditas yang berasal dari areal PS adalah bahan mentah dan hanya porang serta kopi yang diolah setengah jadi, serta kopi juga diolah sebagai bahan jadi atau dalam bentuk serbuk, meskipun jumlah produksinya masih kecil. Untuk meningkatkan nilai komoditi, diperlukan peningkatan keterampilan anggota KUPS untuk mengolah bahan mentah dan setengah jadi, serta strategi pemasaran yang baik, seperti pengemasan yang menarik, variasi produk untuk memenuhi segmen pasar, maupun integrasi dengan jenis usaha lain yang dikelola oleh KUPS atau KPS dalam perencanaan IAD dan Rencana Pembangunan Daerah.

H. Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) PS di Kabupaten Madiun

Selain survei, salah satu cara pengumpulan data pada studi ini adalah dengan melakukan *focus group discussion* (FGD) yang salah satu tujuannya adalah untuk mengumpulkan data tentang Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) dari areal PS. Di Kabupaten Madiun, FGD dilakukan sebanyak lima kali dan merekam informasi NTE dari dua belas KPS yang perwakilannya hadir pada setiap sesi FGD. Jumlah keseluruhan NTE yang terekam pada rangkaian FGD di Kabupaten Madiun adalah sebesar Rp8,399,037,000 dari 10 KPS yang dilakukan FGD.

Tabel 18. Hasil perhitungan nilai transaksi ekonomi KPS di Kabupaten Madiun

Kecamatan	Nama KPS dan Komoditas	Nilai Transaksi Ekonomi (Rp)/tahun
Wonoasri	LD Ngadirejo Sejahtera	1.880.000.000
	Padi	1.820.000.000
	Singkong	60.000.000
	LD Wonorejo Asri	282.200.000
	Padi	84.000.000
	Singkong	35.000.000
	Jagung	60.000.000
	Kates (pepaya)	97.200.000
	Kacang tanah	6.000.000
	LD Jati Mulyo	210.500.000
	Singkong pabrik	52.500.000
	Singkong konsumsi	105.000.000
	Jagung	45.000.000
	Kacang tanah	8.000.000
Pilangkenceng	LD Wono Lestari	155.000.000
	Jagung	140.000.000
	Singkong	15.000.000
	LD Wono Mulyo	1.200.175.000
	Jagung	175.000
	Singkong	1.200.000.000
Saradan	LD Sumberbendo Sumber Wono Mulyo	3.710.000.000
	Porang	990.000.000
	Jagung	2.720.000.000
	Padi	60.000.000

Kecamatan	Nama KPS dan Komoditas	Nilai Transaksi Ekonomi (Rp)/tahun
Dagangan	LD Nglengko Makmur Sejahtera	166.910.000
	Porang	70.000.000.00
	Jengkol	15.000.000.00
	Alpukat	2.160.000.00
	Cengkeh	75.000.000.00
	Kopi	4.750.000.00
	LD Wonorejo II	31.400.000
	Porang	25.000.000.00
	Kapulaga	4.000.000.00
	Kopi	2.400.000.00
Kare	LD Tani Subur	140.000.000
	Kopi	140.000.000
	LD Wilis Sejahtera	528.352.000
	Kopi <i>roasted</i> (Belanda & Filipina)	33.552.000
	<i>Green bean</i> (Ponorogo)	130.000.000
	Bubuk kemasan (pasar lokal)	364.800.000
	Bubuk kiloan (Semarang)	22.500.000
	Alpukat	4.500.000
	Aren (kolang kaling mentah)	7.500.000
Jumlah		8.399.037.000

Dari 10 KPS yang terlibat dalam FGD di Kabupaten Madiun (Tabel 18), NTE sebesar Rp8.399.087.000/tahun atau rata-rata sekitar 839.903.7000/KPS/tahun. Ada dua representasi KPS, yaitu LD Sumber Wilis di Kecamatan Dagangan dan LD Kare Makmur di Kecamatan Kare, yang belum memiliki pendapatan dari PS. LD Sumber Wilis belum memiliki pendapatan karena berada di kawasan lindung dan areal PS yang mereka kelola masih didominasi oleh aset milik Perhutani. Masyarakat lebih memilih untuk menggunakan areal PS yang mereka kelola untuk memperoleh pakan ternak. Kemudian LD Kare Makmur saat ini baru mulai menanam kopi dan alpukat di areal PS yang mereka kelola dan belum memiliki hasil panen.

Secara keseluruhan, pendapatan gabungan seluruh responden dari areal PS maupun luar areal PS adalah sebesar Rp2.451.718.000 per tahun atau Rp24,036,451 per bulan. Jika dibagi per responden, maka pendapatannya adalah sebesar Rp2,003,038 per keluarga. Garis kemiskinan di Madiun pada tahun 2025 adalah sebesar Rp476.506 per orang per bulan atau Rp1.906.024 per keluarga per bulan (asumsi satu keluarga terdiri dari 4 orang). Pendapatan rata-rata keseluruhan responden berada di atas garis kemiskinan sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden tidak miskin.

Pada studi ini juga dilakukan perbandingan antara desa yang terdapat KPS dan KUPS dengan angka IDM (Indeks Desa Membangun), dengan fokus pada desa yang mempunyai produk komoditi unggul yang telah diolah menjadi produk setengah jadi, produk jadi, serta bahan jadi. Dari 17 KPS dan KUPS maka didapatkan desa-desa yang mempunyai produk komoditi unggul, yaitu Desa Kare, Kepel dan Bodag dengan produk kopi, yang telah diolah bahkan di ekspor ke Filipina dan Belanda. Kemudian Desa Sumberbendo dengan produk komoditi porang.

Di dalam Indeks Desa Membangun (IDM) terdapat 5 status desa, (<https://idm.kemendesa.go.id/view/detil/1/tentang-idm>), yaitu:

1. Desa Sangat Tertinggal (nilai IDM < 0,491).
2. Desa Tertinggal (nilai IDM > 0,491 dan < 0,599).
3. Desa Berkembang (nilai IDM > 0,599 dan < 0,707).
4. Desa Maju (nilai IDM > 0,707 dan < 0,815).
5. Desa Mandiri (nilai IDM > 0,815).

Untuk melakukan penilaian terhadap status desa didasarkan pada 3 komponen (<https://idm.kemendesa.go.id/view/detil/1/tentang-idm>), yaitu:

i. Dimensi Ketahanan Sosial

Dimensi ini mencakup aspek kesehatan, pendidikan, modal sosial, dan pemukiman. Beberapa indikator yang diukur antara lain akses terhadap fasilitas kesehatan, angka partisipasi sekolah, solidaritas sosial, serta kualitas perumahan dan lingkungan.

ii. Dimensi Ketahanan Ekonomi

Dimensi ekonomi meliputi keragaman produksi masyarakat desa, perdagangan, akses kredit dan lembaga ekonomi, serta keterbukaan wilayah. Indikator yang digunakan misalnya keragaman komoditas unggulan, keberadaan pasar desa, akses ke lembaga keuangan, serta ketersediaan jalan dan transportasi.

iii. Dimensi Ketahanan Ekologi/Lingkungan

Dimensi ini berfokus pada kualitas lingkungan, potensi rawan bencana, dan tanggap bencana. Beberapa indikator yang diukur yaitu kualitas air, udara, dan lahan, potensi bencana alam, mitigasi bencana, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Di Kabupaten Madiun desa-desa yang terdapat KPS, semuanya berada dalam 2 status, yaitu Mandiri dan Maju, tidak ada yang berada pada status Berkembang, Tertinggal, dan Sangat Tertinggal. Dari data IDM dari Kementerian Desa Kare, Desa Kepel, dan Desa Bodag berada pada status **Mandiri**, sedangkan Desa Sumberbendo berada pada status **Maju**. Untuk rinciannya bisa dilihat pada Tabel 19.

Tabel 19. Status IDM desa dengan produk unggulan KPS di Madiun

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Status IDM	Nama KPS	Produk Unggulan
Jawa Timur	Madiun	Kare	Kare	Mandiri	LPHD Kare Makmur	Kopi
Jawa Timur	Madiun	Kare	Kepel	Mandiri	LPHD Tani Makmur	Kopi
Jawa Timur	Madiun	Kare	Bodag	Mandiri	LD Wilis Sejahtera	Kopi
Jawa Timur	Madiun	Saradan	Sumberbendo	Maju	LD Sumberbendo Sumber Wono Mulyo	Porang

Dari data di atas dapat dibangun analisis bahwa terdapat kaitan positif keberadaan KPS dan KUPS dengan status IDM. Dengan penilaian status IDM berdasarkan 3 komponen, yaitu dimensi sosial,

ekonomi, dan lingkungan selaras dengan tujuan PS yaitu untuk penurunan kemiskinan, peningkatan ekonomi, dan perbaikan lingkungan, maka status 4 desa (Maju dan Mandiri) tersebut didukung oleh keberadaan KPS dan KUPS, meskipun perlu dilakukan pengukuran lebih detail dan mendalam untuk hal ini.

Dari analisis terhadap data di atas, kemudian dilakukan juga wawancara mendalam, maka di Kabupaten Madiun terdapat KPS *role model*, yang dapat menjadi contoh maupun inspirasi untuk tata kelola KPS dan KUPS yang baik. Dapat dirangkum beberapa pembelajaran untuk menggambarkan apa saja faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan KPS ini, untuk detailnya lihat Tabel 20.

Tabel 20. KPS *role model* dan faktor-faktor yang memengaruhi di Madiun

Nama KPS	Tata Kelola Kelembagaan	Tata Kelola Kawasan	Tata Kelola Usaha
LD Wilis Sejahtera (komoditi kopi)	Memiliki RKPS dan KUPS; pengurus dan anggota aktif; ketua KPS dan KUPS aktif menggalang dukungan dari berbagai pihak serta aktif mencari pasar bagi produk komoditi	Tanaman kopi ditanam sesuai kondisi iklim, ketinggian; kondisi tanah sesuai dengan jenis kopi; jenis bibit kopi adalah kopi lokal (adaptif dengan ekosistem) dan unik (jenis kopi Robusta lokal).	Pengolahan kopi secara tradisional; memiliki mitra usaha; pencatatan produksi, dan penjualan dilakukan dengan baik.
LD Sumberbendo Sumber Wono Mulyo (komoditi porang)	Memiliki KUPS; pengurus dan Anggota aktif; ketua KPS aktif bersama anggota mengelola lahan PS	Kondisi tanah sesuai dengan jenis porang; jenis bibit sesuai dengan kondisi tanah; petani mengembangkan pembibitan porang secara mandiri (porang tidak panen habis, disisakan untuk pembibitan)	Memiliki mitra usaha; pengolahan porang dilakukan secara tradisional (pembuatan cip diiris secara manual dan dikeringkan menggunakan matahari).

I. Analisis SWOT KPS di Kabupaten Madiun

Untuk mendapatkan gambaran lebih holistik dan komprehensif, tim studi melakukan analisis SWOT untuk PS di Kabupaten Madiun, agar dapat melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Untuk detail hasil SWOT bisa dilihat pada Tabel 21.

Tabel 21. Analisis SWOT KPS di Madiun

Eksternal	OPPORTUNITIES 1. Perpres 28 tahun 2023 tentang percepatan pengelolaan PS yang melibatkan 12 Kementerian dan Lembaga, dan BUMN, sehingga memperluas peluang kemitraan dan dukungan bagi KPS dan KUPS. 2. Permen LHK No 4 tahun 2023 tentang KHDPK yang memberikan pengakuan legal terhadap petani untuk akses kawasan hutan.	THREATS 1. Masih terdapat aset Perhutani, sehingga tidak seluruh areal PS/Hutan Desa dikelola KPS dan KUPS, dan masih terdapat anggota KPS belum mempunyai lahan garapan. 2. Kondisi lahan PS rata-rata kering dan ketersediaan air tergantung pada hujan. 3. Ancaman hama dan penyakit tanaman berdampak pada gagal panen dan penurunan pendapatan petani.
-----------	---	--

Internal	3. Adanya Master Plan IAD yang sudah ditanda tangani oleh Dirjen Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan, yang diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). 4. Beberapa produk PS berkualitas baik, dan mempunyai pasar antar Provinsi, dan di ekspor (porang dan kopi). 5. Sektor kehutanan, bersama pertanian dan peternakan merupakan penyumbang PAD yang signifikan. 6. Dilibatkan KPS dan KUPS dalam kegiatan rehabilitasi, dan dukungan dari Pemerintah Desa melalui program nasional, seperti pendirian koperasi dan irigasi. 7. Tumbuhnya kebutuhan pasar nasional dan internasional untuk produk petani PS dan organik. 8. Pasar digital, yang mudah dan murah di akses petani di desa (Tokopedia, Shopee, Tiktok, dll)	4. Sebagian besar petani dan pemasaran hasil pertanian tergantung pengepul dengan perbedaan harga cukup besar.
STRENGTHS 1. Petani mendapatkan pengakuan legal berupa SK Hutan Desa dari Kementerian Kehutanan. 2. Terbentuk beberapa KUPS untuk pengelolaan komoditi PS. 3. Anggota KPS dan KUPS mempunyai pengetahuan dalam pengelolaan lahan, dan keterikatan budaya dengan lahan. 4. Pola agroforestri atau wana tani merupakan sistem dan budaya petani. 5. Antar anggota KPS dan KUPS mempunyai ikatan yang kuat, sebagai modal sosial dalam pengelolaan lembaga.	STRATEGIS-O 1. Pengembangan peningkatan produk PS sesuai dengan Master Plan IAD dan Rencana Pembangunan Daerah. 2. Pengembangan nilai tambah dan diversifikasi produk PS. 3. Meningkatkan keterampilan promosi dan pemasaran, baik dengan metode <i>canvassing</i> maupun memanfaatkan pasar digital. 4. Melakukan analisis pasar, terutama untuk produk-produk yang telah diolah setengah jadi dan jadi, dan telah dipasarkan ke luar Provinsi dan ekspor. 5. Memperkuat kolaborasi	STRATEGIS-T 1. Membangun kesepakatan tata kelola lahan dan pembagian manfaat PS antar anggota KPS dan desa. 2. Bersama dengan CDK mendorong kepastian pengelolaan aset Perhutani. 3. Membangun program bersama dengan pemerintah desa untuk pengairan lahan PS. 4. Pengembangan sistem pengendalian hama dan penyakit tanaman, serta pupuk organik. 5. Penggalakan dan perluasan areal rehabilitasi, termasuk di Daerah Aliran Sungai (DAS). 6. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan

6. Mempunyai pendamping dari CDK, dan mempercepat dan mempermudah komunikasi tentang kebijakan pemerintah.	antar KUPS membentuk ekosistem usaha.	lembaga KPS dan KUPS. 7. Penguatan kerja sama dengan BPDAS atau Balai Sungai Kemen PU untuk rehabilitasi, termasuk pengelolaan sungai dan waduk.
WEAKNESS 1. Keterampilan pengelolaan keuangan KUPS masih lemah, belum ada pencatatan yang baik. 2. Keterampilan nilai tambah produk dan promosi pemasaran masih lemah. 3. Sistem tata kelola lahan PS untuk kombinasi tanaman pertanian dengan kehutanan belum berjalan dengan baik, bahkan masih tahap perencanaan (sistem <i>plong-plongan</i>). 4. Pengelolaan HHBK, seperti madu oleh KUPS masih memadai untuk pemasaran, baru tahap konsumsi sendiri. 5. Masih tergantungnya petani pada pengepul. 6. Belum terbentuknya jaringan belajar dan kolaborasi antar petani pengelola Hutan Desa. 7. Terdapat <i>local champion</i> seperti porang dan kopi, namun membutuhkan peningkatan dukungan.	STRATEGI W-O 1. Memperkuat keterampilan KUPS dalam pencatatan keuangan, untuk memperkuat akuntabilitas. 2. Perluasan pasar komoditi PS bekerjasama dengan Pemkab, Pemkot, dan Pemprov, dalam pengembangan IAD dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). 3. Peningkatan nilai dan diversifikasi produk, untuk menjangkau pasar lebih luas. 4. Mengembangkan kualitas dan nilai tambah produk setengah jadi dan jadi, dan perluasan segmen pasar. 5. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian, lembaga dan BUMN. 6. Pengembangan jenis-jenis tanaman di areal PS, baik kayu dan non-kayu 7. Memfasilitasi <i>local champion</i> , sebagai <i>role model</i> dan inspirasi bagi KPS yang lain, serta pembentukan jaringan belajar antar KPS.	STRATEGI W-T 1. Memperkuat kohesi sosial dan kearifan lokal dalam pengelolaan lahan. 2. Membangun kemitraan dengan <i>off-taker</i> atau mitra usaha dengan petani untuk memutus mata rantai ketergantungan dengan pengepul. 3. Aktif mengikuti kegiatan-kegiatan promosi usaha kecil dan menengah oleh Pemerintah dan berbagai lembaga. 4. Membangun jaringan dengan asosiasi atau organisasi yang mendukung usaha kecil dan menengah, serta jaringan belajar antar KPS dan KUPS. 5. Penguatan sistem pertanian organik dan bibit lokal. 6. Pengembangan tata kelola lahan kering, dengan pendekatan kearifan lokal.

Berdasarkan analisis SWOT pada Tabel 21, strategi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dan tata kelola di Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan dan pengembangan komoditi PS sesuai dengan Master Plan IAD yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), hal ini berpotensi melakukan percepatan terhadap penguatan pengelolaan PS, dan akan memberikan kontribusi bagi Pembangunan Daerah, yang pada gilirannya akan mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Madiun. Seperti diketahui, areal PS di Kabupaten Madiun dibagi dalam 3 klaster yang semuanya terintegrasi juga dengan berbagai macam program pedesaan, ekowisata, dan jasa ekosistem.
2. Pengembangan jenis tanaman di areal PS, dengan sistem wanatani, dengan menggali pengetahuan-pengetahuan lokal atau agroforestri tradisional, sehingga akan memberikan sumber penghasilan beragam dan sumber pendapatan tambahan bagi petani.

3. Peningkatan nilai tambah bagi berbagai produk PS, termasuk yang sudah setengah jadi dan jadi. Perhatian khusus bisa diberikan kepada porang dan kopi, karena merupakan jenis porang terbaik dan kopi telah mempunyai pasar antar provinsi dan internasional. Hal ini akan berpotensi menjadi contoh atau *local champion* PS bagi Kabupaten Madiun.
4. Sumber penghasilan petani anggota KUPS dan KPS adalah yang bisa dikonsumsi dan dijual, dengan tata kelola lembaga yang baik, termasuk pencatatan keuangan yang baik, akan mampu mendukung petani membangun perencanaan kelola usaha berkelanjutan.
5. Peningkatan kerjasama kemitraan dengan berbagai Kementerian, Lembaga, dan BUMN, seperti peningkatan kapasitas, pengembangan keterampilan, bahkan perluasan pasar dan jaringan. Selain itu juga membangun rekognisi dari berbagai pihak terhadap produk PS melalui beragam sertifikasi, seperti PIRT, NIB, Label Halal, dan BPOM, bahkan sertifikat organik.

Strategi untuk mengurangi ancaman melalui kekuatan KPS dan KUPS di Kabupaten Madiun adalah:

1. Membangun kesepakatan tata kelola lahan dan pembagian manfaat PS antar anggota KPS serta desa, sehingga pengelolaan PS memperbesar peluang kolaborasi antar masyarakat. Pengelolaan lahan, sebagai bagian dari pengelolaan ekosistem tidak terlepas dengan pengelolaan lingkungan sosial, sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan, di mana terdapat kesinambungan antara sosial dan lingkungan. Terdapat 6 komponen pengelolaan lingkungan sosial yang berkesinambungan dengan pengelolaan lingkungan (Purba, 2002), yaitu pengelompokan sosial (*social grouping*), media sosial (*social media*), pranata sosial (*social institution*), pengendalian sosial (*social control*), penataan sosial (*social alignment*), dan kebutuhan sosial (*social needs*).
2. Bersama dengan CDK sebagai pendamping mendorong kepastian pengelolaan aset Perhutani, karena di beberapa areal KPS terdapat sebagian besar lahan masih terdapat aset Perhutani dan anggota KPS tidak berani mengelolanya, sementara mereka wajib menjadi areal tersebut. Dalam konteks pengelolaan ekologi lanskap atau bentang alam, maka berbagai kepentingan terkait penggunaan lahan yang saling bertentangan, baik terkait fungsi, konservasi, maupun kemanfaatan ekonomi, dapat dibangun kompromi, dengan pendekatan partisipatif (Salim, 2019).
3. Membangun perencanaan kolaborasi dan strategid dengan berbagai pihak, seperti pemerintah desa, BPDAS, dan Balai Sungai untuk berbagai kegiatan untuk optimalisasi pengelolaan lahan. Prinsip pengelolaan PS adalah kolaborasi dengan berbagai pihak dan pemangku kepentingan. Untuk pengelolaan PS, maka KPS dan KUPS dimandatkan untuk merancang perencanaan dalam dokumen Rencana Kerja Umum (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), serta RKPS (Rencana Kelola Perhutanan Sosial), semuanya disusun dengan prinsip perencanaan strategis (Sampurno, 2013) agar manfaat PS, termasuk manfaat ekonomi, dapat berkelanjutan.
4. Peningkatan kapasitas KPS dan KUPS baik untuk pengelolaan kelembagaan, maupun keterampilan sistem pengendalian hama, penyakit tanaman, serta pembuatan pupuk organik, agar hasil atau produk PS lebih optimal, berkualitas, dan mendapatkan akses pasar lebih luas.

Strategi untuk meminimalkan potensi kelemahan dan tantangan pada KPS dan KUPS di Kabupaten Madiun adalah:

1. Memperkuat kohesi sosial dan kearifan lokal dalam pengelolaan lahan, termasuk dalam sistem pertanian organik dan pengayaan bibit lokal. Di Kabupaten Madiun, KPS dan KUPS sangat paham dan terampil melakukan pengelolaan lahan dengan pendekatan agroforestri lokal atau tradisional, karena itu sistem kehidupan mereka. Menurut Abdoellah (2017) sistem agroforestri tradisional merupakan tahap peralihan kontinum alam budaya yang menghubungkan sistem lingkungan alam dan sosial yang dibentuk oleh interaksi proses ekologis dan manipulasi manusia, sehingga sistem ini dapat berfungsi untuk mengurangi kemiskinan, ketahanan pangan, bahkan mengurangi pemanasan global.

2. Pengembangan tata kelola lahan kering, karena sebagian areal PS, merupakan lahan kering. Pengelolaan lahan kering dapat dilakukan melalui konservasi, peningkatan kesuburan kimiawi, fisik dan biologi, pengelolaan bahan organik, dan irigasi suplemen (Sallata, 2019).
3. Membangun kemitraan dengan berbagai pihak, seperti *off-taker*, mitra usaha, jaringan dan asosiasi yang mendukung usaha kecil dan mikro, yang salah satu tujuannya adalah memutus mata rantai ketergantungan petani dengan pengepul.

J. Persepsi Masyarakat terkait Perhutanan Sosial

Secara umum pelaksanaan PS di bawah kebijakan Permen LHK Nomor 4 tahun 2023 tentang KHDPK masih membutuhkan sosialisasi, perencanaan dan koordinasi terutama antara KPS dengan pendamping, dan penyesuaian dengan pelaksanaan sesuai dengan kondisi di lapangan. Jika dihitung rentang waktu antara peluncuran Permen LHK dengan pelaksanaan studi *baseline* ini di tahun 2025, sementara problematika tata kelola hutan di Jawa sangat kompleks, maka persepsi masyarakat terutama anggota KPS tentang Perhutanan Sosial umumnya sederhana.

Dari komunikasi dengan informan dan analisis terhadap jawaban responden, secara umum mereka merasakan perbedaan mendasar sebelum dan sesudah mendapatkan persetujuan PS (Skema Hutan Desa), yaitu PS memberikan kepastian atas hak kelola mereka atas kawasan hutan, di mana sebelumnya mereka seperti “orang asing” di kampung sendiri. “*Kami tidak lagi takut-takut mengelola lahan, bisa tenang menanam padi*”, pernyataan Pak Rian Ketua Lembaga Desa Ngadirejo Sejahtera (wawancara 18 November 2025).



Gambar 22. Wawancara dengan Pak Rian Ketua LD Ngadirejo Sejahtera, 18 November 2025

Meskipun demikian, mereka memahami akan ada kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan dan ada permasalahan aset Perhutani di areal Hutan Desa yang harus diselesaikan. Anggota KPS berharap dengan adanya pendampingan dan bimbingan dari CDK Madiun dan dukungan FPV, permasalahan-permasalahan tersebut dapat diurai satu per satu dan diselesaikan.

Berikut beberapa persepsi umum masyarakat terhadap Perhutanan Sosial:

- PS adalah program pemerintah agar masyarakat dapat mengelola lahan untuk bertani.
- PS akan memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada masyarakat untuk mengelola lahan dengan baik, seimbang antara kesejahteraan dan kelestarian lingkungan.
- Memberikan rasa aman dan lebih nyaman dalam mengelola lahan.
- Melalui PS dan anggota KPS dapat diikut sertakan dalam program rehabilitasi lahan.
- Meskipun masih baru mendapatkan persetujuan PS, tapi kami sudah senang bisa menanam tanaman, sesuai pekerjaan kami sebagai petani.
- PS memberikan pelajaran kami untuk berorganisasi, seperti pembentukan KUPS, dan bisa mengakses bantuan pemerintah.



Gambar 23. Bibit untuk rehabilitasi lahan bantuan dari BPDAS Berantas Sampean untuk KPS



Gambar 24 Penanaman padi gogo di Desa Sumberbendo, Kecamatan Saradan

Berdasarkan hasil survei dan wawancara, persepsi masyarakat terhadap PS berdasarkan tata Kelola PS dapat dilihat pada Tabel 22.

Tabel 22. Persepsi masyarakat terhadap Perhutanan Sosial berdasarkan tematik di Madiun

Tema	Sebelum Persetujuan	Sesudah Persetujuan
Tata Kelola Kawasan/Lahan	Merasa tidak mempunyai hak, karena kawasan hutan dikelola oleh Perhutani	Merasa memiliki hak, karena mempunyai SK dari Kementerian
	Tidak memahami ada fungsi-fungsi hutan, dan batas-batasnya	Mengetahui ada tata batas kawasan hutan, dan fungsi hutan untuk lindung
	Belum ada perencanaan pengelolaan lahan, semua tanaman pertanian	Mulai membuat perencanaan untuk menanam kayu, seperti “ <i>plong-plongan</i> ”, dan rehabilitasi
	Tidak ada beda antara tanaman masyarakat dengan aset Perhutani	Saat sekarang sudah mengetahui di mana area kelola masyarakat, dan mana aset Perhutani
Tata Kelola Usaha	Belum ada rencana usaha, terutama rencana kelompok, karena belum ada KUPS	Sudah mempunyai rencana usaha kelompok, dan telah membentuk KUPS
	Mempunyai keinginan untuk peningkatan nilai produk, tapi tidak mengetahui bagaimana caranya?	Sekarang mempunyai tempat konsultasi untuk peningkatan produk, yaitu pendamping, CDK, dan sekarang FPV
	Tidak berani mengembangkan jenis-	Sudah bisa menanam berbagai jenis

Tema	Sebelum Persetujuan	Sesudah Persetujuan
	jenis tanaman, karena khawatir tidak menikmati hasilnya	tanaman, seperti pepaya
	Ada keinginan untuk mengembangkan tanaman kopi dengan ekowisata, namun belum mempunyai akses legal	Dapat mengembangkan, bahkan terlibat dalam perencanaan agroforestri dan ekowisata melalui IAD (<i>Integrated Area Development</i>)
Budidaya Tanaman/Silvikultur	Hanya menanam tanaman untuk konsumsi atau sejenis saja	Mengembangkan berbagai jenis tanaman dalam satu areal, seperti jagung dengan alpokat, ubi dan sayur-sayuran, porang dan kayu
	Sumber air hanya berharap dari tadah hujan dan waduk	Membangun rencana untuk sumber air dengan dukungan dari Dana Desa
	Tidak punya sumber bantuan bibit untuk rehabilitasi lahan	Mendapatkan bantuan dari BPDAS untuk rehabilitasi lahan kritis di areal Perhutanan Sosial
Tata Kelola Kelembagaan	Belum ada KPS, struktur pengelolaan Lembaga Desa	Terbentuk KPS dan Lembaga Desa yang mendapatkan akses legal untuk pengelolaan lahan, mempunyai keanggotaan dan pengurus
	Belum ada kegiatan dan peningkatan kapasitas untuk pengelolaan lembaga dan lahan	Mendapatkan pengetahuan dan peningkatan keterampilan dalam pengelolaan Lembaga Desa, terutama oleh CDK
	Tidak mempunyai kepercayaan diri untuk berkomunikasi karena tidak ada lembaga	Mempunyai kepercayaan diri untuk berkomunikasi dengan pihak CDK dan pemerintah, karena mempunyai organisasi yang disahkan oleh negara



Gambar 47. Sekretariat Lembaga Desa Jati Mulyo, Desa Jati Mulyo.

K. Masukan terhadap FPV

Pelaksanaan Perhutanan Sosial, agar berjalan dengan baik, maka dibutuhkan kerja sama yang baik antara petani yang mendapatkan persetujuan Hutan Desa di Kabupaten Madiun, dengan berbagai

macam pihak. Terdapat dukungan dan bantuan dari Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, FAPE (Fasilitas Agroforestri Pangan dan Energi), dan Kebun Bibit Rakyat (KBR). Untuk detail lihat Tabel 23.

Tabel 23. Dukungan dan bantuan untuk Perhutanan Sosial di Kabupaten Madiun

Program/ Bantuan	Bentuk Program/Bantuan	Tahun	KPS/KUPS Penerima Program	Desa	Kecamatan
Kementerian Kehutanan	Alat ekonomi produktif (roaster, grinder, puper, alat pengemas kopi sachet, continuous sealer)	Dalam proses pengadaan	KUPS Kopi Selo Gedong (LD Wilis Sejahtera)	Bodag	Kare
Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Alat ekonomi produktif (huller, roaster, dan grinder kopi, serta mesin pemotong rumput)	2025	LPHD Kare Makmur	Kare	Kare
	Alat ekonomi produktif (huller kopi)	2025	LPHD Tani Subur	Kepel	Kare
FOLU Net Sink	Pembibitan	2025	LD Tulung Wono Makmur	Tulung	Saradan
	Penanaman bibit	2025	LPHD Jati Mulyo Pinunjul	Klumutan	Saradan
	Penanaman bibit (agroforestri)	2025	LD Sumber bendo Sumber Wono Mulyo	Sumberbendo	Saradan
	Rehabilitasi hutan	2025	LD Wono panguripan	Mendak	Dagangan
	Rehabilitasi hutan	2025	LD Ngadirejo Sejahtera	Ngadirejo	Wonoasri
	Rehabilitasi hutan	2025	LD Jati Mulyo	Sidomulyo	Wonoasri
	Rehabilitasi hutan	2025	LD Wonorejo Asri	Plumpungrejo	Wonoasri
	Rehabilitasi hutan	2025	LD Tani Mulyo	Kebonagung	Mejayan
	Penyiapan dan pengembangan Perhutanan Sosial	2024	LD Wono Mulyo	Luworo	Pilangkenceng
FAPE (Fasilitas Agroforestri Pangan dan Energi) 2025 - (BPS) Yogyakarta	Penanaman bibit	2025	LD Sumberbendo Sumber Wono Mulyo	Sumber bendo	Saradan
KBR (Kebun Bibit Rakyat) - BPDAS Solo	Pembibitan	2024	LD Tulung Wono Makmur	Tulung	Saradan



Gambar 25. Plang informasi program FAPE di areal LD Sumberbendo Sumber Wono Mulyo

Studi ini juga memberikan pertanyaan kepada responden dalam bentuk kuesioner dan melakukan pendalaman melalui FGD serta wawancara ke responden. Berikut adalah masukan dari informan dan responden berdasarkan apa saja yang dimiliki mereka dan apa yang dibutuhkan untuk peningkatan tata kelola PS dan peningkatan manfaatnya bagi anggota KPS maupun desa (Tabel 24)

Tabel 24. Masukan anggota KPS untuk peningkatan tata kelola dan manfaat PS berdasarkan tematik/isu di Madiun

Tematik	Keterampilan yang dimiliki saat ini	Keterampilan yang dibutuhkan
Budidaya tanaman dan peternakan	Penanaman dan pengelolaan tanaman Porang	Pelatihan untuk pengelolaan tanaman Porang lebih baik
	Pengelolaan lebah madu trigona, namun masih dikonsumsi sendiri atau kelompok	Dukungan untuk penambahan kotak lebah madu trigona, dan pengelolaannya
	Pengelolaan tanaman kopi	Pengelolaan tanaman kopi agar hasilnya lebih berkualitas
	Mengelola lahan pertanian secara tradisional	Ketrampilan agar tanah bisa subur, misal pupuk organik, dan tata kelola panen yang baik
Pengelolaan Produk	Membuat cip (irisian dari umbi Porang yang telah dikeringkan, namun masih mengandung racun dan belum bisa dikonsumsi)	Membutuhkan dukungan keterampilan, juga alat, untuk menghilangkan racun dari Porang, dan mengolah berbagai produk turunan
	Pengolahan madu trigona untuk layak konsumsi sendiri atau kelompok	Dukungan untuk peningkatan kualitas madu trigona, dari sisi kesehatan, kadar air, dan sertifikasi
	Pengolahan biji kopi	Mengolah biji kopi agar meningkat rasanya, dan kemasan yang bagus dan tahan lama
	Di panen secara tradisional	Tata cara panen yang baik, sehingga tidak banyak barang yang rusak dan mengurangi nilai
Pemasaran	Hanya memasarkan <i>cip</i> dan Porang mentah saja	Keterampilan membuat kemasan dan peningkatan produk Porang agar meningkatkan nilai jualnya

	Pasar tersedia, tapi belum bisa dicukupi	Dukungan untuk alat pengolahan kopi, untuk mencukupi permintaan pasar
	Menjual hasil panen pertanian langsung ke pengepul atau pasar	Keterampilan hasil panen dapat dijual dengan harga lebih baik, semisal dikelola oleh KPS atau Lembaga Desa

Secara khusus dan mendalam, anggota KPS memberikan masukan terhadap FPV, terutama untuk perbaikan pengelolaan areal PS dan untuk peningkatan manfaat ekonomi sebagai berikut:

- FPV jarang berkunjung ke lokasi kami, mohon agar bisa melakukan sosialisasi, sehingga bisa lebih mengetahui tentang FPV.
- Berharap agar fasilitator FPV sering ke lapangan dan tidak hanya memberikan pelatihan tapi juga dukungan alat ekonomi produktif dan permodalan bergulir.
- Membutuhkan bantuan untuk pembuatan sumur, karena pertanian dan perkebunan mengandalkan air hujan (tadah hujan), dan jika musim kemarau tanah kering dan waduk kering.



Gambar 26. Waduk di Wonoasri, dipergunakan masyarakat untuk mengairi sawah dan perkebunan, pada musim kering, masyarakat menanam padi di pinggir waduk

- Memberikan pelatihan untuk peningkatan keterampilan mengolah porang, juga untuk menghilangkan racun dari porang.
- Pelatihan pengolahan dan pemasaran produk-produk PS agar bernilai ekonomi tinggi yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan rumah tangga.
- Apakah FPV bisa memberikan bantuan perbaikan akses jalan, atau mendorong agar ada pihak yang dapat memberikan bantuan tersebut? Karena akses jalan ini dibutuhkan agar pengangkutan hasil pertanian lebih mudah dan lancar.
- Pelatihan pengelolaan Lembaga Desa dan KUPS karena kami belum memahami dengan baik bagaimana organisasi ini, dengan kebijakan baru KHDPK.
- Membantu penyelesaian aset-aset Perhutani di areal Perhutanan Sosial, seperti tegakan pohon jati.



Gambar 27. Kondisi jalan untuk angkutan hasil pertanian di Kecamatan Pilangkenceng

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

Studi *baseline sosio-ekonomi* rumah tangga KPS di Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur bermaksud untuk menyediakan data dasar pendapatan rumah tangga khususnya yang berasal dari areal PS sebagai *baseline* alat ukur dalam melihat peningkatan ekonomi dari implementasi proyek FPV. Salah satu indikator keberhasilannya adalah peningkatan pendapatan rumah tangga dari areal PS 15% setelah masa FPV berakhir.

Studi *baseline* ini dilakukan bulan November dan Desember 2025 dengan metode kualitatif dan kuantitatif sederhana. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder dan primer. Data sekunder berupa: profil KPS, laporan, hasil studi dan publikasi terkait PS di dua kabupaten tersebut yang diperoleh dengan pengumpulan langsung dan penelusuran internet. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner untuk 102 responden yang diambil menggunakan teknik *purposive sampling* sebanyak 6 responden per masing-masing KPS dari 17 KPS di Kabupaten Madiun. Pemilihan responden dengan kriteria responden (1) aktif mengelola areal PS (2) telah berhasil membuat produk, (3) memiliki produk unggulan. Selain penyebaran kuesioner, data primer juga diambil dari Diskusi Kelompok terpimpin sebanyak 5 kali, wawancara mendalam dengan informan kunci dan juga observasi lapangan. Adapun sumber pendapatan dari areal PS dihitung berdasarkan (1) komoditas yang dikonsumsi sendiri dan (2) komoditas yang dijual. Komoditas yang dikonsumsi sendiri berupa tanaman pangan, tanaman buah-buahan, kacang-kacangan, sayuran, rempah-rempah dan obat-obatan. Sedangkan Sumber pendapatan dari komoditas yang dapat dijual umumnya adalah tanaman tahunan di antaranya kopi, alpukat, porang, padi, sayuran dan umbi-umbian.

Hasil survei menemukan bahwa data dasar rata-rata pendapatan rumah tangga KPS yang berasal dari areal PS di Kabupaten Madiun adalah sebesar **Rp6.752.658/keluarga/tahun** atau **Rp1,120,489/KK/bulan**. Sedangkan pendapatan rata-rata rumah tangga KPS yang berasal dari lain-lain (areal non-PS) adalah **Rp7.973.412/tahun** atau **Rp664.451/bulan**. Sehingga *baseline* pendapatan rumah tangga anggota KPS di Kabupaten Madiun sebesar **17,343,246/KK/tahun** atau **Rp2,019,913/KK/bulan**. Hal ini menunjukkan bahwa PS sangat penting bagi sumber pangan dan sumber pendapatan anggota KPS. Di Kabupaten Madiun, kontribusi pendapatan yang berasal dari areal PS adalah sebesar 55,94% sementara dari non-areal PS 44,06%. Ringkasan *baseline* pendapatan rumah tangga KPS di Kabupaten Madiun dapat dilihat pada Tabel 25.

Tabel 25. Ringkasan *baseline* data pendapatan rumah tangga petani KPS berdasarkan Kabupaten

No	Jenis Pendapatan	Kabupaten Madiun		
		Total (Rp/tahun)	Per tahun/KK	Per bulan/KK
1	Pendapatan dari konsumsi sendiri	704,067,000	6,902,618	575,218
2	Pendapatan dari komoditas dijual	688,067,000	6,745,755	562,146
Pendapatan kotor dari PS		1,392,134,000	13,648,373	1,137,364
Biaya produksi		20,656,000	202,510	16,876
Pendapatan dari PS		1,371,478,000	13,445,863	1,120,489
3	Pendapatan luar PS	1,080,240,000	10,590,588	882,549
Grand Total		2,451,718,000	24,036,451	2,003,038

Berdasarkan garis kemiskinan yang dari BPS Madiun, penduduk yang masuk dalam garis kemiskinan adalah yang berpenghasilan kurang atau sama dengan Rp476.506 per orang per bulan, atau 1.906.024 per rumah tangga (asumsi ukuran rumah tangga 4 orang). Pendapatan rata-rata rumah tangga di Madiun adalah sebesar Rp2.003.038/KK/bulan atau Rp500.759/Kapita/per bulan, maka pendapatan rumah tangga KPS termasuk dalam kategori tidak miskin. Di luar pendapatan tersebut, masih terdapat lagi sumber-sumber pendapatan yang tidak dapat dihitung seperti air, sumber bahan bakar kayu, dan pakan ternak.

Selain dari aspek pendapatan, kategori miskin dan tidak miskin dapat dilihat dari aspek pendidikan dan rumah yang dimiliki. Rata-rata kepemilikan rumah bagi anggota KPS di Madiun terkategori permanen dan semi permanen. Kepemilikan rumah sederhana sangat kecil di bawah 20 persen. Sementara untuk pendidikan, mayoritas pendidikan di Kabupaten Madiun adalah tamat SMA.

Secara ekonomi, anggota KPS di Kabupaten Madiun memiliki ketahanan pangan yang kuat dan tersedia di alam, dan anggota KPS mendapatkan manfaat ekonomi lainnya seperti sumber protein hewani, manfaat ekologi karena sumber air dan penyeimbang iklim mikro. Dalam perhitungan pendapatan di atas, manfaat-manfaat ini tidak bisa dihitung nilai moneterinya. Jika terjadi resesi di Indonesia, maka kelompok-kelompok petani KPS di Madiun memiliki daya lenting dibandingkan kelompok masyarakat di kota walaupun pendapatannya mungkin lebih tinggi.

KPS-KPS yang ada di Kabupaten Madiun memiliki kekuatan di mana areal PS sudah mendapatkan izin /persetujuan pengelolaan PS melalui skema Hutan Desa selama 35 tahun. Di areal PS tersebut sudah terdapat tanaman tahunan yang menghasilkan seperti kopi, alpukat, porang, dan tanaman rempah/obat-obatan. Dengan adanya kebijakan Perpres nomor 28 tahun 2023 tentang Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang melibatkan dan mengintegrasikan 12 Kementerian dan Lembaga untuk mempercepat pengelolaan PS, pengembangan usaha dan pendampingan, menjadi kesempatan bagi KPS untuk mendapatkan dukungan infrastruktur ekonomi dari kementerian terkait melalui dinas-dinas, di mana sebelumnya sangat terbatas pada Kementerian Kehutanan. Adanya pendamping dan program FPV, sehingga mendapatkan asistensi dan pelatihan di lapangan yang memberikan pemahaman dan akses pasar ke luar daerah bagi KPS-KPS.

Selain kekuatan dan kesempatan, KPS di Kabupaten Madiun memiliki kelemahan seperti: rendahnya akses modal, minimnya pengetahuan pengolahan produk menjadi bahan setengah jadi dan jadi, dan kurangnya akses pasar baik itu pasar konvensional (pasar *offline*) maupun pasar *online*. Sedangkan yang menjadi ancaman seperti kekeringan.

Keberadaan PS tersebut sangat dirasa manfaatnya bagi masyarakat baik secara ekonomi, penyedia pangan, sumber protein, sumber sayuran dan umbi/karbohidrat, dan sumber-sumber obat-obatan. Keberadaan PS di dua Kabupaten tersebut menjadi sumber pangan karena sebagai sumber beras (padi), ubi, sayuran, dan kopi. Secara ekonomi, areal PS menjadi sumber pendapatan dominan seperti kopi, alpukat, porang dan padi.

Secara umum, mereka sangat senang dengan diberikan izin/persetujuan PS. Hal ini dikarenakan: ada kepastian dalam pengelolaan hutan dan lahan dan mendapatkan pendampingan dalam tata kelola kawasan, tata kelola ekonomi dan tata Kelola kelembagaan. Di samping itu, adanya dukungan dari pemerintah dan FPV dalam peningkatan keterampilan dan wawasan dalam pengelolaan areal PS. Agar ekonomi meningkat, anggota KPS sangat berharap program FPV dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian di PS, pemerintah dapat memperbaiki akses infrastruktur jalan dan air, pengolahan produk pasca panen dan pemasaran.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil survei, FGD, *interview* dan pengamatan di lapangan, data-data dan hasil analisa di atas, maka ada beberapa rekomendasi untuk peningkatan ekonomi rumah tangga KPS di Kabupaten Madiun:

- a) Meningkatkan produktivitas komoditas baik itu yang dikonsumsi sendiri (padi, sayuran, umbi-umbian) maupun yang dijual (kopi, alpukat dan porang). Strateginya memberikan peningkatan pengetahuan petani untuk budidaya tanaman mulai dari dukungan bibit berkualitas, pemupukan, dan pengendalian hama).
- b) Meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan hasil, penambahan nilai tambah dan tata kelola kelembagaan, tata kelola usaha dan tata kelola kawasan.
- c) Perbaiki infrastruktur penyediaan air (sumur) dan jalan untuk sarana angkut produksi PS.
- d) Perbaiki tata kelola pasar meliputi: pengembangan koperasi yang menampung hasil sebagai jembatan ke produsen, menjembatani penjualan hasil porang ke nasional dan internasional termasuk masuk dalam pasar *online*.

Rekomendasi untuk FPV dan Dirjen PS/BPS adalah:

- a) Melakukan kunjungan dan pelatihan kepada KPS agar pemahaman dalam tata kelola PS meningkat bagi anggota KPS pada kedua Kabupaten di atas.
- b) Masyarakat berharap dapat mendapatkan dukungan berupa alat produksi untuk pengolahan paska panen seperti mesin integrasi pengolah kopi.
- c) Masyarakat membutuhkan bantuan penyelesaian terhadap aset Perhutani yang ada di dalam KPS.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Abdoellah, Oekan S. 2017. *Ekologi Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Awang, S. A., Widayanti, W., & Saharjo, B. H. (2014). *Hutan Rakyat di Indonesia: Konsep, Dinamika, dan Strategi Pengembangan*. Yogyakarta: Debut Press.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun. 2025. *Kabupaten Madiun Dalam Angka: Madiun Regency in Figures 2025, Volume 41, 2025. BPS-Statistics Madiun Regency*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun. 2025. *Kecamatan Kare Dalam Angka: Kare Sub District in Figures 2025, Volume 41, 2025. BPS-Statistic Madiun Regency*.
- Belcher, B., Ruiz-Pérez, M., & Achdiawan, R. (2005). Global patterns and trends in the use and management of commercial NTFPs: Implications for livelihoods and conservation. *World Development*, 33(9), 1435–1452. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2004.10.007>
- Chambers, R., & Conway, G. (1992). *Sustainable rural livelihoods: Practical concepts for the 21st century*. IDS Discussion Paper 296. Brighton: Institute of Development Studies.
- Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan. (2023). IDM : Indeks Desa Membangun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. <https://idm.kemendesa.go.id/view/detil/1/tentang-idm>
- FAO. (2018). *Forest and farm producer organizations: Supporting smallholders and promoting sustainable forestry*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Fatmawati, U. (2019). Analisis pemasaran hasil pertanian dan peran tengkulak terhadap pendapatan petani. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 7(2), 112–123.
- Kartodihardjo, Hariadi, Ismid Hadad (ed.). 2024. *Memulihkan Keanekaragaman Hayati: Ekologi Politik Sumber Daya Alam Indonesia*. LP3ES. Depok.
- Keraf, A. Sonny. 2022. *Ekonomi Sirkuler: Solusi Krisis Bumi*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- Michon, G., & de Foresta, H. (1999). Agroforests: Incorporating a forest vision in agroforestry. In L. Buck, J. Lassoie, & E. Fernandes (Eds.), *Agroforestry in Sustainable Agricultural Systems* (pp. 381–406). CRC Press.
- Pemerintah Kabupaten Madiun. 2025. *Master Plan Pengembangan Kawasan Terpadu (Integrated Area Development) Berbasis Perhutanan Sosial Kabupaten Madiun - Provinsi Jawa Timur*. Kabupaten Madiun.
- Reuter, Thomas, Graeme MacRae. 2024. *Petani Kecil untuk Ketahanan Pangan Global: Kejatuhan dan Penemuan Kembali Sistem Pangan Berdasar Ekologi Moral di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Rohmawati, Ainur Miatu. 2025. Partisipasi Petani Dalam Pengelolaan Hutan Rakyat Di Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. *Jurnal ForestroIndo*, Vol. 2 No. 1, Juni 2025.
- Sallata, M Kudeng, Hunggul Y. S. H. Nugroho. 2019. *Pengelolaan Lahan Kering: Potensi, Fungsi, dan Permasalahan pada Lahan Kering Penyebab Degradasi Lahan, Dampak, Rehabilitasi dan Kebijakannya*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Sampurno. 2013. *Manajemen Strategik: Menciptakan Keunggulan Bersaing yang Berkelanjutan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Sanudin, San Afri Awang. 2019. *Evaluasi Kehutanan Sosial: Tantangan Generasi 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem*. Jakarta.
- Silalahi, M., Santosa, A, Regang, Y, Segapuldes, A. 2023. Penyusunan Data Sosial Ekonomi di Lokasi Forest Program V di Kabupaten Sikka dan Sanggau. Yayasan Kehutanan Masyarakat Indonesia Indonesia/Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat, Bogor , Indonesia

- Siscawati, M. (2017). Community-based forest management in Indonesia: A critical analysis. *Forest Policy and Economics*, 85, 1–9.
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
- Suryanto, P. (2015). Konservasi tanah dan air pada lahan miring menggunakan sistem vegetatif dan mekanik. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 20(1), 25–34.
- Winarto, Bambang. 2019. *Kamus Kehutanan*. IPB Press. Bogor.

Peraturan dan Surat Keputusan

- Perpres Nomor 28 Tahun 2023 tentang Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK)
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa

LAMPIRAN

Lampiran 1 Panduan Wawancara (*interview Guide*)

PENYUSUNAN *BASELINE* PENDAPATAN MASYARAKAT PADA KPS DI LOKASI FOREST PROGRAM V DI KABUPATEN MADIUN

1. Kondisi umum ekonomi desa
 - a. Bagaimana kondisi ekonomi secara umum di desa
 - b. Apa saja komoditas unggulan dari desa
 - c. Bagaimana peran KPS dalam mendukung perekonomian desa
2. Kondisi KPS (Hutan Desa, HTR, HKM, Hutan Adat, Kemitraan Kehutanan)
 - a. Bagaimana kondisi dan situasi KPS (HD/HTR/HKM/HA/NKK)
 - b. Bagaimana pandangan para pihak di desa terkait KPS?
3. Bagaimana Tata kelola kelembagaan KPS yang dijumpai? Apakah aturan main sudah ada dan dijalankan?
4. Bagaimana tata kelola hutan /manajemen areal PS?, zona lindung, zona usaha? Kesepakatan-kesepakatan pengelolaan?
5. Bagaimana tata kelola usaha?
 - a. Apakah KUPS sudah terbentuk, apa jenis KUPS nya?
 - b. Apakah aturan main kelola usaha sudah ada?
6. Apa saja jenis komoditas hutan, HHBK, *agroforestry* yang ada di areal PS?
7. Bagaimana sistem pemasarannya?
8. Jelaskan rantai pasok produk hutan (PS) yang sudah dijual?
9. Jelaskan jenis usaha dan produk potensial yang akan dikembangkan yang dapat meningkatkan pendapatan?
10. Keterampilan apa saja yang telah dimiliki oleh anggota KPS-KUPS dalam pengelolaan KPS-KUPS dan peningkatan pendapatan?
11. Kebutuhan ketrampilan apa yang diharapkan dalam pengelolaan dan pengembangan PS dan peningkatan pendapatan?
12. Dukungan seperti apa yang diharapkan dari Pemerintah Desa, Kecamatan, KPH dan *Forest Programme V*?
13. Apa masukan-masukan terhadap PROGRAM FPV?
14. Apakah Anda merasa lebih bahagia setelah menjadi anggota KPS dan diberikan persetujuan untuk mengelola areal PS?
15. Apa saja aset produktif yang Anda miliki dan bermanfaat untuk mengelola Perhutanan Sosial dan peningkatan pendapatan keluarga?
16. Bagaimana peran dan kontribusi perempuan dan pemuda di dalam pengelolaan Perhutanan Sosial?

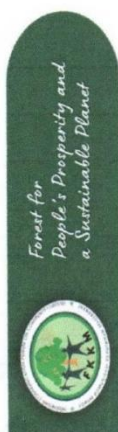
Panduan Observasi-Lapangan

1. Melihat kondisi dan situasi desa yang dikunjungi di mana KPS berada.
2. Melihat kondisi permukiman, perumahan dan kebutuhan dasarnya: listrik, air minum, sarana prasarana, infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, dan lainnya.
3. Melihat kondisi jenis-jenis tanaman di areal Perhutanan Sosial.
4. Melihat kantor KPS dan bagaimana pengelolaan kelembagaannya.
5. Mengobservasi kondisi areal PS, pengelolaan areal PS nya.
6. Melihat fasilitas-fasilitas yang ada untuk mendukung pengembangan ekonomi KPS-KUPS.
7. Melihat kondisi ekosistem di desa dan di areal Perhutanan Sosial (kebersihan di sungai, pengelolaan sungai, pengelolaan sampah, limbah rumah tangga, perlakuan terhadap tanah, dll.)

Lampiran 2 Daftar informan *in-depth interview* di Kabupaten Madiun

Nama Informan	L/P	Nama KPS	Posisi	Tanggal Wawancara
Rian	L	LD Ngadirejo Sejahtera	Ketua KPS	18 November 2025
Sutrisno	L	LD Wono Mulyo	Sekretaris KPS	19 November 2025
Salam	L	LD Sumberbendo Sumber Wono Mulyo	Ketua	20 November 2025
Parminto	L	LD Nglengko Makmur Sejahtera	Anggota	21 November 2025
Purwati	P	LD Wilis Sejahtera	Sekretaris KUPS Selo Gedong (KUPS kopi)	23 November 2025

Lampiran 3 Absensi dan Daftar Peserta FGD Madiun



Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat - Yayasan Kehutanan Masyarakat Indonesia

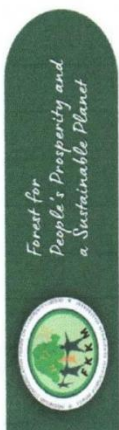
DAFTAR HADIR

Nama Kegiatan : FGD dengan KPS di Kec. Wonosari Madiun
 Kode Kegiatan :
 Hari, Tanggal : Sabtu, 18 November 2015
 Waktu : 11:00 - 12:30 WIB
 Lokasi : Desa Sidomulyo

Jenis Kegiatan:
☐ Rapat
☐ Pelatihan
☐ Lokakarya
☐ Seminar
☒ FGD

NO.	NAMA	GENDER (L/P)	INSTITUSI	POSISI	NO. TELPON	EMAIL	TANDA TANGAN
1	SETYO PURNANTO	L	LD. NGADIREJO	SEKRETARIS	0811747650	setyo_pur@yahoo.co.id	
2	SUTARNO	L	LD. NGADIREJO	PENDATARAN			
3	PIRNADI	L	LD. NGADIREJO	KETUA			
4	WASIT	L	LD. NGADIREJO	RKP			
5	SUPARMIN	L	LD. NGADIREJO	KKP			
6	DARMININGSIH	P	LD. WONOREJO	ANGGOTA	0857 0752 6422		
7	Nyaimon	L	LD. ---	Bendahara			

Laki-laki: ___ / Perempuan: ___ Total: ___



Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat - Yayasan Kehutanan Masyarakat Indonesia

NO.	NAMA	GENDER (L/P)	INSTITUSI	POSISI	NO. TELPON	EMAIL	TANDA TANGAN
8	Jamon.	L	LD Wonojaya	KKP.			
9	Sayem	P	LD Wonojaya	KKP.			
10	Sukono	L	LD Wonojaya	KKP.			
11	Salam	L	LD Jatinunglo	Bendahara.	081394889099		
12	Su dar manto	L	LD Jatinunglo	KKP	0858 1052 5593		
13	Karso Lubimin	L	LD "	KKP			
14	Sadi	L	LD "	KKP			
15	Vosis	L	LD "	KKP			
16	Heri	L	LD "	Pembina.			
17	Slamet	L	LD "	Anggota.			

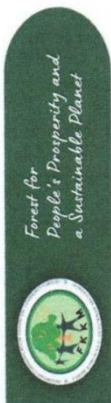
Laki-laki: ___ Perempuan: ___ Total: ___



Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat - Yayasan Kehutanan Masyarakat Indonesia

NO.	NAMA	GENDER (L/P)	INSTITUSI	POSISI	NO. TELPON	EMAIL	TANDA TANGAN
18	Nungki Figit .w	L	FPV		0822 64 55 3838	nungki89gt12@gmail.com	18
19	Riani Nole	L	FKKM	keuangan Audi	0810 74195335		19
20	Sutredli	L	PKCDK	penguluh	08123 4477000	madytonestar71@gmail.com	20
21	Samdhana Achmal Sardi	L	FKKM		68594463920	samdhana06@gmail.com	21
22							22
23							23
24							24
25							25
26							26
27							27

Laki-laki: ___ / Perempuan: ___ Total: ___



Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat - Yayasan Kehutanan Masyarakat Indonesia

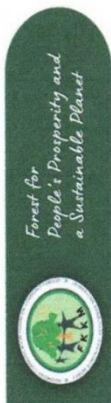
DAFTAR HADIR

Nama Kegiatan : FGD dengan KPS di Kecamatan Pilyangkenceng Madiun
 Kode Kegiatan :
 Hari, Tanggal : 19 November 2025
 Waktu : 10:00 - 12:00
 Lokasi : Desa Luworo

Jenis Kegiatan:
☐ Rapat
☐ Pelatihan
☐ Lokakarya
☐ Seminar
☒ FGD

NO.	NAMA	GENDER (L/P)	INSTITUSI	POSISI	NO. TELPON	EMAIL	TANDA TANGAN
1	Edwin Sutrisno	L	LD		085 339 459 421		
2	Posri	P.	Anggota.				
3	SARNO		- - -				
4	DARWIN		- - -				
5	Puprayitno		- - -				
6	MARSONG.		sekretaris		085 232 553 299		
7	SUTRISNO	P	sekretaris		0022 335 19304		

Laki-laki: ___ / Perempuan: ___ Total: ___



Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat - Yayasan Kehutanan Masyarakat Indonesia

NO.	NAMA	GENDER (L/P)	INSTITUSI	POSISI	NO. TELPON	EMAIL	TANDA TANGAN
8	Satno		anggota				
9	Samin		"				
10	akat		"				
11	Sugiyono		"				
12	samingun		"				
13	Sunafyo		"				
14							
15							
16							
17							

Laki-laki: ___/ Perempuan: ___ Total: ___



Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat - Yayasan Kehutanan Masyarakat Indonesia

DAFTAR HADIR

Nama Kegiatan : FGD dengan KPS di Kecamatan Dagangan
 Kode Kegiatan :
 Hari, Tanggal : Jumat, 21 November 2025
 Waktu : 13:20 - 15:30
 Lokasi : Desa Ngrangit

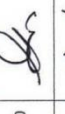
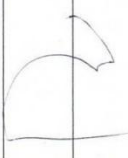
Jenis Kegiatan:
☐ Rapat
☐ Pelatihan
☐ Lokakarya
☐ Seminar
☒ FGD

NO.	NAMA	GENDER (L/P)	INSTITUSI	POSISI	NO. TELPON	EMAIL	TANDA TANGAN
1	yuhani	P		Pesanggem			1
2	Sitwoto	L		Koba LD	082143644311	whota.ms@gmail.com	2
3	SUDARMAJI	L		-	085768808188		3
4	SUPRI	L		ANGGOTA	0822 3276228		4
5	SUHARNO	L		ANGGOTA			5
6	WAHYU LBB	L		Anggota			6
7	ADI SANTOSO	L		ANGGOTA			7

Laki-laki: ___ / Perempuan: ___ Total: ___



Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat - Yayasan Kehutanan Masyarakat Indonesia

NO.	NAMA	GENDER (L/P)	INSTITUSI	POSISI	NO. TELPON	EMAIL	TANDA TANGAN
8	Darmono	L		Anggota			
9	Subianto	L		Anggota			
10	DIDIM PRASETYO	L		Anggota			
11	Sugjo	L		Anggota			
12	Marsunu	L		Ketua	0857 3646 2531		
13	Darel.	P		Anggota			
14	Eddy Sam Suci	P		Anggota			
15	Jamrini Febriansyah	L		Anggota	081 249 623 715		
16	Kadimur	L		Anggota			
17	Mariono Andika P	L		Anggota			

Laki-laki: ___ / Perempuan: ___ Total: ___



Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat - Yayasan Kehutanan Masyarakat Indonesia

NO.	NAMA	GENDER (L/P)	INSTITUSI	POSISI	NO. TELPON	EMAIL	TANDA TANGAN	
18	Martono	L		Anggota	081332281760		18	
19	Parminto	P		Anggota	082142948656		19	
20							20	
21							21	
22							22	
23							23	
24							24	
25							25	
26							26	
27							27	

Laki-laki: ___ / Perempuan: ___ Total: ___

Daftar Hadir FGD di Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun

Tanggal FGD : Kamis, 20 November 2025

Lokasi : Areal PS, Desa Sumberbendo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun

Nama	Jenis Kelamin	Nama KPS
Fatah Muaziz	Laki-laki	LD Sumberbendo Sumber Wono Mulyo
Ike Ardilasari	Perempuan	LD Sumberbendo Sumber Wono Mulyo
Wawan	Laki-laki	LD Sumberbendo Sumber Wono Mulyo
Waidi	Laki-laki	LD Sumberbendo Sumber Wono Mulyo
Dwito	Laki-laki	LD Sumberbendo Sumber Wono Mulyo
Sutris	Laki-laki	LD Sumberbendo Sumber Wono Mulyo
Laki-laki: 5; perempuan:1		

Daftar Hadir FGD di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun

Tanggal FGD : Minggu, 23 November 2025

Lokasi : Sekretariat LD Wilis Sejahtera, Desa Bodag, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun

Nama	Jenis Kelamin	Nama KPS
Tamsir	Laki-laki	LPHD Kare Makmur
Suwito	Laki-laki	LPHD Kare Makmur
Harianto	Laki-laki	LD Wilis Sejahtera
Suwito	Laki-laki	LD Wilis Sejahtera
Priono	Laki-laki	LD Wilis Sejahtera
Diana N.	Laki-laki	LD Wilis Sejahtera
Burwah	Laki-laki	LD Wilis Sejahtera
Resman	Laki-laki	LD Wilis Sejahtera
Agun S. F.	Laki-laki	LPHD Tani Subur
Suryatno	Laki-laki	LPHD Tani Subur
Fita Refianingsih	Perempuan	LPHD Tani Subur
Tantri Dwi J.	Perempuan	LPHD Tani Subur
Laki-laki: 10; Perempuan: 2		

Lampiran 4 Panduan FGD

Panduan *Focus Group Discussion* (FGD) Baseline Study Pendapatan Rumah Tangga (RT)/Kepala Keluarga anggota KTH di Kabupaten Madiun

Pengantar

Panduan ini dipergunakan dalam *Focus Group Discussion* Survei Pendapatan Rumah Tangga (RT)/Kepala Keluarga dalam Forest Programme V (FPV), di 2 lokasi yaitu Kabupaten Garut dan Kabupaten Madiun. Tujuan survei adalah: (1) Mendapatkan informasi terkait sistem mata pencaharian pada masyarakat penerima manfaat FPV dan menganalisis keterkaitan pendapatan masyarakat dengan kegiatan FPV, (2) Membangun data dasar (*baseline*) ekonomi sosial di tingkat masyarakat penerima manfaat dan mengintegrasikannya dengan sistem M&E FPV.

FGD akan dilaksanakan oleh Tim Konsultan Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM)/Yayasan Kehutanan Masyarakat Indonesia (YKMI) yang akan bekerjasama dengan Pendamping Perhutanan Sosial dan sekaligus sebagai enumerator.

Tujuan FGD

FGD bertujuan untuk menggali data dan informasi terkait pendapatan rumah tangga meliputi sumber-sumber, pendapatan yang berasal dari KTH, harga-harga komoditas, prioritas ketrampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh anggota KPS/KUPS dalam pengembangan ekonomi, aspek pasar dan rantai pasok.

Peserta FGD

Penentuan peserta FGD adalah pengurus KTH dan KUPS di beberapa KUPS di Kabupaten Garut dan Kabupaten Madiun. Selain itu, kriteria peserta antara lain: aktif menggarap/mengelola areal perhutanan sosial dan ada hasil dari areal perhutanan sosial yang digarap/dikelola baik untuk konsumsi sendiri atau untuk dijual. Total peserta FGD antara 10-15 orang. Waktu FGD sekitar 2-3 jam dilakukan di kantor KTH atau kepala desa tergantung tempat yang sesuai. FGD akan dilakukan 2 kali di setiap kabupaten. Diupayakan ada FGD dengan perempuan dan pemuda.

Untuk menggali pendapat dan memperkuat dinamika FGD, maka Tim Konsultan akan merumuskan beberapa pertanyaan kunci, sebagai berikut:

Pertanyaan Kunci FGD 1:

1. Sebutkan sumber-sumber pendapatan Bapak dan Ibu dari areal perhutanan Sosial, kategorikan berdasarkan (basis per KPS):
 - Hasil hutan kayu
 - Hasil hutan non-kayu (misal rotan, kulit kayu, etnobotani, dll)
 - Pemanfaatan kawasan (agroforestry, silvovasture, dll)
 - Jasa lingkungan (ekowisata, pendidikan lingkungan, PES, dll)
 - Perburuan untuk sumber protein (ada kemungkinan tidak ada praktik perburuan di lokasi studi. Perlu diamati terlebih dulu)
2. Berapa volume produksi komoditas yang Bapak dan Ibu hasilkan dalam satu tahun? (untuk menghitung NTE komoditas)
3. Berapa harga satuannya? (untuk menghitung NTE)
4. Jumlah masing-masing pendapatan, musim /tahun, harga pasar, dll (untuk memperjelas pertanyaan 2 dan 3, juga untuk menghitung NTE komoditas)
5. Berapa jumlah pengunjung dan harga karcis dalam satu tahun? (untuk menghitung NTE jasa lingkungan)

6. Bagaimana pemasaran produk-produk di atas? Apakah hanya di desa, kota kabupaten, kota provinsi?
 7. Apa kendala yang dihadapi bapak dan Ibu dalam mengembangkan usaha-usaha berbasis komoditas di atas?
 8. Apa upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi permasalahan di atas?
 9. Apa kebutuhan pengembangan kapasitas (pelatihan, kunjungan belajar, dukungan teknis, alat ekonomi produktif, modal usaha, dll.) yang diperlukan dalam pengembangan produk hingga pemasaran hasil tersebut?
 10. Apa saran dan masukan terhadap Forest Programme V?
- Pertanyaan lainnya, bisa dikembangkan di desa/KTH

Lampiran 5 Instrumen Survei

INSTRUMEN SURVEI PENDAPATAN RUMAH TANGGA KELOMPOK PERHUTANAN SOSIAL KABUPATEN MADIUN

PERSETUJUAN RESPONDEN

[Baca Lembar informasi personal responden ini, Jika responden setuju untuk berpartisipasi, lengkapi form persetujuan ini]

Nama saya adalah dan saya enumerator yang bekerja untuk program FPV dan mengatasnamakan Yayasan Kehutanan Masyarakat Indonesia atau dikenal FKMM. Hari ini saya menginginkan Anda untuk berpartisipasi dalam studi ini. Studi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran kondisi sosial dan ekonomi anggota Kelompok Perhutanan Sosial sebagai data dasar (*baseline*) sosio-ekonomi. Jika Anda setuju, maka saya akan melakukan wawancara dan akan merekam jawaban dalam lembar pertanyaan ini.

Apakah Anda mau terlibat dalam survei/studi ini?	1 = Ya	3 = Tidak
Nama enumerator:		
Tanggal :		
Lokasi KPS:		
Nama desa dan dusun:		
Kecamatan dan kabupaten:		
Titik GPS (jika ada) :		

Modul O: Karakteristik KPS dan KUPS (Khusus Kabupaten Madiun)

O1	Bagaimana karakteristik ketinggian di lokasi KPS Anda?	☐ 1 = Dataran tinggi (Madiun Selatan) ☐ 2 = Dataran sedang (Madiun Utara) ☐ 3 = Dataran rendah (Madiun Tengah)
O2	Kelas KUPS	☐ 1 = Biru ☐ 2 = Perak ☐ 3 = Emas ☐ 4 = Platinum

Modul A. Rumah Tangga Responden

a. Identitas Responden

AA1	Nama responden:	
Aa2	Jenis kelamin:	☐ 1 = Perempuan ☐ 3 = Laki-laki
AA3	Umur	☐ 1 = < 15 tahun ☐ 2 = 16 – 25 tahun ☐ 3 = 26 – 35 tahun ☐ 4 = 36 – 45 tahun ☐ 5 = 46 – 55 tahun ☐ 6 = > 55 tahun
AA4	Posisi dalam keluarga	☐ 1 = Kepala keluarga (suami) ☐ 2 = Kepala keluarga (istri) ☐ 3 = Lajang ☐ 4 = Anak/anggota keluarga
AA5	Pendidikan terakhir	☐ 1 = Tidak sekolah ☐ 2 = SD sederajat atau Paket A ☐ 3 = SMP/SLTP sederajat atau Paket B

		☐ 4 = SMA/SLTA sederajat atau Paket C ☐ 5 = Pendidikan Tinggi (D-3 – S-1/D-4) ☐ 6 = Pendidikan Pasca Sarjana (S-2 & S-3)
AA6	Nama Kelompok Perhutanan Sosial?	

b. Komposisi keluarga

Semua pertanyaan ini mengacu pada kondisi rumah tangga Anda dalam 12 bulan terakhir.

Data Dasar Rumah Tangga: Anggota rumah tangga adalah orang yang masih tinggal bersama atau masih dalam tanggungan.

AB1	Berapa orang jumlah anggota keluarga dalam rumah tangga ini?	
AB2	(Jika di dalam satu rumah terdapat > 1 KK) Berapa kepala keluarga yang ada di dalam rumah tangga ini?	
AB3	Berapa orang anggota rumah tangga laki-laki yang masuk usia dewasa? (usia $\geq$ 17 tahun)	
AB4	Berapa orang anggota rumah tangga perempuan yang masuk usia dewasa? (usia $\geq$ 17 tahun)	
AB5	Berapa orang jumlah anak laki-laki (usia < 17 tahun)?	
AB6	Berapa jumlah anak perempuan (usia < 17 tahun)?	
AB7	Apa suku di rumah tangga Anda?	☐ 1 = Jawa ☐ 3 = Pendatang
AB8	Apakah ada dalam keluarga ini yang memiliki posisi kepemimpinan dalam masyarakat?	☐ 1 = Ya ☐ 3 = Tidak
AB8a	Jika menjawab <i>Ya</i> (lihat pertanyaan AB8), sebagai apa?	

Modul B. Pendidikan

a. Pendidikan

BA1	Apa tingkat pendidikan paling tinggi yang pernah ditempuh dari orang dewasa (usia $\geq$ 17 tahun) dalam keluarga ini?	☐ 1 = Tidak sekolah ☐ 2 = SD sederajat atau Paket A ☐ 3 = SMP/SLTP sederajat atau Paket B ☐ 4 = SMA/SLTA sederajat atau Paket C ☐ 5 = Pendidikan Tinggi (D-3 – S-1/D-4) ☐ 6 = Pendidikan Pasca Sarjana (S-2 & S-3)
BA2	Siapa yang menempuh jenjang pendidikan tersebut?	☐ 1 = Responden ☐ 2 = Suami/istri ☐ 3 = Anak dewasa
BA3	Bagaimana status kelulusannya?	☐ 1 = Lulus ☐ 2 = Belum lulus ☐ 3 = Tidak lulus

b. Pendidikan Anak

BB1	Menurut Anda, dalam skala 1 – 5, seberapa penting pendidikan untuk anak?	☐ 1 = Sangat tidak penting ☐ 2 = Tidak penting
-----	--	---

		☐ 3 = Netral ☐ 4 = Penting ☐ 5 = Sangat penting
BB2	Berapa banyak anak laki-laki (usia < 17 tahun) di keluarga ini yang sudah tidak bersekolah?	
BB2a	Jika terdapat anak laki-laki yang sudah tidak bersekolah, sebutkan alasannya (<i>bisa memilih lebih dari satu</i>).	☐ 1 = Kendala biaya ☐ 2 = Anak kesulitan belajar/tidak ingin bersekolah ☐ 3 = Anak sudah bekerja ☐ 4 = Anak sudah menikah
BB3	Berapa banyak anak perempuan (usia < 17 tahun) di keluarga ini yang sudah tidak bersekolah?	
BB3a	Jika terdapat anak perempuan yang sudah tidak bersekolah, sebutkan alasannya (<i>bisa memilih lebih dari satu</i>).	☐ 1 = Kendala biaya ☐ 2 = Anak kesulitan belajar/tidak ingin bersekolah ☐ 3 = Anak sudah bekerja ☐ 4 = Anak sudah menikah

Modul C. Infrastruktur Dasar Rumah Tangga

C1	Kondisi rumah (<i>Jika wawancara dilakukan di rumah responden, petugas bisa melihat saja dan tidak perlu ditanyakan</i>)	☐ 1 = Rumah tidak permanen (lantai tanah, dinding papan/tepas) ☐ 2 = Rumah semi-permanen (lantai semen, dinding papan atau batu) ☐ 3 = Rumah permanen (lantai keramik, dinding batu)
C2	Apakah rumah ini milik bapak/ibu (keluarga)	☐ 1 = Milik ☐ 2 = Sewa ☐ 3 = Menempati milik keluarga/kerabat ☐ 4 = Lainnya: menyicil, dll
C3	Apakah Anda bisa memperoleh air bersih?	☐ 1 = Ya ☐ 3 = Tidak
C3a	Jika menjawab <i>Ya</i> , dari mana Anda memperoleh air bersih? (<i>bisa memilih lebih dari satu</i>)	☐ 1 = Sungai ☐ 2 = Mata air ☐ 3 = Pipa air (PAM) ☐ 4 = Sumur
C4	Apakah rumah Anda terhubung dengan jaringan listrik?	☐ 1 = Ya ☐ 3 = Tidak
C5	Apakah rumah ini memiliki toilet di dalam rumah? (<i>bisa dengan melakukan observasi</i>)	☐ 1 = Ya ☐ 3 = Tidak
C5a	(<i>Jika tidak ada toilet di rumah</i>) Di mana Anda memperoleh akses Mandi Cuci Kakus (MCK, bisa memilih lebih dari satu)	☐ 1 = Kamar mandi umum ☐ 2 = Sungai ☐ 3 = Telaga, kolam, danau, dll.

C6	Bahan bakar apa yang digunakan untuk memasak? (bisa memilih lebih dari satu)	☐ 1 = Kayu bakar ☐ 2 = Gas ☐ 3 = Minyak tanah ☐ 4 = Kompor listrik
C7a	Jika menggunakan kayu bakar, apakah berasal dari areal Perhutanan Sosial?	☐ 1 = Ya ☐ 3 = Tidak

Modul D. Kesejahteraan dan Kekayaan

D1	Menurut penilaian Anda, dalam skala 1 – 5, seberapa sejahtera keluarga ini?	☐ 1 = Sangat miskin ☐ 2 = Miskin ☐ 3 = Cukup/pas-pasan ☐ 4 = Sejahtera ☐ 5 = Sangat sejahtera
D2	Dalam skala 1 sampai 5, seberapa bahagia Anda untuk tinggal di sini?	☐ 1 = Sangat tidak bahagia ☐ 2 = Tidak bahagia ☐ 3 = Netral ☐ 4 = Bahagia ☐ 5 = Sangat bahagia
D3	Apakah Anda menjadi semakin sejahtera setelah menjadi anggota KPS dan diberikan persetujuan untuk mengelola areal PS?	☐ 1 = Semakin miskin ☐ 2 = Tidak ada perubahan ☐ 3 = Semakin sejahtera
D4	Apakah Anda merasa lebih bahagia setelah menjadi anggota KPS dan diberikan persetujuan untuk mengelola areal PS?	☐ 1 = Semakin tidak bahagia ☐ 2 = Tidak ada perubahan ☐ 3 = Semakin bahagia

a. Aset Produktif

DA1	Berapa unit sepeda motor yang rumah tangga ini miliki?	
DA2	Berapa unit mobil (pribadi) yang rumah tangga ini miliki?	
DA3	Berapa unit mobil bak (untuk membawa hasil panen) yang rumah tangga ini miliki?	
DA4	Berapa unit cangkul yang rumah tangga ini miliki?	
DA5	Berapa unit golok/parang/sabit yang rumah tangga ini miliki?	
DA6	Berapa pasang sepatu boots yang rumah tangga ini miliki?	
DA7	Berapa unit karung panen yang rumah tangga ini miliki?	
DA8	(Cukup diobservasi) Apakah rumah tangga ini mempunyai televisi atau kulkas? (bisa memilih lebih dari 1)	☐ 1 = Televisi ☐ 2 = Kulkas

DA9	(Bisa diobservasi atau ditanyakan) Apa saja barang berharga yang ada di rumah ini? (Kosongkan jika tidak ada)	
DA10	Apakah Anda memiliki sawah/tanah di luar areal PS?	☐ 1 = Ya ☐ 3 = Tidak
DA10a	Jika menjawab Ya , berapa luasnya? (dalam meter persegi; m ²)	
DA10b	(Opsional, hanya jika responden bersedia menjawab) Jika menjawab Ya , berapa perkiraan harga tanahnya? (dalam rupiah)	

b. Penghasilan dari Perhutanan Sosial

DB1	Kepemilikan garapan dalam areal PS (dalam ha)	
DB2	Berapa luas areal PS yang Anda garap? (dalam ha)	
DB3	Apakah Anda mendapat Penghasilan yang berasal dari kegiatan perhutanan sosial ?	☐ 1 = Ya ☐ 3 = Tidak
DB3a	Jika menjawab Ya , sebutkan jenis-jenis penghasilan yang Anda peroleh dari Perhutanan Sosial (bisa memilih lebih dari satu):	☐ 1 = Hasil Hutan Kayu ☐ 2 = Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) ☐ 3 = Jasa lingkungan ☐ 4 = Pemanfaatan kawasan (agroforestry, silvopasture, aquaculture)
DB3a1	Hasil hutan kayu: a. Sengon (m ³ x harga pasar) b. Kayu Afrika/Manii (m ³ x harga pasar) c. Jati (m ³ x harga pasar) d. Mahoni (m ³ x harga pasar) e. Lainnya (m ³ x harga pasar)	a. Rp _____/tahun b. Rp _____/tahun c. Rp _____/tahun d. Rp _____/tahun e. Rp _____/tahun
DB3a2	Hasil Hutan Bukan Kayu a. Aren (kg x panen x harga) b. Kopi c. Buah-buahan d. Porang e. Empon-empon f. Lainnya	a. Rp _____/tahun b. Rp _____/tahun c. Rp _____/tahun d. Rp _____/tahun e. Rp _____/tahun f. Rp _____/tahun
DB3a3	Penghasilan dari jasa lingkungan a. Wisata alam (pemandu, akomodasi, dagangan) b. Lainnya	a. Rp _____/tahun b. Rp _____/tahun
DB3a4	Penghasilan dari pemanfaatan kawasan a. Makanan pokok (padi, jagung, dll) b. Umbi-umbian c. Sayuran d. Ternak e. Lain-lain	a. Rp _____/tahun b. Rp _____/tahun c. Rp _____/tahun d. Rp _____/tahun e. Rp _____/tahun

DB4	Pemanfaatan sumber daya hutan untuk konsumsi sendiri: a. Sayuran b. Protein (ikan, hewan buruan, ternak) c. Madu d. Padi e. Umbi-umbian (ubi, singkong, dll.) f. Rempah-rempah g. Buah-buahan h. Tanaman obat i. Tanaman tahunan (kopi, aren, kelapa) j. Lainnya		a. _____ kg /hari _____ kg/bulan b. _____ kg /hari _____ kg/bulan c. _____ ml/hari _____ ml/bulan d. _____ kg /hari _____ kg/bulan e. _____ kg /hari _____ kg/bulan f. _____ kg /hari _____ kg/bulan g. _____ kg /hari _____ kg/bulan h. _____ kg /hari _____ kg/bulan i. _____ kg /hari _____ kg/bulan j. _____ kg /hari _____ kg/bulan	
DB5	Berapa perkiraan nilai (dalam rupiah) komoditas hasil PS (sayuran, buah-buahan, dll.) yang keluarga Anda konsumsi sendiri?		Rp _____ /bulan	
DB6	Dibandingkan sebelum ada KPS, apakah Ada perbedaan dalam pemanfaatan sumber daya hutan tersebut?		☐ 1 = Ya ☐ 3 = Tidak	
DB7	Dari daftar di bawah ini, jenis buah-buahan dan sayuran apa yang Anda tanam untuk dijual pada areal PS?			
		Checklist		
a	Mangga		n	Ubi
b	Duku		o	Rambutan
c	Alpukat		p	Jeruk
d	Petai		q	Cempedak
e	Jernang		r	Nangka
f	Durian		s	Jambu
g	Jengkol		t	Sawo
h	Gaharu		u	Cokelat/kakao
i	kopi		v	Sayuran
j	Manggis		w	Kelapa
k	Cabai		z	Dan lain lain (sebutkan, pisahkan dengan koma) (_____):
l	Pisang			
m	karet			
DB8	Dari daftar di bawah ini, jenis buah-buahan dan sayuran apa yang Anda tanam untuk konsumsi sendiri pada areal PS?			
		Checklist		
a	Mangga		n	Ubi
b	Duku		o	Rambutan
c	Alpukat		p	Jeruk
d	Petai		q	Cempedak
e	Jernang		r	Nangka
f	Durian		s	Jambu
g	Jengkol		t	Sawo
h	Gaharu		u	Cokelat

i	kopi			v	sayuran	
j	Manggis			w	Kelapa	
k	Cabai			z	Dan lain lain	
l	Pisang				():	
m	karet					

DB9	Bagaimana Anda mendapatkan beras? (bisa memilih lebih dari satu)	☐ 1 = Menanam sendiri ☐ 2 = Membeli ☐ 3 = Bantuan pemerintah ☐ 4 = Lainnya (sebutkan: _____)
DB10	Berapa beras yang keluarga Anda konsumsi?	_____ kg/hari_kg/bulan
DB11	Bagaimana kecukupan beras dalam rumah tangga Anda?	☐ 1 = Sangat tidak cukup (tidak bisa/sering tidak bisa memperoleh beras) ☐ 2 = Tidak cukup (terkadang tidak bisa memperoleh beras) ☐ 3 = Cukup (bisa memperoleh beras untuk konsumsi jangka pendek) ☐ 4 = Sangat cukup (bisa memperoleh beras untuk konsumsi sampai musim panen berikutnya)

c. Penghasilan dari Luar Perhutanan Sosial

DC1	Siapa saja anggota keluarga Anda yang memiliki pekerjaan selain dari menggarap areal PS? (kosongkan jika tidak ada)	☐ 1 = Responden ☐ 2 = Suami/istri ☐ 3 = Anak dewasa
DC2	Apakah jenis pekerjaan mereka? (Kosongkan jika menjawab " tidak " ada pada pertanyaan DC1)	☐ 1 = Petani ☐ 2 = Pedagang ☐ 3 = Guru ☐ 4 = Pekerja bangunan ☐ 5 = Aparatur Sipil Negara (ASN) ☐ 6 = Pegawai swasta ☐ 7 = Lainnya (sebutkan _____)
DC3	Dalam setahun terakhir, berapa penghasilan rata-rata per bulan dari pekerjaan ini? (dalam Rupiah) (Kosongkan jika menjawab " tidak " ada pada pertanyaan DC1)	Rp _____/bulan

d. Pengeluaran

DD1	Berapa perkiraan pengeluaran rata-rata keluarga Anda setiap bulan? (dalam rupiah)	
DD2	Pengeluaran jika dibagi dengan pengeluaran untuk : a. Kebutuhan biaya makan b. Kebutuhan biaya sekolah/pendidikan anak	a. Rp _____ b. Rp _____ c. Rp _____ d. Rp _____ e. Rp _____

	c. Kebutuhan biaya perawatan rumah d. Kebutuhan biaya transportasi e. Kebutuhan biaya sosial/keagamaan/adat f. Biaya sakit/perawatan kesehatan g. Kebutuhan biaya lainnya	f. Rp _____ g. Rp _____
DD3	Apakah ada biaya yang berkaitan dengan pengelolaan/pendapatan dari PS?	☐ 1 = Ya ☐ 3 = Tidak
DD3a	Jika ada, berapa biayanya? (dalam Rp/bulan)	
DD4	Berapa uang yang Anda tabung setiap bulan? (dalam Rp/bulan. Tuliskan 0 jika tidak memiliki tabungan)	
DD5	Apakah Anda memiliki utang?	☐ 1 = Ya ☐ 3 = Tidak
DD5a	Jenis utang (<i>bisa memilih lebih dari satu</i>)	☐ 1 = Utang kepada teman/kerabat ☐ 2 = Utang bank ☐ 3 = Pinjaman daring ☐ 4 = Utang kepada rentenir
DD6	Siapa dalam keluarga Anda yang mengambil keputusan terkait keuangan keluarga?	☐ 1 = Istri ☐ 3 = Suami

Modul E. Persepsi, Keterampilan, dan Aspirasi

a. Persepsi

EA1	Apakah Anda lebih mudah mendapatkan pekerjaan/pendapatan setelah adanya PS?	☐ 1 = Ya ☐ 3 = Tidak
EA2	Apakah Anda merasa lebih nyaman dalam mengelola hutan dan lahan areal PS daripada sebelumnya?	☐ 1 = Ya ☐ 3 = Tidak
EA3	Apa rencana usaha dan kegiatan yang Anda pikirkan ke depan?	

b. Keterampilan dan Pengetahuan dalam Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial

EB1	Apa saja keterampilan yang Anda miliki saat ini untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga? (sebutkan, pisahkan dengan koma)	
EB2	Apakah Anda mengetahui tata kelola lembaga Perhutanan Sosial?	☐ 1 = Ya ☐ 3 = Tidak
EB3	Apakah Anda mengetahui tata kelola konflik?	☐ 1 = Ya ☐ 3 = Tidak
EB4	Apakah Anda mengetahui tata kelola ekonomi?	☐ 1 = Ya ☐ 3 = Tidak
EB5	Apakah Anda mengetahui tata manajemen hutan?	☐ 1 = Ya ☐ 3 = Tidak
EB6	Menurut Anda, keterampilan apa saja yang saat ini diperlukan untuk dapat mengelola PS? (sebutkan, pisahkan dengan koma)	
EB8	Apa keterampilan yang Anda harapkan dan belum Anda miliki untuk mengelola PS? (sebutkan untuk masing-masing kategori, pisahkan dengan koma)	a. _____ b. _____ c. _____

	a. Tata kelola konflik b. Tata kelola kelembagaan c. Tata kelola manajemen hutan d. Tata kelola usaha	d. _____
EB9	Apa pengetahuan atau pelatihan yang Anda butuhkan untuk kesejahteraan Anda namun tidak berkaitan dengan pengelolaan PS? (sebutkan, pisahkan dengan tanda koma)	Sebutkan:

c. Aspirasi

EC1	Seperti apa keinginan hidup Anda lima (5) tahun mendatang?	
EC2	Apa yang Anda harapkan untuk anak-anak Anda dalam lima (5) tahun mendatang?	
EC3	Apa yang dapat pemerintah lakukan untuk meningkatkan taraf hidup Anda?	
EC4	Apa yang Program FPV bisa lakukan untuk meningkatkan taraf hidup Anda?	
EC5	Apa saran Anda untuk perbaikan tata kelola PS?	

Lampiran 6 Daftar responden di Kabupaten Madiun

No	Nama Responden	Nama Kelompok Perhutanan Sosial	Kecamatan
1	Agun S. F.	LD Tani Subur	Kare
2	Agus Dwi Cahyono	LD Kare Makmur	Kare
3	Agus Triono	LD Wonorejo II	Dagangan
4	Aji Santoso	LD Sumber Wilis	Dagangan
5	AKAT	LD Wono Mulyo	Pilangkenceng
6	Bambang Sujatmiko	LD Tani Subur	Kare
7	Burwah	LD Wilis Sejahtera	Kare
8	Cholil Edy Suwanto	LD Wonopanguripan	Dagangan
9	DARMININGSIH	LD Jati Mulyo	Wonoasri
10	DARMONO	LD Sumber Wilis	Dagangan
11	Darsono	LD Tani Mulyo	Mejayan
12	Darul Istichomah	LD Wonorejo II	Dagangan
13	Dewisri	LD Sumber Wilis	Dagangan
14	Diana N.	LD Wilis Sejahtera	Kare
15	Didik Prasetyo	LD Nglengko Makmur Sejahtera	Dagangan
16	Didik Purwanto	LD Kare Makmur	Kare
17	Dwi Cahyoko	LD Wonopanguripan	Dagangan
18	Dwito	LD Sumberbendo Sumber Wono Mulyo	Saradan
19	EDWIN SUTRISNO	LD Wono Lestari	Pilangkenceng
20	Edy	LD Wonorejo II	Dagangan
21	EKA NURCAHYANI	LD Ngadirejo Sejahtera	Wonoasri
22	Fatah Muaziz	LD Sumberbendo Sumber Wono Mulyo	Saradan
23	Fita Refianingsih	LD Tani Subur	Kare
24	Handayani	LD Tani Mulyo	Mejayan
25	Harianto	LD Wilis Sejahtera	Kare
26	Ike Ardilasari	LD Sumberbendo Sumber Wono Mulyo	Saradan
27	JAMIN	LD Wonorejo Asri	Wonoasri

No	Nama Responden	Nama Kelompok Perhutanan Sosial	Kecamatan
28	Jamroni Febriansyah	LD Wonorejo II	Dagangan
29	JARNO	LD Wono Lestari	Pilangkenceng
30	Jonosiswanto	LPHD Jati Mulyo Pinunjul	Saradan
31	JUMINI	LD Tani Mulyo	Mejayan
32	Kadimun	LD Nglengko Makmur sejahtera	Dagangan
33	Kardi	LD Tulung Wono Makmur	Saradan
34	Katipan	LPHD Jati Mulyo Pinunjul	Saradan
35	Kohiran	LD Kare Makmur	Kare
36	Marshunu	LD Wonorejo II	Dagangan
37	MARSONO	LD Wono Lestari	Pilangkenceng
38	Martono	LD Nglengko Makmur sejahtera	Dagangan
39	Mudiono	LPHD Jati Mulyo Pinunjul	Saradan
40	PARMIN	LD Ngadirejo Sejahtera	Wonoasri
41	PARMIN	LD Wono Lestari	Pilangkenceng
42	Parminto	LD Nglengko Makmur Sejahtera	Dagangan
43	Pirnadi	LD Ngadirejo Sejahtera	Wonoasri
44	Prayogo Nur Syahari	LPHD Jati Mulyo Pinunjul	Saradan
45	Priono	LD Wilis Sejahtera	Kare
46	Resman	LD Wilis Sejahtera	Kare
47	RIAN WASIT	LD Ngadirejo Sejahtera	Wonoasri
48	SADI	LD Jati Mulyo	Wonoasri
49	SALAM	LD Jati Mulyo	Wonoasri
50	Samin	LD Wono Mulyo	Pilangkenceng
51	Samingun	LD Wono Mulyo	Pilangkenceng
52	Saminianto	LD Tulung Wono Makmur	Saradan
53	Sarno	LD Wono Mulyo	Pilangkenceng
54	Satmini	LD Tani Mulyo	Mejayan
55	SAYEM	LD Wonorejo Asri	Wonoasri
56	SETYO PURWANTO	LD Ngadirejo Sejahtera	Wonoasri

No	Nama Responden	Nama Kelompok Perhutanan Sosial	Kecamatan
57	Siswoto	LD Nglengko Makmur Sejahtera	Dagangan
58	Slamet Riyanto	LD Tani Subur	Kare
59	Solikin	LD Tulung Wono Makmur	Saradan
60	Subandrio	LD Bandungan Wono Jati Waluyo	Saradan
61	SUDARMANTO	LD Jati Mulyo	Wonoasri
62	Sudjono	LD Wono Mulyo	Pilangkenceng
63	Sugiyo	LD Wono Mulyo	Pilangkenceng
64	SUHARNO	LD Sumber Wilis	Dagangan
65	Sukatno	LD Tulung Wono Makmur	Saradan
66	SUKONO	LD Wonorejo Asri	Wonoasri
67	Sumadi	LD Tulung Wono Makmur	Saradan
68	Sunar	LD Tulung Wono Makmur	Saradan
69	Sunardi	LD Kare Makmur	Kare
70	Sunaryo	LD Wono Lestari	Pilangkenceng
71	Supono	LPHD Jati Mulyo Pinunjul	Saradan
72	Supri	LD Sumber Wilis	Dagangan
73	SUPRIANTO	LD Jati Mulyo	Wonoasri
74	Suprianto	LD Bandungan Wono Jati Waluyo	Saradan
75	Suradi	LD Bandungan Wono Jati Waluyo	Saradan
76	Suraji	LD Bandungan Wono Jati Waluyo	Saradan
77	Surono	LD Tani Mulyo	Mejayan
78	Surwarno	LD Wonopanguripan	Dagangan
79	Suryatno	LD Tani Subur	Kare
80	Sutarmo	LD Bandungan Wono Jati Waluyo	Saradan
81	SUTARNO	LD Ngadirejo Sejahtera	Wonoasri
82	Sutono	LD Bandungan Wono Jati Waluyo	Saradan
83	Sutris	LD Wonopanguripan	Dagangan
84	Sutris	LD Sumberbendo Sumber Wono Mulyo	Saradan
85	Sutrisno	LD Wono Lestari	Pilangkenceng

No	Nama Responden	Nama Kelompok Perhutanan Sosial	Kecamatan
86	Suwito	LD Kare Makmur	Kare
87	Suwito	LD Wilis Sejahtera	Kare
88	SUYATI	LD Wonorejo Asri	Wonoasri
89	Tamsir	LD Kare Makmur	Kare
90	Tantri Dwi J.	LD Tani Subur	Kare
91	TARIMAN	LD Wonorejo Asri	Wonoasri
92	Tun	LD Tani Mulyo	Mejayan
93	Wahyu Igo Budi S	LD Sumber Wilis	Dagangan
94	Waidi	LD Sumberbendo Sumber Wono Mulyo	Saradan
95	Warsini	LD Wonopanguripan	Dagangan
96	WASIS NUR	LD Jati Mulyo	Wonoasri
97	Wawan	LD Sumberbendo Sumber Wono Mulyo	Saradan
98	Yanto	LD Wonorejo II	Dagangan
99	Yono	LD Wonopanguripan	Dagangan
100	YUDA HADI KRISMANTORO	LD Wonorejo Asri	Wonoasri
101	Yunani	LD Nglengko Makmur Sejahtera	Dagangan
102	Yuni Fatmawati	LPHD Jati Mulyo Pinunjul	Saradan

Lampiran 7. Daftar enumerator Kabupaten Madiun

Daftar penyuluh di Kabupaten Madiun

Nama penyuluh	Dampingan
Sumedi, SP	LD Ngadirejo Sejahtera
	LD Jati Mulyo
	LD Wonorejo Asri
Mujiyanto, SP	LD Wono Lestari
	LD Wono Mulyo
Arik Adi Purnama, S.Hut	LD Sumberbendo Sumber Wono Mulyo
	LD Bandungan Wono Jati Waluyo
	LPHD Jati Mulyo Pinunjul
	LD Tulung Wono Makmur
Gilang Arga Kesuma	LD Tani Mulyo
Abdul Wahab, SP	LD Tani Subur
	LD Wilis Sejahtera
	LD Kare Makmur
Sri Wahjuni Karjawati, SP	LD Wonorejo II
	LD Wonopanguripan
	LD Sumber Wilis
Fayuda Setyawanto, S.ST	LD Nglengko Makmur Sejahtera

Lampiran 8 Dokumentasi Kegiatan



Lampiran Gambar 1. Pembukaan Acara Pembekalan Enumerator Kabupaten Madiun oleh Kepala Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Kabupaten Madiun



Lampiran Gambar 2. Pengisian Kuesioner oleh Responden dan Focus Group Discussion di Kabupaten Madiun



Lampiran Gambar 3. Areal Perhutanan Sosial di Pilangkenceng dengan sistem agroforestri dengan jenis tanaman Mangga, Jabon, dan Jagung



Lampiran Gambar 4. Rumah masyarakat di Sumberbendo, di halaman rumah terdapat tanaman jagung,

Lampiran 9. Data Survei Kabupaten Madiun

Data hasil pengisian kuesioner dapat diakses pada tautan:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PpnQIHgidakJ6GArak3VTwEks_y05Yzt/edit?usp=sharing&ouid=105624972195701511734&rtpof=true&sd=true

atau juga dapat dibuka dengan memindai kode QR berikut:

